

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR : 09



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)

TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota terpilih;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana telah dirubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, yang menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. [Undang-Undang No 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. [Undang-Undang No 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...

8. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. [Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 *jo.* Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 nomor 03);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 *jo.* Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
3. Walikota adalah Walikota Bandung

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretarian DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah Untuk mewujudkan visis Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk perioade 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJM Nasional.
9. Renacana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2009 – 2013

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2009-2013 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a. visi ...

- a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah; dan
 - b. berisikan arahan kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2009 – 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, dan RKPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2009-2013

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS
BAB III	: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	: KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB V	: INDIKATOR KINERJA
BAB VI	: PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2009 – 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB ...

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA BANDUNG
TAHUN 2009 – 2013

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANDUNG
2009 – 2013**

DAFTAR ISI

	Daftar isi	i
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
1.1	Latar Belakang	I – 1
1.2	Maksud dan Tujuan	I – 2
1.3	Landasan Penyusunan	I – 2
1.4	Hubungan RPJMD Kota Bandung dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I – 4
1.5	Sistematika	I – 6
1.6	Proses Penyusunan	I – 6
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATERGIS	II - 1
2.1	Kondisi Fisik Lingkungan	II – 1
2.2	Sosial Kependudukan	II – 22
2.3	Perekonomian Daerah	II – 34
2.4	Kinerja Pemerintahan	II – 39
2.5	Pengelolaan Keuangan Daerah	II – 41
2.6	Isu Strategis	II – 47
BAB III	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	III – 1
3.1	Visi dan Misi	III – 1
3.2	Tujuan dan Sasaran	III – 2
3.3	Strategi	III – 8
3.4	Arah Kebijakan	III – 8
3.5	Program	III – 11
3.6	Kebutuhan Anggaran	III – 14
BAB IV	KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	IV – 1
4.1	Strategi Keuangan	IV – 1
4.2	Arah Kebijakan Keuangan	IV – 1

BAB V	INDIKATOR KINERJA DAN AGENDA	V - 1
	PRIORITAS	
5.1	Indikator Umum	V – 1
5.2	Agenda Prioritas	V – 1
BAB VI	PENUTUP	VI – 1
6.1	Pedoman Transisi.....	VI – 1
6.2	Kaidah Pelaksanaan.....	VI – 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM), Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008.

Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Bandung diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari RPJP Daerah Kota Bandung.

RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Bandung yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 berpedoman pada RPJP Daerah Kota Bandung 2005 – 2025 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, factor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.2.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bandung adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renstra SKPD periode 2009 – 2013;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan periode 2009 – 2013;
3. Sebagai pedoman bagi Pemeritah Kota Bandung dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) periode 2009 – 2013;
4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

1.3 LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pmeeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang_undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

23. Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 *jo.* Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

1.4 HUBUNGAN RPJM KOTA BANDUNG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMD Kota Bandung merupakan sub sistem dari RPJM Nasional yang memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini RPJMD Propinsi Jawa Barat telah mengacu pada RPJM Nasional, sehingga kaitan yang lebih spesifik adalah antara RPJMD Kota Bandung terhadap RPJMD Propinsi Jawa Barat. Adapun pokok yang berkaitan antara RPJMD Propinsi dan Kota Bandung terutama terletak pada misi berikut ini;

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;
- c. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja disektor formal.

2. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa enterprener untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Jawa Barat dengan berbasis standar tenaga kerja ASEAN;
- b. Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya;
- c. Meningkatnya kesejahteraan buruh dan KUMKM;
- d. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumberdaya air di kawasan industri.

3. Peningkatan Kinerja Aparatur, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan public dan penerapan insetif berbasis kinerja.

Sasaran :

- a. Meningkatnya fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparaturnya Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatnya tingkat KKN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih;
- d. Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

4. Penanganan Pengelolaan Bencana, yang difokuskan pada upaya resiko bencana.

Sasaran :

- a. Berkurangnya resiko kejadian bencana;
- b. Tertanggapnya bencana/wabah secara cepat dan akurat;
- c. Meningkatnya kesiapan dini dan mitigasi bencana;
- d. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

5. pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, yang difokuskan pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung.

Sasaran :

- a. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan kesehatan;
- b. Meningkatnya pengendalian pencemaran air;

Dalam 5 misi tersebut, setidaknya ada 4 misi mayor yang selaras dengan Misi Kota Bandung, yaitu misi 1,2,3 dan 5. sedangkan misi – 4 dalam RPJMD ini masuk dalam kategori misi minor.

Secara khusus selanjutnya di sebutkan bahwa Kota Bandung atau Kawasan Kota Bandung adalah menjadi salah satu focus penting. Penetapan ini diantaranya di dasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat. Adapun fokus Kota Bandung pada RPJMD Propinsi Jawa Barat antara lain :

1. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Pengendalian pencemaran air, udara dan sampah;
4. Pembangunan infrastruktur transportasi;
5. Peningkatan mutu air baku;
6. Penyediaan energi alternatif;
7. pengembangan jasa dan perdagangan.

RPJMD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 juga mengacu pada kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan (RTRW).

1.5 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN;

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS;

Menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan, social kependudukan, perekonomian daerah, kinerja pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah, serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang sedang berkembang.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH;

Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta kebutuhan anggaran.

BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB V INDIKATOR KINERJA DAN AGENDA PRIORITAS;

Memuat dan menjelaskan indikator kinerja daerah beserta tahapan pencapaiannya, serta Agenda Prioritas.

BAB VI PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

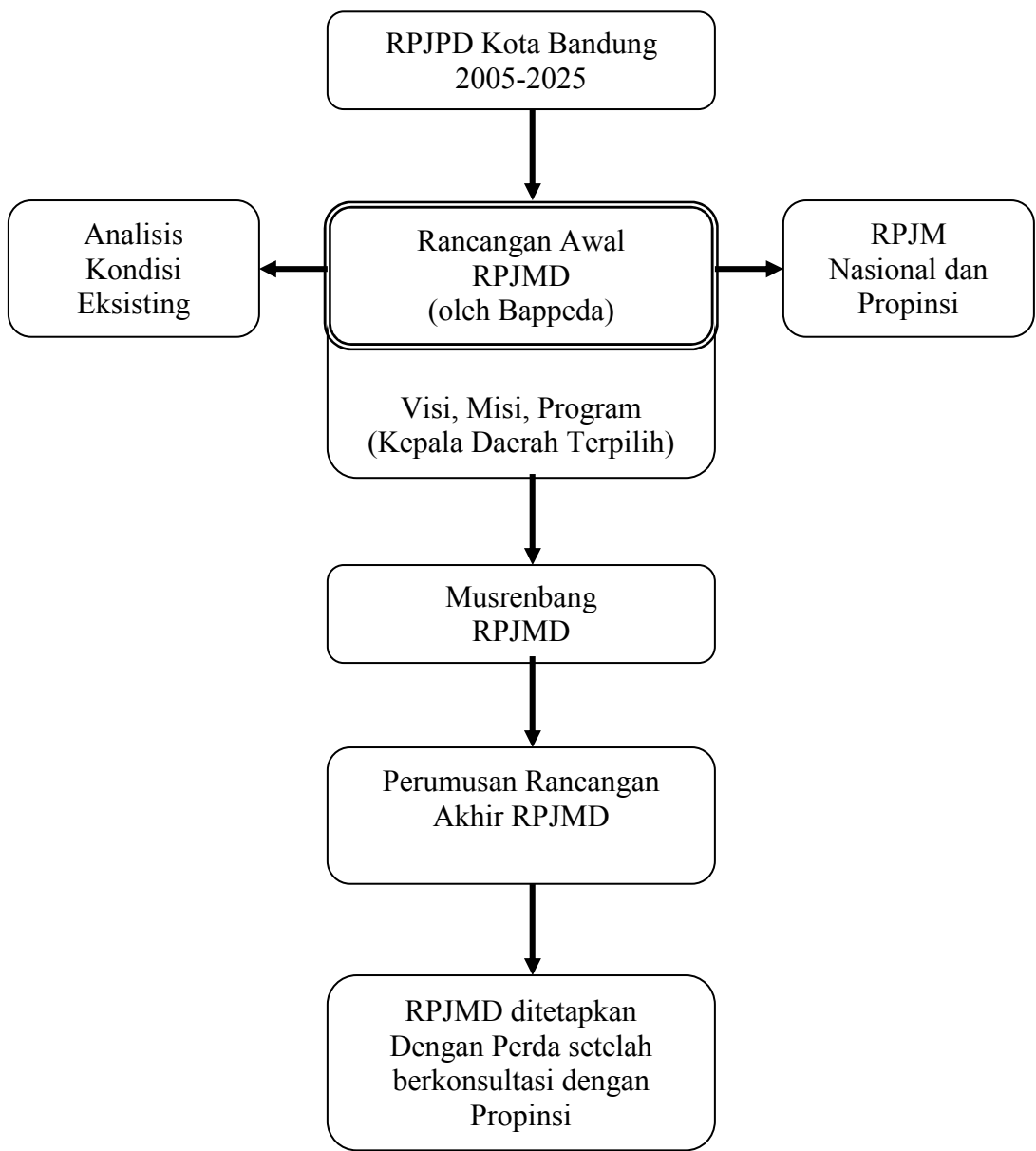
1.6 PROSES PENYUSUNAN

Dokumen RPJMD pada dasarnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunanyang ditawarkan Kepala Daserah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

- 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- 4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan stakeholders kunci. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH DAN ISU STRATEGIS

2.1 KONDISI FISIK LINGKUNGAN

Kota Bandung mempunyai Luas Wilayah 16.729,65 Ha, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di Wilayah Kota Bandung bagian Selatan permukaan tanah relative datar, sedangkan di wilayah kota membentuk Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

2.1.1 IKLIM DAN KUALITAS UDARA

Kota Bandung terletak di pada posisi 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata \pm 791 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan Barat tersebut jenis tanah andosol.

Iklim asli kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya, namun pada dasarnya beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan suhu, hal ini disebabkan polusi dan meningkatnya suhu global. Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk, dengan temperature udara rata-rata 23°C (1995-2008). Temperatur ini dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut, lingkungan pegunungan atau cekungan dan berbagai danau besar yang terletak disekitarnya, serta perubahan iklim global, secara terinci (table 2.1). temperatur rata-rata di Kota Bandung pada Tahun 2008 terdapat temperatur maksimum yang mencapai 30.7°C pada bulan September 2008. hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya terdapat kenaikan temperatur di Kota

Bandung. Sementaraitu bila dianalisis dalam kurun waktu yang lebih panjang, yaitu temperatur udara rata-rata maksimum dalam 20 tahun terakhir, temperatur di Kota Bandung naik sekitar 2⁰C, dan kenaikan tersebut dinilai signifikan dalam dunia meteorologi. Semakin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta meningkatnya pencemaran udara berkontribusi dalam meningkatnya pencemaran udara berkontribusi dalam meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung.

Tabel 2.1
Temperatur Rata-rata di Kota Bandung
Tahun 1995-2008

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
1995	23,2	28,7	19,3
1996	23,1	28,7	19,2
1997	23,2	29,3	19,6
1998	23,5	28,9	18,7
1999	22,9	28,4	19,0
2000	23,1	28,6	19,2
2001	23,1	28,3	19,6
2002	23,6	29,3	19,4
2003	23,6	29,2	18,8
2004	23,5	29,3	19,0
2005	23,4	28,7	19,8
2006	23,5	28,7	19,8
2007	23,5	28,7	19,4
2008	23,1	29,6	19,4

Pelaksanaan program Langit Biru di Kota Bandung yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara sudah berjalan sekitar 10 tahun, namun hasil pengukuran kualitas udara ambient (SO², CO, NO_x, O³, HC, Pb dan debu) di beberapa tempat menunjukkan masih terdapat parameter yang mendekati dan bahkan melebihi Baku Mutu (BM). Dari 15 tempat yang dipantau oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Tahun 2004-2008, kualitas udara yang melebihi di atas ambang batas adalah di terminal Cicaheum, Ledeng, Leuwipanjang dan pada beberapa jalan utama seperti Jalan Diponogoro, Leuwipanjang dan pada beberapa jalan utama seperti Jalan Dioponogoro, Soekarno Hatta, Wastukencana, Achmad Yani, Buahbatu dan Jalan Siliwangi, terutama dilihat dari kadar HC, debu, dan Pb. Khusus untuk HC di semua lokasi melebihi baku mutu, hal ini nampaknya terkait dengan pertumbuhan kendaraan yang pesat.

Jumlah pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian Jalan International (JICA) tahun 1997, mencapai 12% pertahun. Berdasarkan

Data Dinas Perhubungan pada tahun 2007 pada tahun 2001 total kendaraan bermotor 501.885 unit, tahun 2007 meningkat menjadi 839.278 unit, peningkatan terbesar terjadi pada sepeda motor dari 283.936 unit pada tahun 2001 menjadi 594.362 unit pada tahun 2007. Meningkatnya pencemaran udara di Kota Bandung, khususnya dari Jakarta. Menunjukkan bahwa keberadaan tol Cipularang telah berimplikasi terhadap kualitas udara. Di titik masuk kota Bandung seperti gerbang tol Pasteur dan jembatan Cikapayang, kandungan CO rata-rata pada hari jumat dan sabtu meningkat sekitar 38% (di hari normal sekitar 1800 menjadi 2.500 kg/hari pada jumat dan sabtu), sedangkan NO_x meningkat 59% dan HC meningkat 50%. Meningkatnya pencemaran udara di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh tidak terawatnya jalan kendaraan. Data BPLH Kota Bandung, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor Tahun 2002-2007, lebih dari 60% kendaraan berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu emisi, sementara untuk yang berbahan bakar bensin berfluktuasi dari sekitar 10% hingga 52%, sementara Dinas Perhubungan Kota Bandung mengemukakan bahwa angkutan kota adalah penyumbang posisi udara yang paling besar.

**Secara alamiah Kota Bandung memiliki Geografi
yang Nyaman, namun pencemaran udara
sudah dimulai mengganggu kenyamanan dan kesehatan**

2.1.2 STRUKTUR DAN RENCANA RUANG KOTA BANDUNG

Di dalam RTRW (PP 28/2008 dan RPM RTRW Pulau Jawa-Bali). Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bandung Sekitarnya sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Arah kebijakan pemanfaatan ruang: Pengendalian urban sprawl/konurbasi di koridor Bandung-Cimahi dan Bandung-Soreang, Pengurangan beban kota dengan penyebaran pusat kegiatan dan Konservasi di daerah resapan air. Arah pengembangan jaringan transportasi: sebagai jalan penghubung Cicalengka-Soreang-Padalarang dan sistem transportasi misal intra-urban.

Di dalam RTRW Propinsi Jawa Barat (Perda No 2/2003) Kota Bandung masuk ke dalam PKN Metropolitan Bandung dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan SDM, jasa, agribisnis, pariwisata, industri. Arah kebijakan pemanfaatan ruang berupa Kawasan Hutan Lindung Bandung Utara, Pengendalian pusat kegiatan di Metropolitan Bandung dan Arah Pengembangan jaringan transportasi berupa Pengembangan Terminal Terpadu Gedebage (Terminal Tipe A). Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Hussein Sastranegara.

Pengembangan angkutan massal di Metropolitan Bandung (jalur KA Cekunagn Bandung) dan pembangunan jalan tol Cisumdawu. Secara umum konsep, kebijakan, arahan dan kebijakan ruang di Kota Bandung dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2 Bebijakan Ruang Kota Bandung.

Konsep fungsi kota	fungsi Kota Bandung: pemerintah dan perkantoran, jasa perdagangan, industri, jasa, pendidikan, wisata, litbang, jasa kesehatan dan perumahan
Kebijakan struktur tata ruang	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan 2 pusat primer untuk wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur.• Membagi wilayah Kota menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP)• Mengembangkan pusat sekunder, pusat sub-WP dan pusat-pusat lingkungan secara merata dengan pembagian jenjang pelayanan di setiap Wilayah Pembangunan• Menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebagian fungsi kegiatan primer dan sekunder
Arahan Pengembangan Pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">• Bandung Utara (wilayah antara 750 dpl s.d batas utara kota): kebijakan membatasi pembangunan• Bandung Barat (Wilayah Pembangunan Tegallega, Karees, Cibeunying, Bojonegara): kebijakan memprioritaskan pengembangan• Bandung Timur (Wilayah Pembangunan Gedebage dan Ujung Berung): kebijakan mengarahkan dan pemprioritaskan pengembangan
Kebijakan pendukung Struktur tata ruang	<ul style="list-style-type: none">• Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana (jaringan) transportasi yang ada untuk mendukung perkembangan pusat primer dan sekunder• Mengembangkan jalan alternative dengan memprioritaskan jalan tembus yang sudah direncanakan• Meningkatkan akses melalui pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota, pembangunan jalan lingkaran utara dan/atau akses utara selatan di Bandung Timur

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Kota Bandung adalah bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan Kota Bandung dalam jangka panjang. Rencana Tata Ruang ini harus menjadi dasar penting dalam pembangunan jangka menengah. Menurut rencana tersebut Kota Bandung akan disusun atas struktur primer, sekunder dan lingkungan. Pusat Primer adalah di Alun-Alun dan Gedebage. Sampai sekarang Gedebage relatif belum berkembang sesuai rencana. Rencana struktur sistem pusat pelayanan Kota Bandung sampai tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.3 Rencana Struktur Sistem Pusat Pelayanan
Kota Bandung Tahun 2013

STRUKTUR	FUNGSI	BENTUK		LOKASI
PRIMER				
Alun-Alun	<ul style="list-style-type: none">• Komersial• Perdagangan• Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Perkantoran• Historical Building, Pelestarian Kawasan• Rekreasi		Alun-Alun dan Sekitarnya
Gedebage	<ul style="list-style-type: none">• Terminal• Sosial• Jasa/Pergudangan	<ul style="list-style-type: none">• Orang dan Barang• Stadion	<ul style="list-style-type: none">• Pasar• Perkantoran	Gedebage dan Sekitarnya
SEKUNDER				
Bojonegara	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman• Industri Teknologi Tinggi• Perdagangan• Lindung	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Sempadan Sungai, Mata Air• Taman	Setrasari
Tegallega	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman• Perdagangan• Perkantoran• Industri Non Polutan	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Sempadan Sungai, Mata Air• Taman	Kopo Kencana
Karees	<ul style="list-style-type: none">• Pedagangan• Industri• Permukiman• Perkantoran	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Sempadan Sungai, Mata Air• Taman	Turangga
Cibeunying	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintahan• Pendidikan Tinggi• Perdagangan• Lindung	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Historical Building, Preservasi Kawasan• Sempadan Sungai, Mata Air	Sadang Serang
Gedebage	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman• Industri• Lindung	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Sempadan Sungai, Mata Air• Taman	Margasari
Ujung Berung	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman• Industri• Lindung	<ul style="list-style-type: none">• Retail• Grosir• Pasar	<ul style="list-style-type: none">• Sempadan Sungai, Mata Air• Taman	Arcamanik
LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan• Perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Retail		

Sumber : RTRW Kota Bandung (2004-2013)

Mengingat kondisi kritis lingkungan Kota Bandung, maka ditetapkan berbagai kawasan lindung. Wilayah-wilayahini patut mendapat perhatian untuk memulihkan daya dukung wilayah, sehingga Kota Bandung dapat berkembang dan berkelanjutan. Di antara rencana kawasan lindung di Kota Bandung antara lain :

Tabel 2.4 Rencana Klasifikasi Kawasan Lindung

Klasifikasi	Rincian	LOKASI
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Lindung Yang Terletak Bagian Utara Kota Bandung• Kawasan Resapan Air Terbesar di Beberapa Kecamatan	Bagian Utara Kota Bandung
Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Yang Mempreservasi Bangunan Fisik Serta Mengkonversikan Lingkungan Alami Yang Memiliki Nilai Historis Dan Budaya Kota Bandung	Kawasan Alun-Alun Asia Afrika, Cikapundung, Braga, Kelenteng, Pasar Baru, Oto Iskandardinata, ABC, Pecinan, Sumatera, Jawa, Aceh, Bali, Gudang Utara, Lengkong, Sasakgantung, Karapitan, Dewi Sartika, Melong, Dipatiukur, Ir.H. Juanda, Ganesha, Pager Gunung, Tamansari, Diponegoro, RE Martadinata, Cipaganti, Pasteur, Setiabudi, Gatot Subroto, Malabar, Arjuna, Jatayu Dan Kebon Jati
Kawasan Pelestarian Alam	Taman Wisata Alam Dan Kawasan Perlindungan Alam Plasma Nutfah Eks Situ	Kec. Cidadap, Cibeunying
Kawasan Prlindungan Setempat (Ruang Terbuka Hijau)	<ul style="list-style-type: none">• Jalur Sempadan Sungai• Kawasan Sekitar Danau/Bendungan/Waduk• Kawasan Sekitar Mata Air Atau Eks Situ• Jalur Sempadan Jalan Kereta Api• Kawasan Sekitar Tegangan Tinggi• Sempadan Jalan Tol• Taman Kota Dan Pemakaman Umum	Tersebar
Kawasan Rawan Bencana	Kawasan Yang Diidentifikasi Sering Dan Berpotensi Tinggi Mengalami Bencana Alam Seperti Gempa Bumi Dan Tanah Longsor Serta Banjir	Bagian Utara Kota Bandung

Sumber : RTRW Kota Bandung (2004-2013)

Selanjutnya untuk mengatasi lalu lintas Kota Bandung akan dikembangkan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder. Di antara rencana jaringan jalan menurut RTRW Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rencana Jaringan Jalan

Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder
Jl. Dr. Junjunan Jl. Pasteur Jl. Surapati Jl. Penghulu K.H. Hasan Mustofa Jl. Abdul Hamis Nasution (dahulu Jl. Raya Sindanglaya dan Cibiru) Jl. Rajawali Barat Jl. Elang Jl. Raya Cibeureum Jl. Soekarno Hatta	Jl. Jend. Sudirman Jl. Asia Afrika Jl. Akhmad Yani Jl. Rajawali Timur Jl. Kebonjati Jl. Suniaraja Jl. Lembong Jl. Veteran Jl. Jamika Jl. Peta Jl. BKR Jl. Laswi Jl. Sukabumi	Jl. Pak Gatot Raya Jl. Sersan Bajuri Jl. Dr. Suria Sumantri Jl. Dr. Setiabudhi Jl. Sukawangi Jl. Sukajadi Jl. Hos. Cokroaminoto (Dahulu Jl. Kopo) Jl. Abdurrahman Saleh Jl. Garuda Jl. Pajajaran Jl. Supratman Jl. Diponegoro Jl. Merdeka Jl. Ir.H. Juanda Jl. RE. Martadinata Jl. Pasirkoja Jl. Terusan Pasirkoja Jl. Moch. Toha Jl. Ibrahim adji (Dahulu Jl. Kiaracondong Dan Terusan Kiaracondong) Jl. Terusan Buah Batu Jl. Rumah Sakit Jl. Gedebage (Rencana Akses Tol) Rencana Jl. Tembus Bihbul Jl. Ciwastra	Rencana Jl. Tembus Dari Jl. Setiabudhi Jl. Sukahaji Jl. Ir. Sutami Jl. Dr. Setiabudhi (Dari Jl. Sekarwangi) Jl. Raa Wiranatakusumah (Dahulu Jl. Cipaganti) Jl. Wastukencana Jl. Siliwangi Jl. Ciumbeuleuit Jl. Cihampelas Jl. Otto Iskandardinata Jl. Tamblong Jl. Lengkong Besar Jl. Ibu Inggit Garnasih (Dahulu Jl. Ciateul) Jl. Astanaanyar Jl. Moch. Ramdan Jl. Jakarta Jl. Terusan Jakarta Jl. Arcamanik Indah Jl. Pacuan Kuda Jl. Gatot Subroto Jl. Buah Batu Jl. Gurame Jl. Karapitan Jl. Sunda Jl. Sumbawa Jl. Sulawesi Jl. Seram Jl. Gedebage Selatan Jl. Leuwipanjang Jl. Cibaduyut raya

Sumber : RTRW Kota Bandung (2004-2013)

Tabel 2.6 Jumlah Luas Lahan Tambahan Kebutuhan Fasilitas
Wilayah Pengembangan Tahun 2013

Jenis Fasilitas		Standar Luas (M ²)	Jumlah Prasarana Yang Dibutuhkan (Unit)							Tambahan Kebutuhan Lahan Untuk Prasarana (M ²)						
			Bojonegara	Cibeunying	Tegallega	Karees	Ujung Berung	Gede Bage	Kota Bandung	Bojonegara	Cibeunying	Tegallega	Karees	Ujung Berung	Gede Bage	Kota Bandung
Pendidikan	TK	170	106	109	98	106	143	81	643	18020	18530	16660	18020	24310	13770	109310
	SD	1.100	67	69	61	67	89	50	403	73700	75900	67100	73700	97900	55000	44330
	SLTP	3.000	23	23	20	23	30	17	136	69000	69000	60000	69000	90000	51000	408000
	SLTA	3.000	23	23	20	23	30	17	136	69000	69000	60000	69000	90000	51000	408000
	Akademik		1	1	1	1	1	1	6							
Kesehatan	Rumah Sakit C	10.000	0	1	1	0	0	0	2	0	10000	10000	0	0	0	20000
	Rumah Sakit	3.000	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3000	0	3000
	Poliklinik	200	11	11	10	11	14	7	64	2200	2200	2000	2200	2800	1400	12800
	Puskesmas	500	3	3	3	3	4	2	18	1500	1500	1500	1500	2000	1000	9000
	Posyandu	200	43	44	39	43	57	32	258	8600	8800	7800	8600	11400	6400	51600
	Apotik	400	11	11	10	11	14	7	64	4400	4400	4000	4400	5600	2800	25600
Peribadatan	Langgar/Mushola	300	43	44	39	43	57	32	258	12900	13200	11700	12900	17100	9600	77400
	Mesjid Lingkungan	1.000	3	3	3	3	4	2	18	3000	3000	3000	3000	4000	2000	18000
	Mesjid Raya	2.000	1	1	1	1	1	1	6	2000	2000	2000	2000	2000	2000	12000
	Mesjid Raya	12.000	0	1	1	0	0	0	2	0	12000	12000	0	0	0	24000
	Gereja	1.000	3	3	3	3	4	2	18	3000	3000	3000	3000	4000	2000	18000
	Vihara	1.000	3	3	3	3	4	2	18	3000	3000	3000	3000	4000	2000	18000
	Pura	1.000	3	3	3	3	4	2	18	3000	3000	3000	3000	4000	2000	18000

Sumber : RTRW Kota Bandung (2004-2013)

Tabel 2.7 Jumlah Luas Lahan Tambahan Kebutuhan Fasilitas
Wilayah Pengembangan Tahun 2013 (Lanjutan)

Jenis Fasilitas		Standar Luas (M ²)	Jumlah Prasarana Yang Dibutuhkan (Unit)							Tambahan Kebutuhan Lahan Untuk Prasarana (M ²)						
			Bojonegara	Cibeunying	Tegallega	Karees	Ujung Berung	Gede Bage	Kota Bandung	Bojonegara	Cibeunying	Tegallega	Karees	Ujung Berung	Gede Bage	Kota Bandung
Perekonomian	Pusat Perbelanjaan	36.000	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	36000	0	36000
	Pusat Perbelanjaan	10.000	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	10000	10000	20000
	Pasar	10.000	1	1	1	1	1	1	6	1000	10000	10000	10000	10000	10000	60000
	Toko	100	106	110	98	106	143	80	643	10600	11000	9800	10600	14300	8000	64300
	Bank		1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Rekreasi/ Taman/ Olahraga Transportasi	Gedung Bioskop	3.000	1	1	1	1	1	1	6	3000	3000	3000	3000	3000	3000	18000
	Taman	250	427	439	391	426	572	321	2576	106750	109750	97750	106500	143000	80250	644000
	Taman	1.250	43	44	39	43	57	32	258	53750	55000	48750	53750	71250	40000	322500
	Taman	9.000	3	3	3	3	4	2	18	27000	27000	27000	27000	36000	18000	162000
	Taman	24.000	1	1	1	1	1	1	6	24000	24000	24000	24000	24000	24000	144000
	Gedung Olahraga	750	3	3	3	3	4	2	18	2250	2250	2250	2250	3000	1500	13500
Transportasi	Gedung Pertunjukan		3	3	3	3	4	2	18	0	0	0	0	0	0	0
	Terminal Transit	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : RTRW Kota Bandung (2004-2013)

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Bandung Timur sebagaimana arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung terus di pacu, baik yang direncanakan oleh Pemerintah Kota maupun oleh pihak swasta. Pelaksanaan pembangunan Stadion Utama yang didukung dengan kegiatan pendukungnya terus dilaksanakan. (Pembangunan Jalan Akses, Pembebasan Lahan, Perencanaan DED (Detail Engineering Desain) dan Amdal Stadion Utama terus dilaksanakan), selain itu pemerintah terus melakukan pematangan rencana pembangunan PLTSa, Terminal Terpadu dan Retension Pond di kawasan pusat primer Gede Bage, hal ini yang terus di usahakan dalam rangka pengembangan kawasan Bandung Timur adalah mengurus perjanjian pembukaan akses tol Gede Bage.

Untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan Persetujuan Prinsip untuk pembangunan kawasan komersial di kawasan Pusat Primer tersebut, hal ini tentunya akan mempercepat pelaksanaan pembangunan Kawasan Bandung Timur dan sekitarnya.

Upaya menyeimbangkan aktivitas dalam ruang wilayah Kota Bandung, dilakukan dengan mendorong Pengembangan Gedebage di bagian Timur Kota Bandung. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan akan Dicapai daya dukung lingkungan yang lebih baik dan berkesinambungan

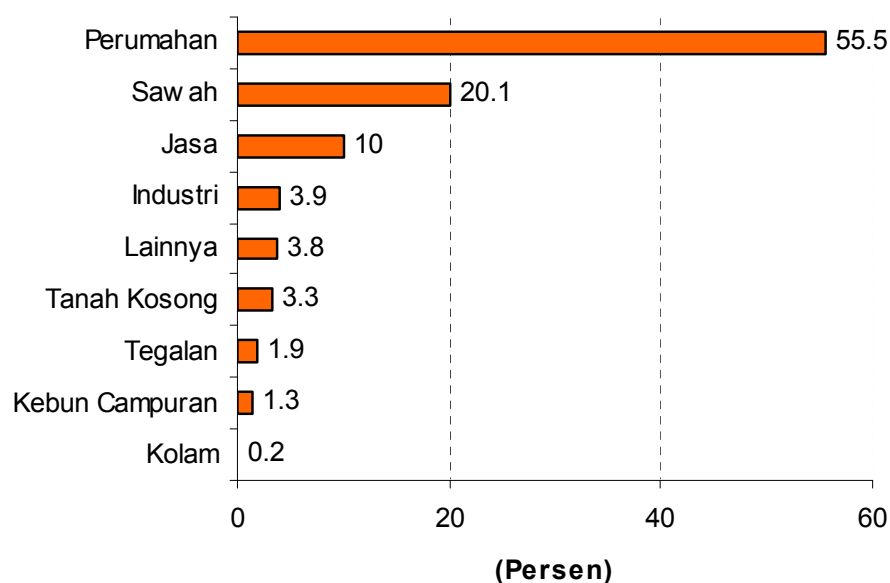
2.1.3 PENGGUNAAN LAHAN

Sebagai salah satu kota yang penting dan berpenduduk relaif padat, maka sebagian besar lahan di Kota Bandung (55,5%) digunakan sebagai lahan perumahan. Penggunaan untuk kegiatan-kegiatan jasa sekitar 10% dan masih ada lahan sawah sekitar 20,1% pada tahun 2008.

Tabel 2.8 Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2008

No.	Guna Lahan	Luas Area (Ha)
1	Perumahan	9.290,28
2	Jasa	1.668,54
3	Industri	647,83
4	Sawah	3.054,49
5	Tegalan	318,70
6	Kebun Campuran	215,57
7	Tanah Kosong	545,47
8	Kolam	39,90
9	lainnya	649,22
Jumlah		16.730,00

Sumber : Badan Pertanahan Kota Bandung, 2008



Grafik 2.1 Struktur Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2008

Kota Bandung dalam lingkup Bandung Raya adalah salah satu pusat berbagai jenis aktivitas penting di Jawa Barat maupun Indonesia dan sekitar 73,5% wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul diantaranya: penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya.

Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga bagi Bandung Raya, yaitu meliputi Wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di Bandung Raya.

Upaya menyeimbangkan aktivitas dalam ruang wilayah Kota Bandung, dilakukan dengan mendorong Pengembangan Gedebage di bagian Timur Kota Bandung. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan akan dicapai daya dukung lingkungan yang lebih baik dan berkesinambungan

Daya dukung dan daya tampung Kota yang sudah mengalami penurunan drastis. Tekanan jumlah penduduk dan ketidak seimbangan sebaran penduduk. Terjadi alih fungsi lahan untuk permukiman dan perdagangan secara cepat. Kebutuhan ruang Terbuka Hijau 30% sebagai batas minimum belum terpenuhi, sehingga dari 10.875 ha lahan budidaya tersisa, sekitar 5.019 ha harus diarahkan untuk RTH. Polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor semakin tinggi. Terjadi penurunan muka air tanah, sehingga pada masa 10-20 tahun mendatang Kota Bandung menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitasnya. Saat ini Kota Bandung masuk dalam kategori titik kritis tinggi

2.1.4 SARANA DAN PRASARANA
1. Infrastruktur Perhubungan

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Bandung. Selain itu ada sarana perhubungan rel kereta api dan perhubungan udara komersial di Bandara Husein Sastranegara. Sebagai sarana utama, jalan raya di Kota Bandung. Panjang Jalan di Kota Bandung pada akhir tahun 2008 adalah sekitar 1.236,48 km (Jalan Nasional 33,56 km, Jalan Propinsi 17,54 km, Jalan Kota 1185,38 km), yang terdiri dari jaringan jalan primer (lalu lintas regional dan antarkota), jaringan jalan sekunder (lalu lintas perkotaan). Kondisi jalan secara umum adalah baik namun beberapa masih belum mantap atau kondisi sedang dan bahkan rusak. Masalah jalan di Kota Bandung saat ini dan kemungkinan besar akan berlanjut dalam jangka panjang adalah tingkat pelayanan rendah, atau ketidak sinambungan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan, karena umumnya jalan-jalan di Kota Bandung relative sempit. Jalan di Kota Bandung terhubung dengan system jalan Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan tersambung pada system jalan tol yang mempermudah akses pusat ekonomi nasional (Jakarta) menuju Bandung.

Sarana jalan kereta api menghubungkan Bandung dalam system perhubungan Pulau Jawa serta perhubungan Bandung dan sekitarnya. Jalan rel juga memiliki peran dalam pergerakan manusia dan barang di Kota Bandung.

Bandar Udara Husein Sastranegara melayani penerbangan domestic dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relative terbatas dalam menampung pesawat ukuran besar.

Secara umum kondisi perhubungan Kota Bandung saat ini menghadapi masalah serius dan semakin menjadi besar di masa datang bila tidak dilakukan terobosan penting. Terlebih lagi dengan perkembangan lokasi-lokasi usaha yang tidak teratur dan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Sangat dibutuhkan system angkutan umum masal.

2. Sarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Sampah)

Sebagian besar wilayah Kota Bandung sarana air kotor masih bercampur dengan saluran drainase pada saluran terbuka. Air limbah diolah oleh satu unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Bojongsoang dengan kapasitas 400.000 jiwa dengan area layanan Bandung Timur dan Bandung Selatan

System drainase yang ada terbangun secara apa adanya dan sebagian besar berupa system drainase jalan. System drainase makro pada umumnya alamiah terdiri dari 46 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Cikapundung (panjangnya 28 km dan yang masuk Kota Bandung 15,5 km) dengan 9 anak sungai, membelah Kota Bandung dari utara ke selatan. Sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase, sehingga beberapa daerah rawan banjir dan genangan. Gangguan fungsi drainase mikro sering terjadi juga akibat gangguan fungsi drainase jalan, misalnya oleh sampah domestic. System drainase di masa depan perlu direncanakan secara komprehensif.

Sampah di Kota Bandung adalah menjadi bagian dari system persampahan regional yang meliputi pula daerah sekitarnya. Tragedi besar terjadi di TPA Leuwigajah Kota Cimahi sangat memperngaruhi masalah persampahan di Kota Bandung dan patut menjadi perhatian besar bagi pengelolaan sampah di masa depan. Volume sampah Kota Bandung mencapai 7.500 m³/hari yang sebagian besar adalah sampah perumahan dan fasilitas umum. Produksi sampah tersebut tidak seimbang dengan kemampuan penanganan sehingga masih banyak sampah yang tidak terangkut.

3. Air Minum (Air Bersih)

Pada umumnya kebutuhan air minum dan air bersih dipenuhi dengan pengeboran rumah tangga dan sebagian dilayani oleh PDAM. Sumber air bersih yang digunakan adalah sungai (air permukaan) dan artesis (air tanah dalam). PDAM menggunakan 10 mata air utama yang terletak di daerah Ledeng. PDAM juga menggunakan 19 sumur bor produksi yang dipompakan ke reservoir. Jumlah pelanggan air bersih di Kota Bandung sebanyak 144.309 sambungan langsung dengan cakupan pelayanan sekitar 53%. Kapasitas produksi PDAM rata-rata sebesar 2.200 liter/detik dengan persentase kehilangan air bersih rata-rata per tahun 47%.

4. Telekomunikasi dan Listrik

Media telekomunikasi dan energi listrik di Kota Bandung dilayani melalui system nasional. Pada sarana energi listrik, khususnya terhubung dengan grid Jawa-Bali. Dalam era komunikasi nir kabel, semua wilayah di Kota Bandung dapat dijangkau oleh sarana telekomunikasi. Dapat dikatakan hamper tidak ada masalah dalam telekomunikasi di Kota Bandung. Pengembangan telekomunikasi Kota Bandung sangat terkait dengan perkembangan eksternal bisnis ini, dan diharapkan di masa depan kualitas layanan semakin baik dengan harga rata-rata yang semakin turun. Salah satu kebutuhan lain yang besar di masa datang adalah penyediaan *backbone* untuk *cybercity* yang harus direncanakan dengan baik dengan melibatkan stakeholder.

Pelayanan energi listrik di Kota Bandung cakupannya sudah sangat luas dengan pola jaringan jalan dan berupa sistem jaringan udara. Untuk Kota Bandung seluruh wilayahnya sudah terlayani dengan alir listrik. Stabilitas dan kuantitas yang ada berkaitan dengan ketersediaan listrik Jawa Bali, di antaranya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling (S.Citarum), Cikalong, Lamajan, Pangalengan (S.Cisangkuy) dan Bengkok (S.Cikapundung). di masa datang jelas sekali akan meningkat layanan energi listrik ini patut mendapat perhatian agar seimbang dengan dorongan pertumbuhan kegiatan masyarakat di Kota Bandung.

5. Sarana Pendidikan

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Bandung selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam pendidikan, karena Kota Bandung memiliki kualitas yang baik dibanding dengan daerah sekitarnya. Sampai dengan tahun 2008, Kota Bandung memiliki 602 TK/RA, 250 SMP/MTs dan 245 SMA/SMK/MA yang terbesar di 30 Kecamatan.

Sebagai Pusat Pendidikan, Kota Bandung memiliki cukup banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah memiliki reputasi cukup baik pada skala internasional maupun regional. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 8 buah yang terdiri dari : 2 Universitas, 1 Institut, 3 Sekolah Tinggi dan 2 Politeknik. Sementara untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebanyak 78 yang terdiri dari : 14 Universitas, 2 Institut, 33 Sekolah Tinggi, 16 akademik, 13 politeknik. (*Sumber Bandung Dalam Angka Tahun 2007*).

Akan tetapi penyebaran Lembaga Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sarana prasarana pendidikan, maupun ketenagaan pendidikan, dimana hal ini akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung, dengan munculnya sekolah favorit dan sekolah yang kurang peminatnya sehingga harus merger.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas di Kota Bandung, diantaranya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, antara lain melalui *Role Sharing* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, akan tetapi kondisi sarana prasarana pendidikan belum memadai.

Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Jenjang pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas				Kebutuhan RKB
		Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	
TK/RA	1.014	-	-	-	-	5
SD/MI	5.730	1.157	241	268	30	597
SMP/MTS	2.531	243	28	29	17	143
SMA/SMK/MA	2.801	224	18	6	2	43

Dari kondisi tersebut, di masa datang patut diperhatikan mengenai sebaran sarana pendidikan dan penataan kawasan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi pergerakan penduduk khususnya siswa/mahasiswa agar lebih efisien dan tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi belajar. Perlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan juga dapat menjadi alternative penting.

Dalam hal ketenagaan pendidikan, Kota Bandung memiliki Guru sebanyak 26.049, terbanyak adalah Guru sekolah dasar dan guru SLTA. Rasio guru per sekolah semakin meningkat bila jenjang pendidikan semakin tinggi, karena kebutuhan bidang ilmu yang semakin spesifik. Rasio guru per sekolah tingkat SLTA adalah sebanyak 33 Orang.

Tingkat pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio siswa per kelas. Pada tingkat taman kanak-kanak, rasio siswa per kelas sebanyak 35 orang, SD sebanyak 40 orang, SLTP sebanyak 47 orang, SLTA sebanyak 37 orang. Pada tingkat SLTP jumlah anak yang bersekolah relative banyak bila dibandingkan dengan daya tampung sehingga rasio per kelas melebihi 40 siswa. Pada tingkat SLTA, rasio ini semakin menurun, karena relative banyak yang tidak melanjutkan studi.

6. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan Kota Bandung sampai dengan tahun 2008 adalah Puskesmas 71 buah, 5 diantaranya adalah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk persalinan, 16 Puskesmas diantaranya memiliki gawat darurat serta 13 Puskesmas Keliling.

Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit 31 buah, Praktek Dokter Umum 1.567 Orang, Praktek Dokter Gigi 583 Orang, Praktek Bidan

811 Orang, Praktek Dokter Spesialis 137 Orang, Balai Pengobatan Swasta 512 buah, Laboratorium Klinik 88 buah, Apotek sebanyak 493 buah dan Rumah Bersalin 51 buah.

Dari 31 Rumah Sakit tersebut, 11 diantaranya milik Pemerintah, yaitu RSHS, Rumah Sakit Dr. HA Rotin Sulu, RSK Jiwa Pusat, RS Mata Cicendo Milik Depkes, RSU Santika Asih Milik Polri, RSU Salamun Milik TNI AU, RSU Sari Ningsih Milik TNI AD, RSUD Ujungberung, RSKAI Astana Anyar dan RSKGM milik Pemerintah Kota Bandung, serta RSKGM milik Depdiknas.

Sedangkan Rumah sakit Swasta berjumlah 20 buah, yaitu RS Rajawali, RS Kebonjati, RS Adven, RS Boromeus, RS Bungsu, RS St Yusuf, RS Muhammadiyah, RS Imanuel, RS Al Islam, RS Santosa, RSK Jiwa Hurip Waluya, RSK Ginjal, RSK Bedah Halmahera, RSIA Hermina, RSIA Melinda, RSIA Teja, RSB Limyati dan RSB Ema Puradireja.

Dengan demikian sarana kesehatan Kota Bandung harus sudah mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan spesifik khas perkotaan.

7. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi di Kota Bandung, khususnya untuk perdagangan dan jasa memiliki jenis beragam dan tumbuh dengan pola alamiah. Karena pertumbuhannya yang alami dan mengikuti kecenderungan pasar, maka beberapa pusat perdagangan skala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat atau justru bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas lagi, sehingga persaingan dapat dikatakan kurang sehat. Toko-toko kecil sudah semakin terdesak oleh jaringan pertokoan besar dan pasar tradisional semakin terfokus pada produk-produk pertanian primer (*perishable goods*). Situasi seperti ini ekonomi makro Kota Bandung dapat memunculkan potensi *crowding out* investasi, artinya investasi satu kegiatan tergeser oleh persaingan padahal belum mencapai titik keuntungan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya-biaya ekonomi di Kota Bandung.

Untuk itu pada perekonomian Kota Bandung diperlakukan aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif.

8. Sarana Peribadatan

Mayoritas penduduk Kota Bandung beragama Islam, sehingga jumlah masjid mencapai 2.177, jumlah Gereja 131, pura 3, dan vihara 22. Perkembangan lokasi peribadatan ini juga terkadang tumbuh dengan kurang direncanakan. Terlebih pada tempat ibadah tertentu yang skalanya nasional maupun regional sering menyedot pengunjung sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas. Berkembangnya fasilitas peribadatan dengan pesat tanpa hirarki dan distribusi yang baik menyebabkan fasilitas peribadatan kurang dimanfaatkan secara optimal.

9. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan). RTH meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, benteng alam, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur di bawah listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan jalur hijau dan taman atap (roof garden).

Kota Bandung yang disebut dengan Kota Bunga, Paris Van Java dahulu dikenal memiliki desain kota yang indah dan memiliki banyak taman atau ruang terbuka hijau. Saat ini Kota Bandung memiliki beban berat untuk mengembalikan kebanggaan tersebut. Pada beberapa tahun terakhir terus digalakkan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam bentuk taman kota. Perkembangan luas RTH Kota Bandung pada tahun 2006 seluas 1.314,20 ha (7,85%) menjadi 1.466,13 ha (8,76%) di tahun 2007. perkembangan luas RTH di Kota Bandung tampak pada tabel berikut,

Tabel 2.10. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2006-2007

JENIS	2006		2007	
	Luas	%	Luas	%
Taman	120.95	0.72	129.45	0.77
Kebun bibit	1.69	0.01	1.69	0.01
Pemukaman	141.06	0.84	145.50	0.87
RTH lahan Kritis	1,050.51	6.28	1,189.50	7.11
Jumlah	1,314.20	7.86	1,466.13	8.76

Sumber : Badan Pertanahan Kota Bandung, 2008

Sesuai dengan RTRW Kota Bandung (Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2006) pada tahun 2013 Kota Bandung diharapkan memiliki luas RTH sebesar 10%, dan sesuai dengan RPJPD Kota Bandung (Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008) luas RTH Kota Bandung pada tahun 2025 mencapai 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Tempat pemakaman Umum di Kota Bandung sebanyak 13, yaitu TPU Muslim, TPU Kristen, Serta TPU Hindu dan Budha yang tersebar yang tersebar di 6 bagian wilayah kota dengan luas total sebesar 124.000 m² . Dengan jumlah populasi yang demikian besar, maka di masa depan pemakaman umum termasuk masalah yang besar.

Berdasarkan definisi ruang terbuka hijau tersebut, relatif masih ada peluang untuk mewujudkan RTH di Kota Bandung. Tidak kurang dari 16, jenis yang menjadi potensi RTH Kota Bandung. Tidak kurang dari 16 jenis, yang menjadi potensi RTH Kota Bandung : Taman Kota, Taman Rekreasi, Taman Lingkungan Perumahan dan Permukiman, Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial, Hutan Kota, Kebun Binatang, Pemakaman Umum, Lapangan Olah Raga, Lapangan Upacara, Parkir Terbuka, Lahan Pertanian Perkotaan, Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET), Sempadan Sungai dan Sempadan Bangunan, Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api dan Pedestrian, Kawasan dan Jalur Hijau, Daerah Penyangga (Buffer Zone), Lapangan Udara Husein Sastranegara dan Taman Atap (Roof Garden).

10. Sarana Seni, Olah Raga dan Pariwisata

Seni yang berkembang di Kota Bandung memiliki variasi besar, yaitu mulai dari seni tradisional sampai moderen. Sarana seni yang menampung kegiatan seni tersebut dapat saling bergantian, diantaranya adalah sejumlah lapangan terbuka yang menjadi pilihan untuk kegiatan seni skala besar misalnya Lapangan Gasibu dan Tegallega. Selain itu juga terdapat sejumlah gedung-gedung seni yang dapat dimanfaatkan, baik milik pemerintah maupun swasta. Galeri –galeri seni pribadi juga banyak terdapat di Kota Bandung. Sarana seni di Kota Bandung di antaranya adalah museum (6 unit), gedungpertunjukan (12 unit), galeri (28 unit), gedung bersejarah (637 unit).

Sarana olahraga di Kota Bandung terdiri dari lapangan indoor dan outdoor, yaitu kolam renang (13 unit), pusat bilyar (49 unit), bowling (4 unit), stadion (6 unit), pusat kebugaran (9 unit) dan lapangan golf serta lapangan umum yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Sarana pariwisata dan rekreasi di Kota Bandung ragamnya sangat besar. Pada dasarnya banyak hal yang dapat dijadikan objek wisata Kota Bandung, baik obyek wisata alam, sejarah, buatan, moderen, basis kreatifitas dan lain sebagainya. Seluruh obyek dan sarana tersebut sebaiknya menjadi paket wisata menarik yang dan menjadi obyek yang utuh, sehingga setiap sisi Bandung dapat menjadi obyek wisata yang menarik. Perkembangan pariwisata Kota Bandung didukung keberadaan hotel (170 unit), restoran (123 unit), rumah makan (440 unit), biro pelayanan wisata (116 unit), agen wisata (12 unit), penyelenggara wisata (4 unit), lembaga pendidikan wisata (16 unit), hiburan lingkungan seni dan budaya (367 unit), galeri (25 unit) dan bioskop (9 unit).

Sebagai salah satu kota terpenting di Indonesia, di Kota Bandung relative tersedia banyak sarana public (lengkap). Permasalahan yang kerap terjadi adalah pada daya dukung sarana transportasi terhadap segala kegiatan di berbagai sarana public tersebut. Sarana perhubungan dapat menjadi ancaman in-efisiensi pergerakan aktivitas penduduk di Kota Bandung pada masa yang akan datang. Ketersediaan ruang terbuka hijau terus diupayakan agar kota menjadi nyaman sekaligus diharapkan dapat memperbaiki ketersediaan air tanah di Kota Bandung.

2.1.5 MITIGASI BENCANA

Kota Bandung sebagai daerah hunian yang memiliki kepadatan, persentase kerapatan bangunan yang cukup tinggi, dan secara alami dilewati oleh patahan gempa (sesar lembang) serta struktur bebatuan dan tanah kota bandung sangat labil terhadap gempa, merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap kejadian bencana, baik bencana alam (Natural disaster) maupun non alam (Man-made disaster). Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga dengan melakukan manajemen bencana.

Manajemen bencana sendiri merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dibagi kedalam tiga kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Manajemen bencana ini bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Selama ini, di dalam praktek penanggulangan bencana masih ditekankan pada **saat** serta **pasca** terjadi bencana. Sementara itu, pada tahap **pra** bencana masih sangat terbatas pada tahap pencegahan. Kegiatan pada tahap **pra** bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Kegiatan pada tahap sebelum terjadinya bencana, dikenal dengan istilah **Mitigasi** atau **penjinakan/peredaman**.

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1, ayat (9), "Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana"

Secara umum, dalam prakteknya mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural antara

lain meliputi perencanaan tata guna lahan disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan (*law enforcement*) pembangunan.

Upaya mitigasi dan tindakan-tindakan antisipasinya adalah syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana yang sering terjadi di Kota Bandung seperti Bencana Alam (Natural disaster), Bencana Non-Alam (Man-made disaster), dan Wilayah Penyakit Menular.

Dengan upaya mitigasi terhadap bencana-bencana tersebut dapat mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Data dan Informasi kejadian bencana di Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. *Bencana Alam*

- a. Banjir
Volume kejadian sebanyak 3 kali. Jumlah korban sebanyak 637 jiwa.
- b. Angin Putting Beliung
Volume kejadian sebanyak 1 kali. Jumlah korban sebanyak 524 jiwa.
- c. Longsor
Volume kejadian (skala kecil) sebanyak 2 kali, dengan tidak ada korban jiwa.

2. *Bencana Non-Alam*

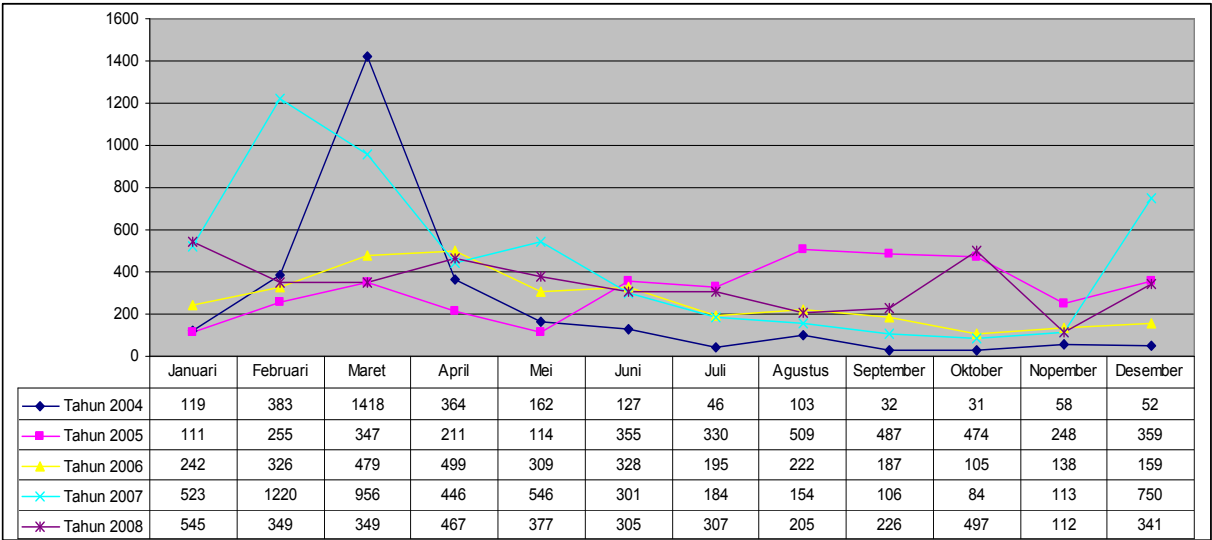
Volume kejadian Kebakaran sebanyak 141 kali. Terjadi penurunan kurang lebih 16,1 % dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 168 kali. Penggunaan air untuk memadamkan api pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 3.259 M3 menjadi 2.078 M3. Penurunan kurang lebih 56,8 %. Tingkat kerugian pada tahun 2008 mengalami penurunan dari Rp. 39.746.599.000 pada tahun 2007 menjadi Rp. 12.235.700.000 pada tahun 2008. Penurunan kurang lebih 69%.

3. *Wabah Penyakit Menular*

- a. Demam Berdarah
Disamping potensi mitigasi bencana alam yang telah dijelaskan diatas, juga kejadian bencana luar biasa lainnya yang bisa ditimbulkan oleh sumber penular lainnya, yang berasal dari hewan bisa juga terjadi akibat kepadatan dan kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik akibat kurang kesadaran dan budaya bersih yang belum melekat pada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai penyakit, seperti demam berdarah dan chikungunya. Adapun data kasus demam berdarah yang telah terjadi di wilayah Kota Bandung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2

GRAFIK KASUS DBD DI KOTA BANDUNG TAHUN 2004 - 2008



Akibat sanitasi yang kurang baik, selain penyakit demam berdarah juga timbul penyakit chikungunya. Data kusus chikungunya yang terjadi di wilayah Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebagai berikut

Tabel 2.11

DATA KASUS CHIKUNGUNYA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2008

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	1.589
2	Februari	65
3	Maret	31
4	April	69
5	Mei	1
6	Juni	241
7	Juli	26
8	Agustus	50
9	September	10
10	Oktober	21
11	Nopember	0
12	Desember	22
	Total	2.125

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Abndung Tahun 2008

b. Penyakit Zoonosis (Flu Burung)

Selain wabah penyakit demam berdarah dan chikungunya, ada juga penyakit yang ditimbulkan melalui hewan, yaitu penyakit hewan zoonosis. Hal ini perlu mendapat perhatian. Mengingat penyakit zoonosis pada hewan dapat menular pada manusia bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga apabila telah terjadi sering dikatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), Penyakit Zoonosis tersebut antara lain adalah penyakit Flu Burung, Anthrax, Rabies dan Sapi Gila (*Mad Cow*).

Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) mulai masuk ke Indonesia termasuk ke Jawa Barat pada tahun 2003, sedangkan di Kota Bandung, virus ini mulai menjangkiti unggas pada tahun 2005. Tipe virus yang ditemukan di Indonesia adalah H₅N₁ yang bersifat ganas. Virus tersebut pada umumnya menyerang unggas namun dapat juga menyerang manusia dan hingga saat ini belum ada obatnya. Apabila terjadi kontak langsung antara manusia dengan unggas yang terjangkit virus flu burung akan mengakibatkan sesak nafas, demam sama dengan gejala flu biasa namun tidak dapat diobati.

Pada tahun 2008, kasus virus flu burung menyerang unggas di 2 Kelurahan, yaitu di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo dengan jumlah kasus yang terinfeksi 1 Kasus, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, jumlah Kasus yang terinfeksi 1 Kasus.

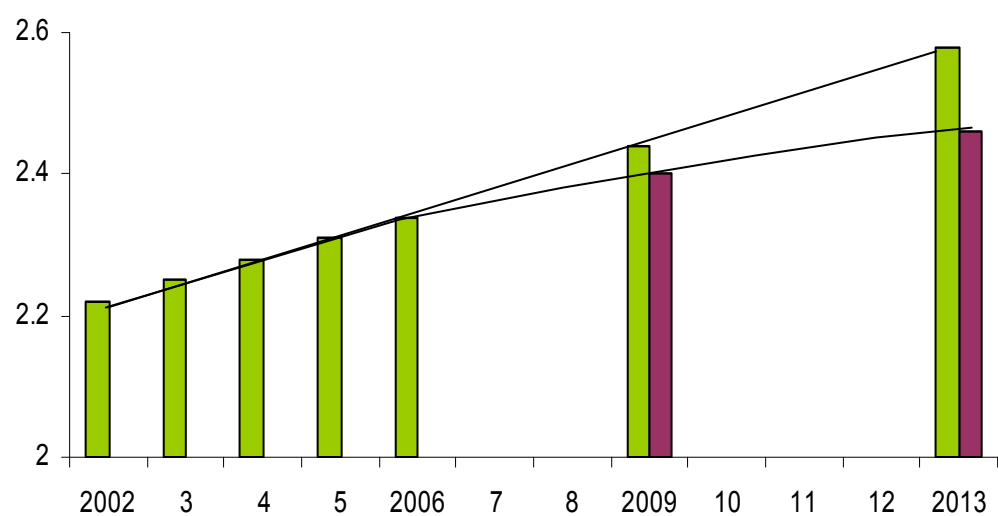
Dengan mengetahui data, informasi, dan karakter dari setiap bencana secara lengkap merupakan langkah awal dari upaya mitigasi sehingga dalam aspek-aspek pembangunan akan memperhatikan kaidah-kaidah kebencanaan.

2.2 SOSIAL KEPENDUDUKAN

2.2.1 PENDUDUK

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebanyak 2.340.624 jiwa. Sebagai pusat kegiatan penting, maka disekitar Kota Bandung berkembang daerah-daerah *hinterland* seperti Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat serta Kota Cimahi yang dihuni oleh penduduk yang berjumlah besar pula. Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi pada tahun 2006 dapat mencapai jumlah penduduk 5 jutaan. Dengan peran sebagai orientasi, maka pergerakan penduduk antara pusat dan *hinterland* menjadi bercampur, sehingga realitas jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Bandung cenderung melebihi jumlah penduduk yang teregistrasi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bandung antara tahun 2002-2007 adalah sebesar 1,43%. Dengan kondisi tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai hampir 2,6 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat menjadi beban berat apabila secara bersamaan daerah sekitarnya juga terus mengalami pertambahan penduduk. Bila biaya hidup dan beraktivitas di Kota Bandung semakin kompetitif dan mahal, pertumbuhan penduduk bisa semakin melambat, hingga mencapai 2,4 juta jiwa. Jumlah ini tetap mengisyaratkan

Kota Bandung sebagai Kota Penting, namun penduduk yang beraktivitas di dalamnya melakukan komuter dan tinggal di daerah sekitar Kota Bandung. Dalam kondisi ini tetap saja beban bayangan jumlah penduduk yang besar, menjadi isu penting Kota Bandung di masa datang. Perkembangan dan kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Bandung Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2007

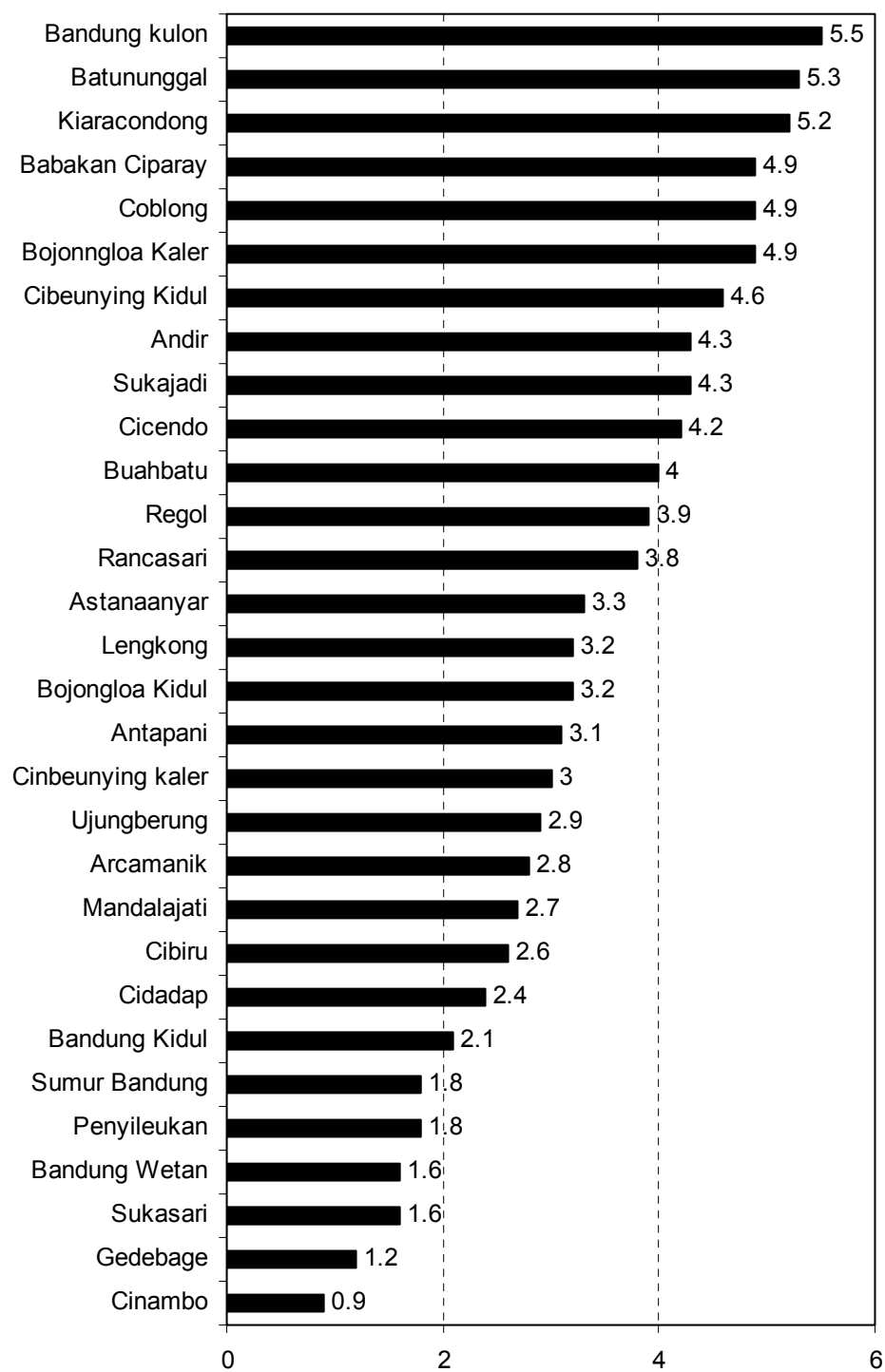
Dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2007 adalah 140 jiwa/ha. Seluruh jumlah penduduk tersebar di kecamatan yang ada.

Distribusi jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bandung Kulon, yaitu mencapai jumlah 120.733 jiwa atau mencapai 5,5% dari seluruh jumlah penduduk Kota Bandung. Kecamatan dengan jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Cinambo, dengan jumlah penduduk sekitar hampir 20.000 jiwa atau sekitar 0,9% jumlah penduduk Kota Bandung. Dari kecamatan yang ada, sekitar 50% penduduk tinggal di 10 Kecamatan saja, yaitu Bandung Kulon, Batununggal, Kiaracondong, Babakan Ciparay, Coblong, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, Andir, Sukajadi dan Cicendo, yang rata-rata proporsi jumlah penduduknya mencapai 4%. Distribusi persentase jumlah penduduk Kota Bandung menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12 Distribusi Penduduk per Kecamatan
di Kota Bandung Tahun 2007 (jiwa)

KECAMATAN	JUMLAH	KECAMATAN	JUMLAH
Andir	93,708	Cicendo	93,465
Antapani	67,529	Cidadap	52,137
Arcamanik	60,990	Cinambo	19,964
Astanaanyar	73,241	Coblong	107,946
Babakan Ciparay	108,725	Gedebage	27,328
Bandung Kidul	45,956	Kiaracondong	115,305
Bandung Kulon	120,733	Lengkong	70,969
Bandung Wetan	34,890	Mandalajati	59,193
Batununggal	117,753	Panyileukan	38,694
Bojongloa Kaler	106,867	Rancasari	82,633
Bojongloa Kidul	70,492	Regol	86,159
Buahbatu	87,722	Sukajadi	95,455
Cibeunying Kaler	65,711	Sukasari	34,518
Cibeunying Kidul	100,927	Sumur Bandung	39,353
Cibiru	57,365	Ujungberung	63,742

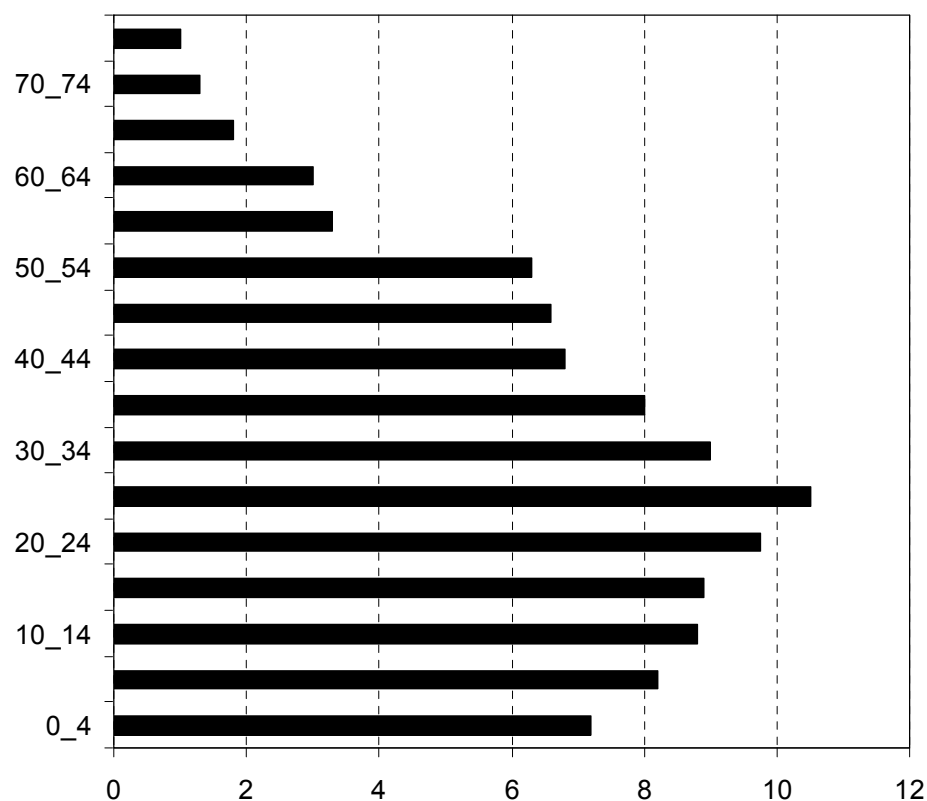
Sumber : RKPD Tahun 2009



Grafik 2.3 Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2007 (%)

Selanjutnya penduduk Kota Bandung dapat dianalisis menurut struktur umurnya. Struktur umur ini adalah informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan. Misalnya proporsi penduduk pada tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi, remaja, usia kerja (produktif), usia lanjut. Besaran komposisi penduduk ini akan menentukan kebutuhan layanan pada setiap kelompok.

Bila dilihat dari struktur usia penduduk Kota Bandung, yang tergolong menonjol adalah usia masa awal usia kerja (25-34 tahun) dan pada usia pendidikan tinggi (20-24 tahun). Pada kedua kelompok ini terlihat pola lonjakan bila dibandingkan dengan usia pendidikan dasar-menengah. Artinya secara normal sebenarnya strukturnya akan semakin menyempit mulai dari usia balita sampai dengan usia lanjut. Lonjakan pada usia tersebut di atas, mengindikasikan bahwa di Kota Bandung terjadi migrasi masuk yang sangat besar, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan studinya di Kota Bandung sekaligus tempat mencari kerja pada penduduk usia-usia awal kerja. Struktur seperti ini patut mendapat perhatian, karena kemungkinan akan selalu berulang. Antisipasi atas peristiwa seperti ini harus selalu dilakukan dalam mengupayakan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung.



Grafik 2.4. Struktur Umur Penduduk di Kota Bandung Tahun 2007 (%)

Penduduk Kota Bandung termasuk didominasi oleh penduduk usia muda, khususnya usia awal memasuki kerja. Masalah penyerapan tenaga kerja menjadi sangat penting dalam jangka pendek dan menengah.

2.2.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia (*human Welfare*). Kesejahteraan pada dasarnya memiliki dimensi yang luas dan beragam. Salah satu indikator kesejahteraan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli. Sebagai indikator utama pada dasarnya IPM adalah berfungsi sebagai indikator impact, yaitu terbentuk karena banyak aspek pembangunan yang dilakukan.

Tabel 2.13. Perkembangan IPM dan Komponennya
di Kota Bandung Tahun 2004-2008

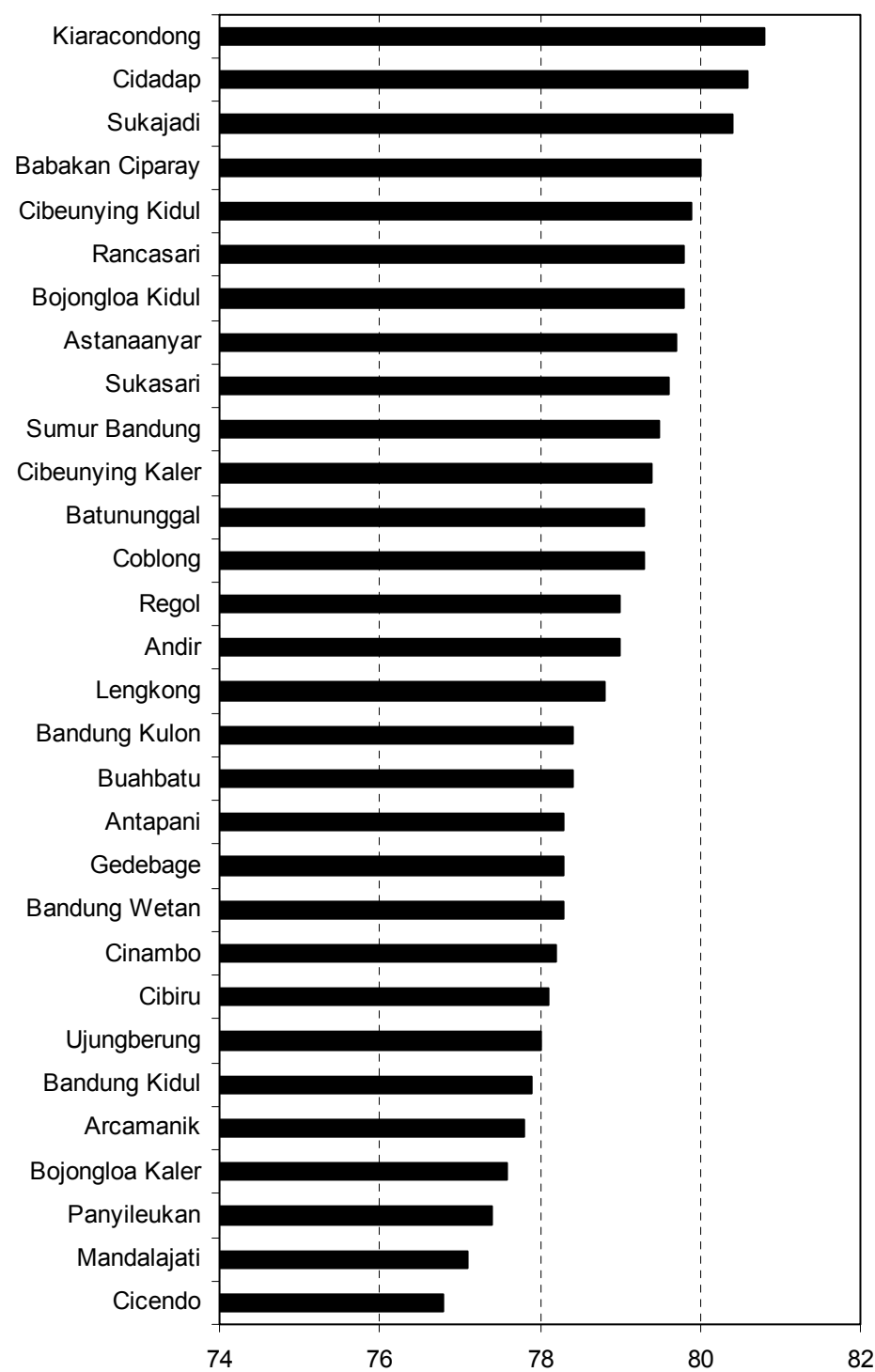
TAHUN	IPM	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN	INDEKS DAYA BELI
2004	77.17	88.94	79.23	63.34
2005	77.46	89.18	79.27	63.93
2006	77.54	89.26	79.38	63.93
2007	78.09	89.60	80.65	64.04
2008*	78.33	89.70	80.97	64.27

Sumber BPS (2008)
*: Angka Sementara

Pada tahun 2004 IPM Kota Bandung mencapai 77,17 dan sampai dengan tahun 2008 relatif tumbuh sangat lambat. Mengikuti pola tersebut, dapat diproyeksikan IPM sampai dengan tahun 2013.

Struktur IPM Kota Bandung bervariasi menurut aspeknya. Indeks Pendidikan adalah indeks tertinggi, sedangkan Indeks Daya Beli adalah indeks terendah. Berdasarkan data yang ada, Indeks Kesehatan adalah indeks yang diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan paling cepat. Bila pada tahun 2008 adalah sekitar 80,97 maka ada kemungkinan dapat mengalami peningkatan hingga 91, atau sedikit lebih rendah daripada Indeks Pendidikan pada Tahun 2013. Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli walaupun mengalami peningkatan, namun peningkatan relatif lambat. Selanjutnya dapat dianalisis tingkat IPM menurut kecamatan. Ada sekitar empat daerah yang

tergolong rendah, yaitu Kecamatan Cicendo, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan dan Kecamatan Bojongloa Kaler.



Grafik 2.5. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2007 (%)

1. Aspek Kesehatan

Aspek Kesehatan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), dimana angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain AKB, AKI, AKABA dan AKK.

Angka harapan hidup Kota Bandung pada tahun 2008 adalah 73,39 tahun dimana capaian ini dipengaruhi oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) atau menurunnya jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal pada tahun 2007 berjumlah 186 kasus termasuk 61 kematian yang terjadi dalam kandungan, menjadi 181 anak kasus pada tahun 2008. Kematian neonatal pada usia awal kehidupan merupakan salah satu indikator belum optimalnya manajemen kelangsungan program pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2008 yang dilaporkan sebanyak 20 kasus. Angka ini belum dapat dikatakan sebagai jumlah seluruh kematian ibu yang terjadi di Kota Bandung, karena kemungkinan masih banyak kasus kematian ibu yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan. Sebagai penyebab langsung kematian ibu yang utama adalah pendarahan (45%) dan lainnya adalah penyebab tidak langsung antara lain keterlambatan merujuk. Kematian ibu maternal dapat dicegah bila cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan penanganannya.

Hal lain yang dapat memperkecil resiko kematian ibu adalah dengan pelayanan berkala meliputi pelayanan K1 dan K4. Cakupan K1 Kota Bandung mencapai 84,71% sedangkan cakupan K4 mencapai 81,80%, sedangkan target standar pelayanan minimal kesehatan adalah 95%. Dengan demikian masih terdapat kesenjangan sebesar 13,02% kesenjangan ini dapat diakibatkan oleh kemampuan dan pemahaman petugas pengelola KIA tentang manajemen kelangsungan program KIA yang belum optimal, Peran swasta yang cukup dominan belum mendukung pelaksanaan program, definisi operasional yang belum sama antara Rumah Sakit dan program kesehatan, petugas pencatatan dan pelaporan yang tidak mengetahui secara rinci diagnosis yang ditegakkan petugas medis, dan dari sisi masyarakat masih banyak ibu hamil yang “pulang kampung” menjelang proses persalinan.

Angka Kematian Balita (AKABA) atau jumlah kematian anak umur 1-4 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2008 adalah sebanyak 69 anak. AKABA menggambarkan masalah kesehatan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Angka Kematian Kasar (AKK) yang terdata dari Rumah Sakit selama tahun 2008 sebanyak 3.586 kasus, dimana angka ini dapat digunakan sebagai petunjuk umum status dan kondisi kesehatan di masyarakat yang secara tidak langsung menggambarkan kondisi lingkungan ekonomi, fisik, biologis. AKK juga dapat menjadi dasar dalam menghitung laju pertambahan penduduk walaupun penilaian yang diberikan secara kasar dan tidak langsung.

Keadaan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Kota Bandung yang dapat dilihat dari prosentase rumah sehat yang memiliki sarana air bersih 74,21%, yang memiliki jamban 60,61%, yang memiliki SPAL 57,8% dan yang memiliki pembuangan sampah 50,66% sedangkan prosentase tempat-tempat umum sehat dilihat dari sarana air bersih tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi luas ruangan dan system pencahayaan yang memadai.

Adapun perilaku sehat masyarakat dilihat dari cakupan rumah tangga yang ber-PHBS sebanyak 273.039 KK (43,25%) dan tingkat perkembangan posyandu. Posyandu Pratama (9,46%), Posyandu Madya (58,46%), Posyandu Purnama (29,02%), dan Posyandu Mandiri (3,05%).

Akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari prosentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas (68,27%) dan rumah sakit (101,09%) prosentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan (28,17%), prosentase RS yang menyelenggarakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar (53,33%) prosentase obat generik berlogo dalam persediaan (116 jenis).

Pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kota Bandung, dapat dilihat dari persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (77,56%), persentase kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) baru 46 kelurahan (30,67%) persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani kurang dari 24 jam (24 kelurahan), persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe (87,19%), persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif (20,66%), persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut (45%), persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja, serta persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan yang baru mencapai 34,42%.

2. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dimana capaian sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator yang dikelompokkan kedalam kelompok pemerataan dan perluasan akses, kelompok peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Angka Melek Huruf di Kota Bandung pada tahun 2008 sebesar 99,50% meningkat 0,06% dari tahun 2007, dengan demikian keberadaan buta aksara masih tersisa sebanyak 849 orang laki-laki dan 1.913 orang perempuan, dan hal ini akan dituntaskan pada tahun 2009 melalui Program Keaksaraan Fungsional kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bandung.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2008 baru mencapai 10,52 tahun, hal ini sangat jauh dari target capaian semula yaitu 12 tahun, sehingga Pemerintah Kota Bandung perlu merevisi kembali target capaian rata-rata lama sekolah sampai dengan tahun 2013.

Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapainya rata-rata lama sekolah 12 tahun sampai tahun 2008. Jika dilihat dari penduduk usia 16 sampai 18 tahun, dimana capaian angka partisipasi murni tahun 2008 baru mencapai 75,91%, antara lain disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan karena tidak relevannya kompetensi atau kecakapan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga masyarakat kurang terdorong untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah, sementara anggapan lainnya adalah pendidikan masih dianggap mahal, sehingga masyarakat menjadi apatis untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Lebih jauh jika dilihat dari penduduk usia 19 sampai 24 tahun yang seharusnya telah mengikuti jenjang pendidikan tinggi, pada tahun 2008 baru mencapai 22,54%, hal ini antara lain disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan tinggi, sehingga lulusan pendidikan menengah lebih memilih bekerja atau pendidikan non formal/kursus/diploma yang dapat membuat mereka cepat bekerja. Pendidikan tinggi dianggap belum menjanjikan karena tidak relevannya kompetensi/kecakapan lulusan dengan kebutuhan kerja, sehingga keluaran pendidikan tinggi pun masih banyak yang menjadi pengangguran. Hal lain yang menjadi penyebab rendahnya APK/APM Perguruan Tinggi adalah adanya sebagian masyarakat yang lebih berorientasi pada Perguruan Tinggi Favourit dan memilih tidak melanjutkan dari pada tidak lulus seleksi, sebagian masyarakat masih memilah-milah studi lanjutan anak tanpa memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan, sehingga sekolah menjadi tidak serius dan akhirnya drop out.

Akan tetapi jika dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan wajib belajar Sembilan tahun, Kota Bandung telah beberapa kali mendapat penghargaan. Dilihat dari angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni telah melebihi target, karena sesuai dengan fungsinya sebagai kota pendidikan, banyak usia pendidikan dasar dari daerah sekitar, bersekolah di Kota Bandung.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2008 pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat adalah 131,65% meningkat 1,60% dari tahun 2007. APK jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat telah mencapai 116,16% Meningkat 12,11% dari tahun 2007, sedangkan APK pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) baru mencapai 98,51% meningkat 6,58% dari tahun 2007.

Sedangkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2008 pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat adalah 123,13% meningkat 1,80% dari tahun 2007. APM jenjang Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat telah mencapai 99,44% meningkat 7,13% dari tahun 2007, sedangkan APK pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) baru mencapai 75,91% meningkat 4,3% dari tahun 2007

3. Aspek Daya Beli

Indeks daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen IPM yang mengalami peningkatan (tabel 2.13). Indeks daya beli yang diperoleh dari

perhitungan konsumsi per kapita penduduk Kota Bandung pada tahun 2007 mencapai Rp. 577.127,- sedangkan tahun 2006 sebesar Rp. 576.890,-. Indeks daya beli tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,001 persen yaitu dari 63,99 pada tahun 2006 menjadi 64,04 pada tahun 2007. Indeks daya beli yang mengalami peningkatan, walaupun relatif rendah juga memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan nilai IPM masyarakat Kota Bandung pada tahun 2007.

Daya beli merupakan yang paling kompleks dalam perhitungan dan penentuannya. Indeks daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen IPM. Indeks daya beli yang diperoleh dari perhitungan konsumsi perkapita penduduk Kota Bandung pada tahun 2008 (BPS angka sangat sementara) mencapai 64,27% point atau setara dengan konsumsi per kapita penduduk sebesar Rp. 578.13,- meningkat dari tahun 2005 : 63,93 point atau setara dengan Rp. 576.62,-. Peningkatan daya beli tersebut masih dibawah standar upah minimum rata tahun 2008 sebesar Rp. 939.000,- sehubungan dengan hal tersebut, maka program-program pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2010 diarahkan pada peningkatan daya beli secara bersinergi antar sektor dan lintas sektor dalam rangka pencapaian IPM sebesar 81,07 pada tahun 2013 dengan indeks daya beli 68,88 sesuai dengan target capaian kinerja tahap-2 yang telah ditetapkan dalam Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2002-2025.

Rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bandung yang dihitung berdasarkan IPM, termasuk kategori tinggi di Jawa Barat. Indeks daya beli atau ekonomi, adalah Indeks yang relatif rendah.

4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai masalah sosial di tingkat mikro. Berbagai masalah sosial berkembang di masyarakat pada tahun 2008 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkoba (363 jiwa), keluarga di rumah tidak layak huni (27.041 keluarga), masyarakat di daerah rawan bencana (4.386 jiwa), korban HIV-Aids (1.268 Jiwa) dan lain sebagainya. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain adalah :

- Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga fakir miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni dan korban HIV-Aids.
- Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan dan masyarakat yang tinggal di daerah bencana.

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah sosial Kota Bandung relatif masih sangat besar. Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung sampai dengan tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.14. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2008

No.	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
1	Balita Terlantar	Orang	360
2	Anak Terlantar	Orang	6.643
3	Anak Korban Tindak Kekerasan	Orang	19
4	Anak Jalanan	Orang	4.821
5	Anak Nakal	Orang	239
6	Anak Cacat	Orang	484
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Orang	5.868
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan	Orang	40
9	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.429
10	Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan	Orang	62
11	Penyandang Cacat	Orang	10.200
12	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis	Orang	1.344
13	Tuna Susila	Orang	116
14	Pengemis	Orang	4.126
15	Gelandangan	Orang	948
16	Eks Narapidana	Orang	298
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	363
18	Keluarga Fakir Miskin	KK	84.288
19	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	KK	27.041
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	2.967
21	Komunitas Adat Terpencil	Orang	
22	Masyarakat Yang Tinggal Didaerah Rawan Bencana	Orang	4.386
23	Korban Bencana Alam	Jiwa	1.161
24	Korban Bencana Sosial	Jiwa	423
25	Pekerjaan Migran	Orang	1.277
26	Korban HIV/AIDS	Orang	1.268
27	Keluarga Rentan	Orang	358
	Jumlah		161.527

Sumber : Dinas Sosial 2008

Adapun perbandingan peningkatan jumlah PMKS yang ada dan jumlah PMKS yang ditangani masih belum berimbang, sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan bidang kesejahteraan secara optimal sehingga dalam penanganannya diperlukan koordinasi yang baik antar unsur-unsur terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

5. Keamanan dan Ketertiban

Pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bagi semua golongan penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memicu timbulnya berbagai jenis kriminalitas. Seperti halnya kota-kota besar lain di Indonesia. Kota Bandung juga mempunyai angka kriminalitas relatif masih tinggi, walaupun sudah ada penurunan dilihat dari angka kriminalitas tahun 2006 mencapai 4.211 kasus, menjadi 4.148 kasus pada tahun 2007, dengan kasus terbanyak pada curanmor roda dua; pencurian dengan pemberatan (surat), penipuan dan penggelapan. Respon warga terhadap gejala ini antara lain nampak dari penjagaan keamanan diri secara sepihak dalam bentuk penutupan akses kawasan-kawasan pemukiman (terutama dari golongan mampu; yang sekaligus menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan ronda sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

Sebagai salah satu kota besar dengan berbagai peran di tingkat nasional yang tergolong penting, permasalahan sosial sebagai dampak kemajuan juga terjadi di Kota Bandung, Keluarga miskin, anak terlantar, keluarga rawan ekonomi, pengemis, gelandangan dan kriminalitas adalah berbagai masalah sosial yang mengemuka di Kota Bandung

2.3 PEREKONOMIAN DAERAH

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat. Pada Tahun 2004-2007 kontribusi ekonomi Kota Bandung di Jawa Barat mencapai rata-rata 10%. Dalam lingkup Kota Bandung Raya, maka kontribusi aktivitas ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional. Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,83% dan diperkirakan pada tahun 2007 mencapai 8,24%. Tingkat Pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. Secara terinci kontribusi kegiatan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya Ekonomi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.15. Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2007

Kabupaten/Kota	%
Kab. Bandung	6.79
Kab. Subang	2.47
Kab. Bandung Barat	2.50
Kota Bandung	10.03
Kota Cimahi	1.89

Sumber : BPS

Uraian di atas mengindikasikan bahwa Kota Bandung merupakan kota penting bagi aktivitas ekonomi di Jawa Barat maupun nasional. Artinya Kota Bandung menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan memiliki banyak kaitan aktivitas ekonomi dengan daerah sekitar dan wilayah lain. Sebagai pusat pertumbuhan dengan tumpuan pada aktivitas perdagangan dan industri pengolahan, Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan migrasi tenaga kerja yang cukup besar. Peran lain Kota Bandung sebagai salah satu Kota Pendidikan terpenting di Indonesia, telah menyatu dengan kehidupan ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya tergolong sangat tinggi.

Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung dari tahun 2005 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan. Selain LPE, beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16.
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kota Bandung
Tahun 2005 - 2008

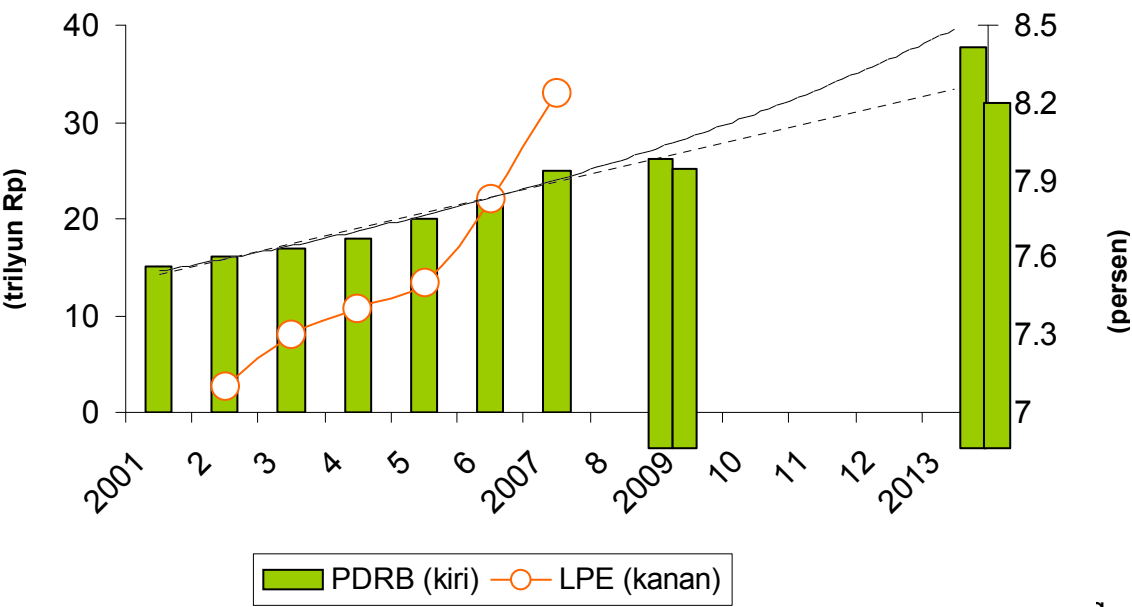
Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008
LPE	%	7.53	7.83	8.24	8.29
PDRB (ADHB)	[Jura Rp]	34.792.184	43.792.184	50.552.182	61.152.569
PDRB/Kapita (ADHB)	[Rp/Thn]	15.789.552	19.352.441	22.616.531	24.794.604
Inflasi	%	19.56	5.33	5.21	10.23 (triwulan 4)
Investasi	[juta Rp/Thn]	3.658.813	4.181.031	5.405.271	4.000.616
Indeks Daya Beli (IDB)		63.93	63.99	64.04	64.27
SHL/Kapita	(Rp)	576.620	576.890	577.130	
Kemiskinan	RTM	70.419	84.287	83.500	82.432
Jumlah Pengangguran	Jiwa	175.337	175.644	174.067	173.074
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	16.25	16.09	15.73	15.48

Sumber : BPS Tahun 2008 (Dionlah)

Dari tabel terlihat bahwa PDRB Kota Bandung dari tahun 2005 ke 2008 menunjukan kenaikan yang berarti, hal ini dapat menunjukkan meningkatnya kegiatan ekonomi. Tingkat inflasi di Kota Bandung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. Dari sisi investasi terjadi kenaikan, namun demikian investasi tersebut belum diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, dari tabel terlihat terjadi peningkatan jumlah pengangguran dari 175.337 jiwa menjadi 175.664 jiwa pada tahun 2006, tetapi pada tahun 2007 menurun menjadi 174.067 jiwa dan diperkirakan menurun lagi menjadi 173.074 jiwa.

Berfluktuasinya jumlah pengangguran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor khususnya untuk akhir tahun 2008, terjadi Penurunan harga BBM yang mengalami perubahan sebanyak 2 kali, namun demikian pada saat yang bersamaan terjadi krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang akan berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Bandung khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Sejalan dengan jumlah tangga miskin, yang meningkat dari 70.419 RTM pada tahun 2005 menjadi 84.287 RTM pada tahun 2006, menurun menjadi 83.500 RTM pada tahun 2007, serta menurun lagi menjadi 82.606 RTM.

Kecenderungan aktivitas ekonomi Kota Bandung pada beberapa tahun ke depan cenderung positif mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.



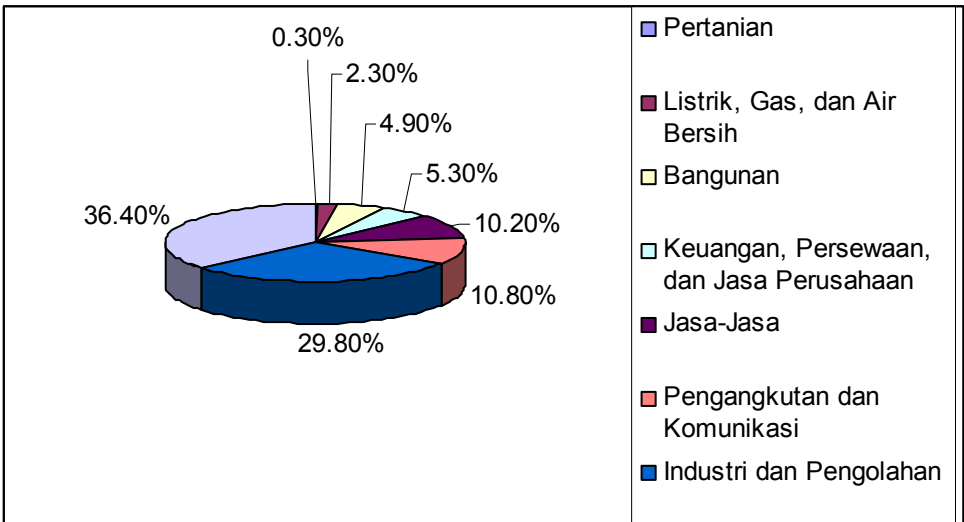
Grafik 2.6. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2001-2007 serta Proyeksinya Tahun 2013

Dalam situasi pertumbuhan ekonomi tinggi dan memiliki prospek yang relatif bagus, maka perekonomian Kota Bandung menghadapi tantangan berat, di antaranya adalah dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Beberapa jenis kegiatan ekonomi mengancam kualitas lingkungan dan kualitas kehidupan melalui berbagai jenis pencemaran. Kebutuhan ruang bagi aktivitas ekonomi juga mendesak penggunaan lahan yang lain. Selain itu ketimpangan pendapatan secara riil tampak nyata, perkiraan jumlah keluarga pra-sejahtera ada kecenderungan meningkat. Dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, inflasi tinggi juga mengancam. Biaya-biaya hidup yang meliputi biaya kehidupan pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, kesehatan dan transportasi meningkat. Peningkatan biaya hidup ini selain dapat menstimulasikan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, juga sekaligus menjadi ancaman bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Pada jangka panjang, kenaikan biaya-biaya ini dapat mengancam keunggulan kompetitif produk-produk dari Kota Bandung. Selain kondisi ekonomi domestik Kota Bandung, gejala ekonomi internasional juga dapat menjadi ancaman berarti. Kedekatan kegiatan ekonomi Kota Bandung dengan Jakarta dapat memperpendek efek gejala ekonomi internasional, misalnya krisis likuiditas di Amerika Serikat dan Eropa.

2.3.1 STRUKTUR EKONOMI KOTA BANDUNG

Nilai PDRB Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 51,3 Trilyun dengan tingkat PDRB per kapita sebesar Rp. 22.640.000,- Tingkat pendapatan perkapita ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Aktivitas ekonomi Kota Bandung, sebagian besar bersumber dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sekitar 36,4% dari seluruh kegiatan ekonomi di Kota Bandung, disusul oleh sektor industri pengolahan sekitar 29,8%. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sekitar 10,8% demikian juga dengan sektor jasa-jasa. Secara terinci kontribusi sektor terhadap PDRB dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.7.



Berdasarkan perkembangan data PDRB Kota Bandung, Tahun 2004-2007, terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terus meningkat tetapi pertumbuhan cenderung menurun, sedangkan perdagangan, hotel dan restoran, terus meningkat, hal ini sesuai dengan fungsi Kota Bandung sebagai kota kolektif dan distributif.

Struktur ekonomi Kota Bandung didominasi oleh setor jasa dan industri pengolahan. Laju pertumbuhannya juga relatif tinggi bila dibandingkan Jawa Barat dan Nasional. Inflasi yang terjadi juga termasuk tinggi, bersumber dari bahan makanan, biaya kesehatan dan transportasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat daya saing Kota Bandung

2.3.2 PENDAPATAN PERKAPITA

Pendapatan perkapita atasdasar harga berlaku, dari tabel 2.16 mengalami peningkatan dari Rp. 15.789.552 pada tahun 2005 menjadi Rp. 24.794.604 pada tahun 2008 (BPS : angka sangat sangat sementara) atau rata-rata peningkatan per tahun mencapai 8,8 % per tahun. Peningkatan tersebut cukup menjadi dasar untuk memprediksikan bahwa lima tahun kedepan cenderung akan terus meningkat.

2.3.3 INFLASI DI KOTA BANDUNG

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat laju inflasi di Kota Bandung pada tahun 2005 mencapai 19,56%, dengan sumbangan terbesar dari kelompok bahan dan bahan makanan, makanan jadi dan rokok, kesehatan serta transport dan komunikasi, hal ini disebabkan oleh kenaikan BBM sampai 112% pada tahun 2005. Inflasi untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi penurunan yaitu mencapai 5,33% dan 5,21%, sedangkan untuk tahun 2008 sampai dengan triwulan 4, inflasi meningkat lagi mencapai 2 (dua) digit yaitu 10,23%, hal ini dipengaruhi oleh krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia secara umum dan Kota Bandung khususnya. Sumbangan Inflasi tersebut tetap didominasi oleh kelompok bahan makanan serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tumbuhan. Sumbangan Inflasi dari kelompok tersebut mencapai 5,7% atau membentuk lebih dari 50% inflasi Kota Bandung.

2.3.4 INVESTASI

Investasi baik asing, domestik maupun pemerintah, memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Bandung. Pertumbuhan investasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu iklim investasi yang kondusif, kemudahan dan kejelasan prosedur serta kondisi makro ekonomi daerah tersebut. Investasi di Kota Bandung mengalami peningkatan dari Rp. 3,6 Trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 5,4 Trilyun pada tahun 2007, tetapi pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4 Trilyun, hal ini dipengaruhi oleh Pemilihan Walikota di Kota Bandung pada bulan Agustus, sehingga investor menunda investasinya, sampai dengan triwulan 2.

2.4 KINERJA PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Bandung telah mendorong upaya reformasi birokrasi yang akan dilakukan menurut tahapan-tahapan tertentu. Saat ini telah dilakukan reorganisasi pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Bandung.

Secara umum, implementasi SOTK baru berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah maka struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung saat ini terdiri dari sejumlah SKPD, yaitu 14 Dinas, 9 lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, 4 perusahaan daerah, 3 rumah sakit daerah, 30 kecamatan serta sekretariat daerah.

Dengan perangkat organisasi tersebut diharapkan struktur organisasi menjadi lebih ramping, bergerak taktis dan strategis, serta dapat mengurangi jabatan struktural yang ada guna meningkatkan efisiensi kerja dan penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, Organisasi yang ada saat ini didukung oleh Esselon. II.A 1 orang, Esselon. II.B 32 orang, Esselon. III.A 76 orang, Esselon. III.B 131 orang, Esselon. IV.A. 895 orang, Esselon. IV.B 708 orang dengan jumlah pegawai, 24.341 pegawai negeri sipil dan 1.501 tenaga kontrak.

Penataan kelembagaan pada dasarnya diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menghilangkan citra birokrasi sebagai penghambat pembangunan. Dengan demikian, adanya re-organisasi berimplikasi terhadap pengurangan jabatan.

Di antara masalah yang masih menjadi tantangan di masa depan adalah kapasitas aparatur tata kerja. Berbagai kegiatan peningkatan kinerja aparatur dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, pengawasan, mengikuti pendidikan dan latihan dan sebagainya. Namun dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan, dirasakan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam mencapai pelayanan prima masih berada di bawah standar.

Tata kerja di masa datang juga penting untuk diperjelas dan dituangkan dalam mekanisme kerja dan job description yang baik agar sistem dapat berjalan dengan baik. Tata kerja ini berfungsi sebagai petunjuk operasional SOTK yang sudah ada. Dan saat ini SKPD yang telah memiliki Standar Mutu Nasional (SMN) ISO 9000:2001 adalah sebanyak 12 SKPD.

Hal lain yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, adalah upaya penguatan kelurahan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas perijinan maka telah dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BMPPT) dan Bandung Elektronik Procurement (BEP).

Langkah-langkah dalam upaya reformasi pelayanan perijinan, meliputi :

- a. Regulasi perijinan usaha dengan memangkas jumlah perijinan dan menata perijinan yang tumpang tindih.
- b. Birokrasi perijinan usaha melalui penyederhaan prosedur perijinan.

Dalam pelaksanaannya reformasi pelayanan perijinan diformulasikan ke dalam pembentukan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan satu pintu adalah penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan, sampai dengan penerbitan dokumen secara terpadu dan dilakukan di satu tempat melalui *front office* untuk meminimalisasi interaksi antara pemohon dan petugas perijinan dan menghindari kemungkinan pungutan-pungutan tidak resmi.

Seiring dengan penataan organisasi perangkat daerah Kota Bandung sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bentuk kelembagaan terpadu satu pintu ditingkatkan dari setingkat kantor menjadi setingkat badan dengan nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bandung dengan asumsi bahwa pelayanan perijinan yang diselenggarakan berkaitan erat dengan investasi di daerah. Dengan adanya kemudahan perijinan diharapkan akan mendorong kondusifitas iklim investasi di Kota Bandung.

Peningkatan status kelembagaan satu pintu juga dilakukan dengan perubahan ketatalaksanaan, peningkatan kewenangan dimana Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kewenangan dari mulai penerimaan berkas, pemrosesan ijin, penandatanganan ijin dan penyerahan ijin. Selain itu jumlah perijinan yang dikelola oleh satu pintu ditingkatkan dari 14 jenis perijinan menjadi 62 jenis perijinan baik ijin usaha maupun non usaha.

Hal-hal yang perlu dilakukan seiring dengan peningkatan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

- a. Revisi Perda-perda terkait dengan prinsip-prinsip pelayanan satu pintu, seperti penyederhaan, persyaratan dan waktu pelayanan;
- b. Penyederhaan jumlah perijinan dengan menyatukan atau menghapus perijinan yang dianggap tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha;

- c. Pengurangan biaya bagi kategori usaha tertentu;
- d. Penetapan kebijakan untuk mengurangi pungutan-pungutan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT terutama terkait dengan persyaratan ijin.

Sebagai perwujudan *political will* dari penerapan pola pelayanan terpadu satu pintu telah dianggarkan pula pembiayaan dalam operasional pelayanan satu pintu baik dalam APBD perubahan Tahun 2007 maupun APBD Tahun 2008.

Upaya peningkatan pelayanan dilakukan melalui penerapan model pelayanan bersifat proaktif dan standar mutu. Model pelayanan yang bersifat proaktif adalah dengan membangun situs (*web site*) untuk pelayanan on line, sedangkan pelayanan yang bersifat standar mutu adalah melalui penggunaan ISO 9001:2000 yang berguna untuk menyusun pedoman kerja yang berstandar, meningkatkan citra, profesionalitas dan meningkatkan daya tarik investasi.

2.5 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*finacial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan struktur APBD Kota Bandung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD Kota Bandung terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen Pendapatan terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari bagi Hasil Pajak / bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri dari ; (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga;

(2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pada komponen pembiayaan terdiri dari : (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah; (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

2.5.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan pada tahun 2003 adalah sebesar Rp. 962 milyar, selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2008 menjadi Rp. 2.018 milyar. Sumber penerimaan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu rata-rata dari Tahun 2003-2008 sebesar 73,4%. Nilai Dana Perimbangan pada Tahun 2003 mencapai Rp. 706 milyar dan pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp. 1.360 milyar. Pada dasarnya PAD belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan, walaupun nilai PAD pada tahun 2003 mencapai Rp. 213 milyar dan termasuk daerah yang memiliki PAD tinggi di Jawa Barat. Pada tahun 2008 diperkirakan PAD mencapai Rp. 314 milyar. Secara umum struktur pendapatan Pemerintah Kota Bandung tidak mengalami perubahan yang besar. Lain-lain penerimaan yang sah, pada dasarnya mengalami peningkatan berarti. Peningkatan pada tahun 2008 disebabkan karena pergeseran pos penerimaan saja. Sumber penerimaan PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah, sedangkan penerimaan Dana Perimbangan sebagian besar bersumber dari DAU.

Tabel 2.17. Pendapatan Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2003-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Pendapatan (Total)
2003	213	706	43	962
2004	223	861	35	1.119
2005	226	862	36	1.123
2006	254	1.140	4	1.398
2007	288	1.097	301	1.686
2008	314	1.360	343	2.018

Sumber Data : LKPJ - 2008

Catatan : Mulai tahun 2008, Penerimaan Bagi Hasil dari Propinsi dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan yang sah, yang sebelumnya masuk ke dalam Dana Perimbangan

Tabel 2.18. Penerimaan PAD Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2003-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	BUMD dan dari Aset Dipisahkan	Pendapatan lain yang sah
2003	115.0	55.0	2.1	40.9
2004	133.6	61.6	14.9	12.9
2005	143.1	66.3	2.6	13.7
2006	164.8	76.0	3.2	9.9
2007	190.5	75.8	3.8	17.5
2008	214.4	73.8	5.4	20.9

Sumber Data : LKPJ - 2008

Tabel 2.19. Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2003-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	DAU	DAK	Bagi Hasil dari Propinsi
2003	162.3	416.7	1.0	126.1
2004	207.8	439.7	6.5	206.5
2005	198.5	458.1	0	204.9
2006	219.2	632.4	14.9	273.4
2007	256.4	828.3	12.5	Terdapat pada Lain-lain Pendapatan yang sah
2008	386.7	965.5	8.2	

Sumber Data : LKPJ - 2008

Tabel 2.20. Struktur Pendapatan Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2003-2008 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PAD	Perimbangan	Lain-lain yang sah	Pendapatan
2003	22.2	73.4	4.4	100
2004	19.9	76.9	3.2	100
2005	20.1	76.7	3.2	100
2006	18.2	81.6	0.3	100
2007	17.1	65.1	17.9	100
2008	15.6	67.4	17.0	100

Sumber Data : LKPJ - 2008

Seperti umumnya kabupaten dan Kota di Indonesia, sumber pendapatan daerah sebagian besar dari Dana Perimbangan, walaupun Kota Bandung tergolong sebagai Kota yang memiliki PAD tinggi. Berdasarkan kondisi ini sering muncul pernyataan bahwa dalam otonomi daerah ini daerah belum mandiri secara financial

Struktur pendapatan Pemerintah Kota Bandung termasuk bagus, karena kontribusi PAD relatif besar. Sebagai kota dengan fiskal gol rendah, dana perimbangan juga relatif kecil. Namun demikian karena jumlah penduduk yang relatif besar maka belanja daerah per kapita juga relatif tidak terlalu tinggi

2.5.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem penganggaran maupun akuntansi. Sesuai dengan reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan kepada publik secara transparan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang didasarkan kepada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam hal pengelolaan anggaran antara Tahun 2004-2008, telah terjadi perbedaan pola pos-pos belanja yang cukup drastis. Antara Tahun 2004-2006 dikenal dengan nama alokasi Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Disangka. Pada Tahun 2007-2008 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan struktur APBD menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja yang relatif menjadi perhatian masyarakat dalam hal ini adalah Belanja Publik atau Belanja Langsung. Kategori belanja inilah yang relatif diwujudkan dalam program-program pembangunan di masyarakat, sedangkan pos belanja lain relatif merupakan belanja internal pemerintahan.

Belanja daerah pada tahun 2003 mencapai Rp. 945.8 milyar dan pada tahun 2008 mencapai Rp. 2.049,9 milyar. Bila diperhatikan, tampak bahwa selisih antara pendapatan dan belanja cukup besar. Situasi ini terjadi di antaranya karena masalah perencanaan kegiatan yang relatif menggunakan informasi pendapatan dana perimbangan yang terbatas, serta berbagai penerimaan yang masuk dalam kas daerah pada akhir periode sehingga belum dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 2.21. Struktur Belanja Pemerintah kota Bandung Tahun 2003-2008
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Belanja	Belanja Aparatur	Belanja Publik	Belanja Bagi Hasil	Belanja Tak Disangka	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2003	945.8	482.7	335.7	114.0	13.6	-	-
2004	975.0	396.5	465.1	112.8	0.6	-	-
2005	1.114.1	414.5	558.0	111.1	30.4	-	-
2006	1.266.1	451.8	639.9	175.1	0.2	-	-
2007	1.552.8	-	-	-	-	984.1	568.7
2008	2.049.9	-	-	-	-	1.341.8	708.1

Sumber Data : LKPJ - 2008

Salah satu perhatian dalam belanja adalah nilai nominal belanja publik atau belanja langsung yang menuntut karakternya adalah belanja pembangunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Belanja Publik tahun 2003 mencapai Rp. 335,7 milyar dan diperkirakan pada tahun 2008 mencapai Rp. 908 milyar. Rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap total belanja adalah 42,29%. Dalam komposisi demikian, maka pada dasarnya pendapatan dan alokasinya tidak banyak mengalami perubahan antara Tahun 2003-2006. Dengan mempertimbangkan inflasi selama kurun tersebut, sebenarnya pendapatan riil antara tahun 2003 dan 2007 hanya meningkat sebesar Rp. 100 milyar. Inflasi yang tinggi telah menekan nilai riil alokasi belanja langsung perkapita di Kota Bandung antara Tahun 2003-2007. Bila pada Tahun 2003-2006 belanja perkapita nominal mengalami peningkatan, maka tahun 2007 mengalami penurunan, terlebih lagi nilai riilnya, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2008. Belanja langsung (pembangunan) riil perkapita pada tahun 2006 sebesar Rp. 190.761 mengalami penurunan menjadi Rp. 152.661,- pada tahun 2007, dan mengalami peningkatan kembali menjadi Rp. 159.115 pada tahun 2008 (tahun dasar 2003).

Kejadian inflasi kerap kali berasal dari masalah eksternal Kota Bandung, misalnya perubahan ekonomi nasional atau internasional atau kebijakan pemerintah pusat serta kebijakan moneter. Usaha alokasi belanja pembangunan yang lebih besar seperti yang direncanakan dapat merosot nilai riilnya pada saat inflasi terjadi. Hal-hal seperti ini sering di alami oleh Pemerintah Kota Bandung pada saat pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.22. Pendapatan dan Belanja Nominal-Riil Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2003-2008 (Tahun Dasar 2003)

Tahun	Pendapatan (Milyar Rp)		Belanja Langsung (Publik) perkapita (Rp)	
	Nominal	Riil	Nominal	Riil
2003	962	962	150.655	150.655
2004	1.119	1.027	208.320	191.243
2005	1.123	891	245.710	195.037
2006	1.398	957	278.599	190.761
2007	1.686	1.059	243.042	152.661
2008	2.018	888	361.626	159.115

Sumber Data : LKPJ - 2008

2.5.3 PENGELOLAAN BIAYA

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daeran dan belanja daerah, dalam hal ini terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam pengeluaran, pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Secara terinci komposisi pembiayaan pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.23. Struktur Pembiayaan Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2004-2008

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pembiayaan	(25.3)	60.8	64.2	165.6	295.6
2	Penerimaan	40.4	118.5	87.4	195.9	298.5
3	Pengeluaran	65.7	57.6	23.1	30.3	2.9

Sumber Data : LKPJ - 2008

Selain mengoptimalkan potensi anggaran Pemerintah Kota Bandung, maka penting juga dilakukan upaya koordinasi pemanfaatan potensi dana pembangunan yang berasal dari stakeholders.

2.6 ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-2013 terlebih dahulu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber. Diantaranya adalah,

1. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2005-2025.
2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana-prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
3. Isu strategis menurut aspirasi masyarakat melalui kegiatan survey.
4. Isu strategis menurut pendapat para pakar dan tokoh masyarakat atas kondisi yang mereka rasakan saat ini dan kemungkinannya di masa datang dengan interview.

Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 ini disusun berdasarkan kompilasi isu strategis yang ada dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2005-2025, hasil analisis atas situasi dan kondisi serta persepsi masyarakat, tokoh dan para pakar. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut ini;

- Cakupan masalah yang luas.
- Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif.
- Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bandung.
- Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan.
- Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Berdasarkan masalah hasil persepsi masyarakat, tokoh dan para pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna strategisnya seperti pada tabel berikut. Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada masa RPJMD Tahun 2009-2013. Masalah yang berjangka panjang di arahkan untuk pembangunan bertahap dan dalam RPJMD tahun tersebut adalah berupa bagian dari pembangunan jangka panjang.

Adapun isu strategis yang patut di angkat dalam RPJMD ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya;

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
2. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kota.
3. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup Kota.
4. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur serta Penataan Kota.
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

6. Penyediaan Pelayanan Umum Kota yang Prima.
7. Optimalisasi Manajemen Pemerintahan Kota.
8. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isu strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

1. Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan inovasi relatif belum didayagunakan secara optimal;
2. Kapasitas sumber daya Aparatur Kewilayahan dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan relatif masih rendah;
3. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintah pada kawasan Metropolitan Bandung belum optimal;
4. Tingkat kompetensi dan kemampuan teknis dalam manajemen pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bandung relatif masih rendah;
5. Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum optimal;
6. Tingkat aksesibilitas penduduk pada sarana dan prasarana transportasi massal relatif masih kurang memadai;
7. Pentingnya penguatan kelurahan dan kecamatan dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
8. pentingnya penguatan kerjasama dengan wilayah Bandung Raya bagi kelangsungan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan di Bandung Raya secara berkelanjutan;
9. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta kemampuan keuangan pemerintah Kota Bandung.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI DAN MISI

Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013 :

Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat

Kota Bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan politik prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sector jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya. Jawa Barat dan Nasional pada umumnya.

Kota Jasa Bermartabat memiliki dimensi :

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, indah , hijau dan berbunga ;
2. Pemenuhan kondisi lingkungan social yang aman, tertib, stabil dan dinamis ;
3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya ;
4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan majemuk ;
5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ;

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung **motto** juang '**Bermartabat**' yaitu Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat.

Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari Misi Tahap II dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap II tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan bedaya saing ;
2. Mengembangkan Profesional Kota yang bedaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan public serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan Ekonomi Kota ;
3. Meningkatkan kesejahteraan social dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat ;

4. Menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan ;
5. Meningkatkan kinerja pemerintah Kota yang efektif, efisien, akuntabel dan Transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota Metropolitan ;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan Kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang Sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Misi-1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing.

Tujuan-1 :

Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Sehat)

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau ;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum
3. Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
4. Meningkatnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan ;
5. Meningkatnya pengawasan komoditas produk-produk pangan ;
6. Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah penduduk.

Tujuan-2 :

Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Cerdas)

Sasaran :

1. Tersedianya SDM cerdas sejak dini ;
2. Meningkatnya kuanlitas akses penyelenggaraan pendidikan dasar ;
3. Meningkatnya SDM yang kreatif dan kompetitif ;
4. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan non formal ;
5. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan ;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang pendidikan ;
7. Meningkatnya budaya baca masyarakat ;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan ;

Tujuan-3 :

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhak Mulia (Agenda Prioritas Bandung Agamis)

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama ;
2. Meningkatnya kerukunan umat beragama.

Tujuan-4 :

Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan bernegara.

Sasaran :

1. Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

Misi-2 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan public serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota.

Tujuan-1 :

Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Makmur)

Sasaran :

1. Meningkatnya peranan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian Kota ;
2. Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi dunia usaha ;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan perkotaan ;
4. Meningkatnya kemampuan teknologi, system produksi dan penguat sentra industri ;
5. Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sector perekonomian kota ;
6. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok ;
7. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja format di sector-sektor yang menjadi core competency kota ;
8. Meningkatnya penerbitan dan penataan pedagang kaki lima serta pedagang asongan;
9. Mengembangkan kota sebagai kota kreatif.

Tujuan-2 ;
Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata ;

Tujuan-3 :
Mewujudkan kerjasama Ekonomi dengan Daerah lain.

Sasaran :

1. meningkatnya sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah.

Misi-3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat

Tujuan-1 :
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Makmur)

Sasaran :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi dan ekonomi masyarakat.

Tujuan-2 :
Meningkatnya sinergitas pelestarian budaya local antar pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya)

Sasaran :

1. Meningkatkan sinergitas pelestarian budaya local antar pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat

Tujuan-3 :
Meningkatnya prestasi kepemudaan (Agenda Prioritas Bandung Berprestasi).

Sasaran :

1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan ;
2. Meningkatkan prestasi olahraga dan bidang lainnya.

Tujuan-4 :
Meningkatnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sisoal.

Sasaran :

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang masalah kesejahteraan social ;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan social.

Tujuan-5 :

Meningkatkan mutu kerjasama diantara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung.

Sasaran :

1. Terbukanya akses informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota.

Misi-4 : Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang berwawasan lingkungan.

Tujuan-1 :

Mewujudkan kualitas udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan.

Sasaran :

1. Terkendalinya pencemaran udara ;
2. Terkendalinya pencemaran air ;
3. Terkendalinya pencemaran tanah.

Tujuan-2 :

Menjamin tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)

Sasaran :

1. Pengembangan sumber air baku untuk penyediaan air bersih ;
2. Mengikat dan terkendalinya kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi).

Tujuan-3 :

Mewujudkan pengelolaan limbah padat yang efektif dan bernilai ekonomi.

Sasaran :

1. Berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi.

Tujuan-4 :

Menyediakan ruang Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Sasaran :

1. Terbentuknya struktur ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;
2. Tersedianya lahan pemakaman sesuai kebutuhan kerjasama dengan pengembang ;
3. Terarahnya hunian vertical dan teremajakannya kawasan kumuh.

Tujuan-5 :

Memantapkan pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sasaran :

1. Tertatanya ruang terbuka public secara berkualitas ;
2. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

Tujuan-6 :

Menyediakan system transportasi yang aman, efisien, nyaman, terjangkau dan Ramah lingkungan.

Sasaran :

1. Berkembangnya system prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kita ;
2. Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan dan kecelakaan;
3. Berkembangnya sarana angkutan umum missal (SAUM) dan terbatasnya penggunaan kendaraan bermotor.

Tujuan-7 :

Mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standart teknis/standar pelayanan minimal (SPM).

Sasaran :

1. Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik ;
2. Tersedianya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan ;
3. Tersedianya system drainase kota yang tertata ;
4. Tersedianya system penanganan air limbah dan IPAL kota ;
5. Tersedianya prasarana energi dan komunikasi yang handal.

Tujuan-8 :

Mewujudkan mitigasi bencana yang handal.

Sasaran :

1. Tumbuh dari meningkatnya pengelolaan bencana alam (gempa, longsor, banjir, gunung meletus, angin topan dll) ;

2. Tumbuh dan meningkatnya pengelolaan bencana alam kecelakaan (kebakaran dll) ;
3. Penanggulangan infrastruktur pasca bencana.

Misi-5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota Metropolitan.

Tujuan-1 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemantapan reformasi birokrasi.

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel.
2. Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat ;
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel ;
4. Mantapnya pelaksanaan reformasi birokrasi ;
5. Terwujudnya pelayanan publik yang prima ;
6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis ;
7. Meningkatnya transparansi pengelolaan pemerintahan ;
8. Meningkatnya ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan stabilitas keamanan daerah ;

Misi-6 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang system pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan-1 :

Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang optimal.

Sasaran :

1. Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatnya sinergitas APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota (Fiskal antar pemerintahan) ;
3. Berkembangnya instrument pembiayaan pembangunan non-konvensional.

Tujuan-2 :

Mewujudkan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan Kota.

Sasaran :

1. Meningkatnya sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

3.3 STRATEGI

Strategi pembangunan ini ditetapkan secara umum dengan focus pada masyarakat pemerintahan dan kerjasama strategis dengan pihak lain yang meliputi :

1. Mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan prasarana kota ;
2. Menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan situasi social kependudukan dari sumber daya manusia serta mengantisipasi masalah-masalah social kependudukan, kepadatan penduduk, patologi social perkotaan dan lain sebagainya ;
3. Mendorong usaha ekonomi kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
4. Mengkondisikan lingkungan fisik tata ruang yang memenuhi kaidah amenities keindahan kota, ekosistem, kesehatan, daya saing kota dan kebersihan ;
5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen public (public management reform) ;
6. Mengembangkan kerjasama dengan daerah Bandung Raya dan pihak lain dalam upaya optimalisasi daya dukung kota dan pelayanan umum terhadap pertumbuhan aktivitas yang ada di dalamnya ;
7. Menekankan pada masalah yang layak ditangani dalam jangka menengah serta mempersiapkan landasan bagi penyelesaian permasalahan jangka panjang.

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan umum untuk tahun 2009-2013 adalah meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan ;
2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman ;
3. Peningkatan kinerja birokrasi.
4. Pengembangan kerjasama dengan daerah Bandung Raya dan pihak lain dalam upaya optimalisasi daya dukung kota, pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Kebijakan tersebut dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 6 sebagai berikut :

Misi-1 : Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan berdaya saing.

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan pendidikan formal dan informasi dalam semua strata pendidikan ;
2. Pengembangan kewirausahaan dengan membangun kompetensi dari kemampuan daya saing yang kreatif ;
3. Peningkatan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan HIV dan narkoba terutama dikalangan generasi muda ;
4. Pengembangan peningkatan fungsi tempat ibadah sebagai tempat meningkatkan keimanan dan moral ;
5. Peningkatan lingkungan hidup diperkelolaan dan disiplin hidup diperkotaan ;
6. Peningkatan peran swasta dalam pendidikan ;
7. Penguasaan teknologi informasi bagi masyarakat kota ;
8. Penguatan institusi masyarakat dalam membangun modal social, perilaku dan kebudayaan melalui peran serta masyarakat sehingga terbentuk solidaritas masyarakat yang kokoh dan dinamis.

Misi-2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam Menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan public serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota.

Arah Kebijakan :

1. Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam meningkatkan kesempatan kerja di kota Bandung melalui pelayanan satu pintu ;
2. Penataan pedagang kaki lima dan meningkatkan kemitraan dengan sentra-sentra produk local dalam mengembangkan industri kreatif tradisional ;
3. Perbaikan infrastruktur ekonomi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam mengembangkan ketahanan pangan kota ;
4. Pendukung sector swasta dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja ;
5. Pendukung perubahan pola konsumsi masyarakat melalui diverifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan kota ;
6. Penataan Struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang baik ;
7. Pengembangan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, menengah dan besar dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif ;
8. Penguatan promosi daerah dalam menarik wisatawan dan investasi dalam bidang pariwisata.

Misi-3 : Meningkatkan kesejahteraan Sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat.

Arah Kebijakan :

1. Pembinaan seni budaya daerah dalam menunjang pariwisata ;
2. Pengembangan kelompok-kelompok karang taruna/generasi muda ;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan ;
4. Pembinaan secara komprehensif kelompok multietnis dalam menunjang Bandung sebagai Kota Metropolitan ;
5. Pengembangan LSM yang berorientasi pada pembangunan dan lingkungan kota ;
6. Peningkatan peran lembaga dakwah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama ;
7. Pembinaan anak jalanan sehingga memiliki kesempatan dalam berkreasi, produktif, dan berdayaguna dimasa depan ;
8. Peningkatan peran media dalam penyalahgunaan informasi pembangunan.

Misi-4 : Menata Kota Bandung menuju Metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan.

Arah Kebijakan :

1. Pengelolaan tata ruang secara konsisten, efisien, produktif dan dinamis sesuai dengan RTRW Kota Bandung ;
2. Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan berbunga ;
3. Pengelolaan transportasi secara efisien dalam mengurangi kemacetan dari polusi dengan mempersiapkan konsep Rapid Mass Transportation yang handal sesuai dengan kemampuan/potensi Kota Bandung ;
4. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan sekunder ;
5. Penghijauan perbaikan dan penambahan taman kota dan ruang terbuka untuk public serta perbaikan dan pemanfaatan daerah aliran sungai yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan ;
6. Pelaksanaan program Urban Renewal dan Urban Redevelopment dalam meningkatkan pelayanan sector jasa ;
7. Penguatan SKPD yang terkait dalam menunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan satu pintu ;

Misi-5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota Metropolitan.

Arah Kebijakan ;

1. Peningkatan pemerintahan yang Good Government disertai prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan ;
2. Peningkatan pelayanan public yang optimal dan prima dengan menciptakan kondisi nyaman, ramah dan produktif ;
3. Pengembangan manajemen kota efisien, produktif dan berdayaguna ;

4. Peningkatan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga tercipta suatu mekanisme birokrasi yang sehat dan terpercaya ;
5. Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui desentralisasi kebijakan pemerintahan kota ;
6. Pengembangan system informasi dalam manajemen pemerintahan yang dapat memonitor permasalahan kota sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Kota.

Misi-6 : Meningkatkan Kapasitas pengelolaan keuangan dari pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan azas proporsionalitas, adil dan merata ;
2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan public ;
3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi azas manfaat ;
4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan public
5. Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntabilitas public.

3.5 PROGRAM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Misi-1 : Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat,cerdas, berakhlak, professional dan berdaya saing.

Program :

- a. Program upaya kesehatan masyarakat ;
- b. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Program pencegahan penanggulangan penyakit dan lingkungan sehat ;
- d. Program obat dan pembekalan kesehatan ;
- e. Program peningkatan Sarana, Prasarana dan Manajemen Kesehatan ;
- f. Program keluarga berencana ;
- g. Program kesehatan reproduksi remaja ;
- h. Program pemberdayaan keluarga.

- i. Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas ;
- j. Program pengembangan system informasi dan mikro keluarga ;
- k. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- l. Program wajar pendidikan dasar sembilan tahun ;
- m. Program pendidikan menengah ;
- n. Program pendidikan non formal ;
- o. Program peningkatan sarana prasarana pendidikan ;
- p. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;
- q. Program manajemen pelayanan pendidikan ;
- r. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan ;
- s. Program pengembangan iklim religius, lingkungan agamis dan aktivitas social keagamaan ;
- t. Program peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama ;
- u. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ;
- v. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- w. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- x. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak;

Misi-2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan public serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota.

Program :

- a. Program peningkatan investasi ;
- b. Program peningkatan ekonomi masyarakat ;
- c. Program peningkatan ketahanan pangan ;
- d. Program peningkatan pariwisata ;
- e. Program peningkatan ketenagakerjaan.

Misi-3 : Meningkatkan kesejahteraan social dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kredit, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat.

Program :

- a. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social ;
- b. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Program pengembangan nilai budaya daerah ;
- d. Program peningkatan peran serta kepemudaan ;
- e. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda ;
- f. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga ;
- g. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ;
- h. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga ;
- i. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya ;

- j. Program pemantapan kelembagaan potensi sumber kesejahteraan social (PSKS) ;
- k. Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat ;
- l. Program penmyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;
- m. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- n. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa ;

Misi-4 : Menata kota Bandung menuju Metropolitan terpadu berwawasan lingkungan.

Program :

- a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Program peningkatan pengendalian polusi ;
- c. Program penyediaan air baku ;
- d. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ;
- e. Program rehabilitasi hutan dan lahan ;
- f. Program penyediaan sarana pembibitan RTH (baru) ;
- g. Program penataan ruang terbuka public secara berkualitas ;
- h. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah ;
- i. Program peningkatan pengelolaan sampah perkotaan;
- j. Program optimalkisasi system pengelolaan persampahan ;
- k. Program perencanaan tata ruang ;
- l. Program penataan bangunan dan bangun-bangunan ;
- m. Program pemanfaatan ruang ;
- n. Program pengendalian pemanfaatan ruang ;
- o. Program pengembangan perumahan;
- p. Program pembangunan jalan dan jembatan;
- q. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- r. Program peningkatan pelayanan angkutan;
- s. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- t. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan ;
- u. Program peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan air bersih;
- v. Program pengendalian banjir
- w. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ;
- x. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya ;
- y. Program pembangunan dan pengembangan trotoar ;
- z. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ;
- aa. Program peningkatan kesiapan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran ;
- bb. Program pelayanan prima dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
- cc. Program tanggap darurat bencana alam ;

Misi-5 : Meningkatkan kinerja pemerintah Kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan Kota Metropolitan.

Program :

- a. Program perencanaan pembangunan ;
- b. Program pembangunan hokum daerah ;
- c. Program penataan perundang-undangan ;
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
- e. Program pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur ;
- f. Program pemantapan reformasi birokrasi ;
- g. Program pengawasan pembangunan daerah ;
- h. Program kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Program pendidikan politik masyarakat dan wawasan kebangsaan ;
- j. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;

Misi-6 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan Kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang system pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Program :

- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Program pengembangan kemitraan pembiayaan pembangunan daerah.

3.6 KEBUTUHAN ANGGARAN

Kebutuhan anggaran dapat dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dialokasikan dalam bentuk biaya rutin (gaji, pemeliharaan dan lain sebagainya), pengembalian pinjaman dan lain-lain, sedangkan Belanja Langsung adalah belanja program yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

Kebutuhan anggaran untuk Belanja Langsung (pembangunan) secara makro diperkirakan dengan menggunakan model ekonometrika yaitu dengan mengaitkan antara target pencapaian indicator utama Otonomi Daerah (PP No. 6 Tahun 2008), Indeks pembangunan Manusia (IPM), dengan kecenderungan Belanja Daerah selama Tahun 2003 -2007. Kebutuhan pendanaan dalam ini difokuskan pada Belanja langsung atau Belanja Pembangunan, sedangkan Belanja Tidak Langsung dapat ditentukan dengan rasio PNS yang ada. Karena kebutuhan pendanaan ini bersifat indikasi dan pada tingkatan makro, maka pada saat disusun rencana kegiatan dan keuangan tahunan harus diperkirakan biaya setiap kegiatan – kegiatan yang diusulkan. Selain itu kebutuhan dana ini khususnya adalah yang menjadi focus bagi APBD Kota Bandung, sedangkan sumber-sumber dana lain seperti APBN, APBD Propinsi dan bantuan-bantuan serta dana masyarakat diasumsikan memiliki kecenderungan peningkatan juga.

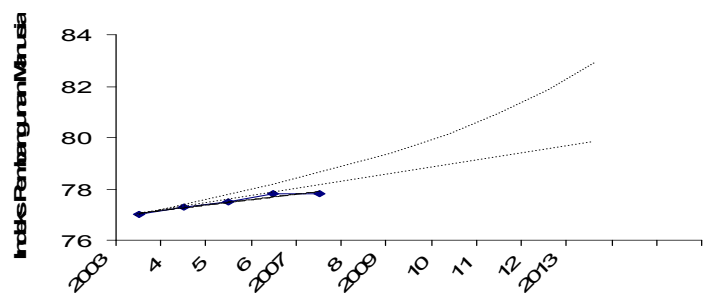
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 81,07 dengan rincian indeks masing-masing seperti tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Target IPM dan Komponennya Tahun 2008-2013

Tahun	IPM	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Daya Beli
2003	77.15	89.29	79.20	62.95
2004	77.17	88.94	79.23	63.34
2005	77.46	89.18	79.27	63.93
2006	77.54	89.26	79.38	63.99
2007	78.09	89.60	80.64	64.04
2008 *	78.59 *	90.13 *	80.79 *	64.85 *
2009	79.08	90.66	80.94	65.65
2010	79.58	91.16	81.10	66.46
2011	80.08	91.72	81.25	67.27
2012	80.57	91.25	81.40	68.07
2013	81.07	91.78	81.55	68.88

Target IPM tersebut didasarkan pada RPJMD Kota Bandung tahap –II, dan listrik secara garis lurus dengan tingkat IPM terakhir pada tahun 2007. Estimasi tahun 2008 adalah masa transisi, sehingga bila estimasi ini terlalu tinggi, maka akan di akumulasikan pada tahun berikutnya. Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun diasumsikan sebesar 1,23 %.

Target IPM tersebut dapat diuji dari dua simulasi, yaitu simulasi dengan model parabola (non linier) dan modal linier. Dengan model linier, maka sampai tahun 2013 kemungkinan hanya akan dapat dicapai IPM 79,25. Bila dengan menggunakan model parabola, maka target sebesar 81,07 tersebut justru akan dapat dilampaui. Model parabola ini dalam implementasinya mensyaratkan kerja keras segenap aparat maupun warga masyarakat dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh, kreatif-inovatif.



Grafik 3.1. Posisi Target IPM Tahun 2013

Atas dasar target IPM tersebut maka dapat diperkirakan kebutuhan belanja langsung perkapita dan total belanja langsung pertahun. Pencapaian yang lebih tinggi pada tahun bersangkutan akan memperingan pencapaian dan penyediaan dana tahun berikutnya. Demikian juga sebaliknya, yaitu tidak tercapainya target tahunan dapat menimbulkan akumulasi kebutuhan belanja langsung pada tahun berikut, demikian juga apabila ternyata efektifitas pencapaian indicator berjalan lambat.

Berdasarkan target diatas, maka dapat diperoleh perkiraan kebutuhan belanja langsung dari Tahun 2008-2013 dengan asumsi sumber-sumber dana lain dari APBN, APBD Propinsi dan dana masyarakat juga mengikuti kecenderungan yang meningkat. Selain itu selama perjalanan tahun tersebut, diasumsikan tidak terjadi perubahan-perubahan drastic dan mendasar pada berbagai kondisi eksternal sehingga berdampak negative.

Pada tahun 2009 diperkirakan kebutuhan belanja langsung sebesar Rp. 1.036 Milyar atau rata-rata belanja langsung perpenduduk Kota Bandung adalah Rp. 432.000,- Pertahun. Pada tahun 2013 diperkirakan kebutuhan belanja langsung sebesar Rp. 1.891 Milyar atau rata-rata balanja langsung perpenduduk Kota Bandung adalah Rp. 751.000,- pertahun. Selanjutnya kebutuhan belanja langsung, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Kebutuhan Total Belanja Langsung dan Belanja Langsung per Kapita
APBD Kota Bandung Tahun 2008-2013

Tahun	Total Belanja Langsung (Milyar Rp)	Belanja Langsung perkapita (Rp/tahun)
2007	750	320.411
2008	878	370.865
2009	1.036	432.169
2010	1.273	524.425
2011	1.492	607.226
2012	1.697	682.305
2013	1.891	751.051

Sumber : Hasil Analisis

Perkiraan kebutuhan belanja langsung pada tabel di atas, selanjutnya dapat diperkirakan secara makro alokasinya menurut kluster dan program prioritas. Kluster yang dimaksud adalah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur dan Pranata. Kluster disusun atas dasar tugas pokok dan fungsi SKPD, secara langsung pada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, program pendukung berupa

penyediaan infrastruktur dan program kepranataan berupa peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Dalam kaitannya dengan 7 Agenda Prioritas dan Reformasi Birokrasi, maka perkiraan kebutuhan belanja langsung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Kebutuhan Belanja Langsung APBD Kota Bandung Tahun 2008-2013 menurut 7 Agenda Kota (Milyar Rupiah)

Tahun	• Bandung Cerdas	• Bandung Sehat	• Bandung Makmur	• Bandung Berprestasi • Bandung Hijau	• Bandung Kota Seni Budaya • Bandung Kota Agamis
					• Reformasi Birokrasi
2007	66	86	38	262	298
2008	58	82	36	286	417
2009	83	83	44	299	528
2010	117	98	56	378	625
2011	137	114	68	459	714
2012	149	131	80	541	796
2013	154	148	93	626	871

Sumber : Hasil Analisis

BAB IV

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.1 STRATEGI KEUANGAN

Strategi pengelolaan keuangan daerah meliputi aspek pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan. Secara umum strategi keuangan daerah yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerimaan PAD;
2. Diferensiasi penerimaan PAD sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan kinerja BUMD terhadap penerimaan daerah;
4. Meningkatkan efektifitas pembelanjaan melalui perencanaan yang baik dan proposional;
5. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan in-konvensional, misalnya melalui obligasi

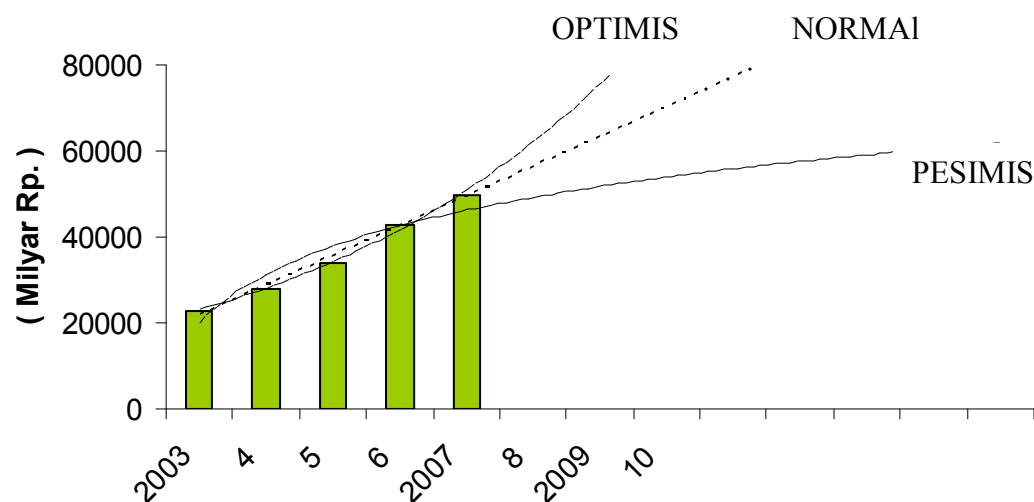
4.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

4.2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber pendapatan kabupaten dan kota di Indonesia sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan, walaupun Kota Bandung tergolong sebagai Kota yang memiliki PAD tinggi. Situasi seperti ini patut dicermati dengan hati-hati. Apabila Kota Bandung mampu meningkatkan pendapatan dari PAD yang kebanyakan bersumber dari pajak dan retribusi secara drastis misalnya 100%, maka kontribusi terhadap pendapatan juga hanya sekitar 35 % saja atau tidak akan mampu memenuhi 50% pendapatan. Terlebih lagi karakteristik PAD yang terkait dengan pelayanan, maka peningkatan PAD besaran-besaran potensial menimbulkan beban masyarakat dengan berbagai penerimaan yang dipungut oleh pusat dan propinsi. Dengan demikian pada dasarnya Dana Perimbangan sebagian besar menunjukkan kapasitas fiskal suatu daerah. Peningkatan pendapatan daerah yang signifikan adalah berasal dari propinsi dana perimbangan.

Karena kontribusi Dana Perimbangan demikian besar dan transmisinya terlebih dahulu dikumpulkan oleh pusat atau propinsi dan kemudian baru disalurkan, maka dalam hal perencanaan anggaran Kota Bandung dan kabupaten-kota lainnya tentu saja mengalami kesulitan estimasi anggaran. Dampak selanjutnya adalah keterbatasan gerak dalam menyusun perencanaan program pada tahun berikutnya.

Peningkatan pendapatan daerah berkaitan dengan pertumbuhan aktivitas masyarakat atau pertumbuhan ekonomi, atau tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipandang sebagai revenue capacity. Semakin meningkat ekonomi suatu daerah maka potensi pendapatan daerah juga meningkat, baik langsung ataupun tidak langsung. Untuk memproyeksikan perkiraan pendapatan Pemerintah Kota Bandung, maka terlebih dahulu dianalisis kemungkinan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Seperti pada gambar berikut.



Grafik 4. Perkiraan Kenenderungan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung

Berdasarkan kecenderungan di atas selanjutnya ditetapkan dua sekenario, yaitu i) perekonomian tumbuh normal ii) perekonomian tumbuh sesuai target. Pola pesimis tidak dihitung dalam sekenario, dengan asumsi kinerja aparat akan semakin efektif dan efesiensi bersamaan dengan dilakukannya tahapan reformasi birokrasi. Berikut ini adalah sekenario perkiraan Pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan Kota Bandung dalam dua sekenario.

Tabel 4.1 Perkiraan pertumbuhan ekonomi **Normal** dan perkiraan pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2013 (Milyar Rp)

Tahun	PDRB Normal	Pendapatan	PAD	Perimbangan
2006	43,491	1,398	254	1,140
2007	51,312	1,686	288	1,097
2008	57,398	1,755	328	1,246
2009	64,433	1,933	361	1,572
2010	71,467	2,144	400	1,744
2011	78,502	2,355	440	1,916
2012	85,537	2,566	479	2,087
2013	92,572	2,777	518	2,259

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 4.2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi menurut Target dan Perkiraan Pendapatan, PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2013 (Milyar Rp)

Tahun	PDRB Tinggi	Pendapatan	PAD	Perimbangan
2006	43,491	1,398	254	1,140
2007	51,312	1,686	288	1,097
2008	58,496	1,755	328	1,246
2009	66,685	2,001	373	1,627
2010	76,021	2,281	426	1,855
2011	86,664	2,600	485	2,115
2012	98,797	2,964	553	2,411
2013	112,628	3,379	631	2,748

Sumber : Hasil Analisis

Perkiraan pendapatan , PAD dan Dana Perimbangan ditentukan menurut asumsi revenue capacity Pemerintah Kota Bandung sebesar 3% dari PDRB, PAD capacity sekitar 0,56% dan Dana Perimbangan sekitar 2,44% dan PDRB. Rasio ini di Kota Bandung menunjukan angka yang semakin menurun, bila pada tahun 2003 sebesar 4,02%, maka pada tahun 2007 menjadi 3,29% karena itu perkiraan revenue capacity sebesar 3% dari PDRB termasuk pendapatan yang relatif berhati-hati, mengingat potensi ketidakpastian perekonomian bersamaan dengan kerisis ekonomi global.

Pada pencapaian tingkat ekonomi yang lebih tinggi, maka potensi pendapatan juga lebih tinggi, sehingga menurut target , Pendapatan tahun 2013 diperkirakan Rp.3.379 Milyar, terdiri dari PAD Rp. 631 Milyar dan Dana Perimbangan Rp. 2.748 Milyar. Sedangkan apabila tingkat ekonomi lebih rendah, maka potensi pendapatan juga lebih tinggi, sehingga menurut target, Pendapatan tahun 2013 diperkirakan lebih rendah, yaitu Rp. 2.777 Milyar, terdiri dari PAD Rp. 518 Milyar dan Dana Perimbangan Rp. 2.259 Milyar.

Untuk mewujudkan pencapaian penerimaan daerah, maka ada beberapa langkah strategis, yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan investasi di Kota Bandung, sehingga basis penerimaan (revenue capacity) mengalami peningkatan. Upaya ini relatif lebih memperingan beban masyarakat daripada melalui upaya peningkatan tarif berbagai sumber PAD;
2. Optimasi manajemen pendapatan daerah, diantaranya adalah melalui koondisi pemanfaatan data basis sumber PAD serta penilaian kembali atas sumber tersebut. Penggunaan sistem informasi dapat membantu efektifitas dan efisiensi manajemen pendapatan daerah.
3. Optimalisasi aset daerah, Dilakukan melaui klasifikasi aset menurut potensi ekonominya, kemudian dipilih bentuk-bentuk pengelolaannya, misalnya dikelola sendiri, dikerjasamakan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang juga

memiliki aset dalam jumlah besar di Kota Bandung. Pada dasarnya pengelolaan aset ini dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi Kota Bandung di masa depan.

- 4. Advokasi Dana Perimbangan dilakukan melalui upaya-upaya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat, terutama pada sumber-sumber dana perimbangan serta potensi dan perimbangan yang selama ini belum diganti.

4.2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem penganggaran maupun akuntansi. Sesuai dengan reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan Belanja Langsung per kapita di Kota Bandung , dapat diperkirakan kebutuhan Belanja Langsung dari Tahun 2009-2013. Bila kebutuhan Belanja Langsung tersebut dipersentasikan terhadap perkiraan APBD Kota Bandung Tahun 2009-2013, maka adanya kecenderungan persentase Belanjua Langsung semakin meningkat. Artinya perhatian Pemerintah Kota Bandung terhadap Pembangunan Kota semakin meningkat, seperti yang diamanatkan dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Tabel 4.3 Kebutuhan Belanja Langsung APBD Kota Bandung (Milyar RP)

Tahun	Belanja Langsung	Normal (%)	Target (%)
2005	316	28.2	28.2
2006	354	25.4	25.4
2007	750	44.5	44.5
2008	878	50.1	50.1
2009	1,036	53.6	51.8
2010	1,273	59.4	55.8
2011	1,492	63.4	57.4
2012	1,697	66.1	57.3
2013	1,891	68.1	56.0

Sumber : Hasil Analisis

Kebutuhan Belanja Langsung di atas bersifat indikatif dan mensyaratkan beberapa hal yang penting untuk dipenuhi, termasuk juga pengelolaan Belanja Tidak Langsung yang sebenarnya lebih mudah untuk diprediksi.

Strategi Pengelolaan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Belanja Tidak Langsung melalui perencanaan anggaran dan sistem akuntansi yang baik. Belanja Tidak Langsung harus sebaik mungkin dapat diprediksi dan dilakukan secara konsisten sehingga mengurangi percampuran alokasinya dengan Belanja Langsung ;
2. Optimalisasi Belanja Langsung. Dilakukan dengan memastikan lokasi dan sasaran pembangunan, satuan biaya yang tepat, dan secara umum meningkatkan peran perencanaan, pemantauan program dan kegiatan. Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinergitas antar SKPD dalam menangani suatu masalah;
3. Menetapkan program prioritas dan menggunakan tolok ukur kinerja yang jelas;
4. Secara umum dalam setiap aspek selalu berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan upaya yang sungguh-sungguh.

4.2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal ini terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang. Bantuan modal dan transfer dana cadangan.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal ini terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, yaitu dengan :

1. Optimalisasi sumber tetap pendapatan Pemerintah Kota Bandung;
2. Memfasilitasi stakeholders dalam mengalokasikan dana mereka (misalnya corporate social responsibility) dan lain-lain agar terdapat saran;
3. Mendorong dunia perbankan untuk mengalokasikan kredit pada usaha-usaha produktif di Kota Bandung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi;
4. Stimulasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya dengan alokasi dana langsung di tingkat kelurahan;
5. Inisiasi penerbitan obligasi Pemerintah Kota Bandung;
6. Penyehatan BUMD agar memberikan kontribusi signifikan pada pemerintah daerah.

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAN AGENDA PRIORITAS

5.1 INDIKATOR UMUM

Indikator umum adalah sejumlah indikator makro yang akan dicapai pada tahun 2009 – 2013, indikator ini terutama mengacu pada PP.No 6 Tahun 2008, dengan indikator hasil akhir. Tujuan Otonomi Daerah adalah peningkatan kualitas manusia yang diukur dengan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mengacu pada RPJPD Kota Bandung Kota Bandung tahap-II, Tahun 2005-2025, maka target pencapaian IPM sampai akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan sebesar 92,78;
2. Indeks Kesehatan sebesar 81,55;
3. Indeks Daya Beli 68,88;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,07 atau penduduk Kota Bandung secara umum tergolong dalam kesejahteraan tinggi.

Selain itu beberapa indikator makro strategis yang ingin dicapai antara lain :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 9,33;
2. Pemerataan pendapatan kategori sedang (15%-versi Bank Dunia);
3. Pendapatan (PDRB) perkapita Rp. 16.000.000,-/tahun (rill tahun dasar 2000)
4. Pengangguran terbuka 15%

5.2 AGENDA PRIORITAS

Agenda Prioritas diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain.

Secara umum untuk Tahun 2009-2013 akan dilakukan berbagai macam program pembangunan. Dengan mempertahankan substansi program-program yang sudah belanja pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan kampanye Walikota, maka disusun 7 (tujuh) Agenda Prioritas untuk Tahun 2009-2013. Adapun 7 (tujuh) agenda tersebut adalah :

1. Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (**Bandung Cerdas**), melalui bantuan Walikota untuk Pendidikan (*Bawaku Sekolah*);
2. Memantapkan kesehatan warga Kota Bandung (**Bandung Sehat**), melalui Bantuan Walikota untuk Kesehatan (*Bawaku Sehat*);
3. Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (**Bandung Makmur**), diantaranya dengan :
 - Bantuan Walikota untuk Kemakmuran (*Bawaku Makmur*)
 - Bantuan Walikota untuk Ketahanan Pangan (*Bawaku Pangan*)
 - Bantuan Walikota untuk Penduduk Lanjut Usia (*Bawaku Lansia*) melalui Gerakan Sayang Orang Tua (Gerakan Nyaaah Ka Kolot) yang terdiri dari: Bina Perumahan, Bina Usaha dan Bina Lingkungan (Benah Imah, Benah Usaha, Benah Lingkungan).
4. Memantapkan Pembangunan Kota Bandung Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (**Bandung Hijau dan Harmonis**). Yang dimaksud dengan Bandung Hijau dan Harmonis adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam memantapkan pembangunan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh 5 gerakan:
 - i) Penghijauan dan Hemat serta Menabung Air;
 - ii) Cikapundung Bersih
 - iii) Sejuta Bunga Untu Bandung
 - iv) Udara Bersih
 - v) Gerakan Pembibitan, Penanaman,
5. Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (**Bandung Kota Seni Budaya**);
6. Meningkatkan Persentasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (**Bandung Berprestasi**);
7. Memantapkan toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (**Bandung Agamis**).

Bersamaan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas tersebut dilakukan juga upaya peningkatan kinerja aparat menuju *Good Governance* dengan melanjutkan tahapan **Reformasi Birikrasi** yang akan dilaksanakan melekat pada pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas tersebut.

Reformasi birokrasi dimaksud adalah upaya yang sistematis, terpadu dan konferhensif yang ditunjukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk melakukan perubahan pola pikir (*Mind Setting*), budaya (*Cultural Setting*) dan peningkatan kopetensi dan profesionalisme aparatur melauai penataan aparatur dan manajemen pemerintah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mutlak harus dilaksanakan pada setiap peranan melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Reformasi yang dilakukan merupakan perubahan tatanan yang lebih baik bukan perubahan secara parsial. Dengan demikian tidak semua perubahan

dapat dikategorikan sebagai reformasi. Kriteria reformasi hanya dapat disandangkan apabila terjadi perubahan sistematis dan terencana (*systematic and planned change*) yang diarahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan *outcomes* yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2003-2008 adalah restrukturisasi birokrasi. Selanjutnya kelanjutan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2009-2013 merupakan tahapan pemantapan serta tahun 2003-2008 dilakukan strukturisasi. Untuk itu tahapan pemantapan ini dibagi menjadi beberapa tahapan rinci setiap tahun, yaitu :

1. Tahun 2009: Institusionalisasi;
2. Tahun 2010: Pertumbuhan ;
3. Tahun 2011: Pengembangan;
4. Tahun 2012-2013: Percepatan –Pemantapan (Pemantapan Akhir)

Adapun Isu-isu strategis birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Penataan Kelembagaan (*Institutional reform*)
3. Penerapan Pola Pelayanan Satu Pintu;
4. Optimalisasi Potensi Pendapatan;
5. Peningkatan Investasi;
6. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*E-Government*).

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini adalah terciptanya birokrasi bermartabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Birokrasi bermartabat adalah sosok birokrasi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Bandung yang memiliki karakteristik sebagai berikut: Bersih dalam arti bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik; Taat dalam arti birokrasi yang memahami dan menaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah; Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel V.1
Indikator Kinerja Agenda Prioritas

Agenda Prioritas	Indikator Capaian	Target Capaian 2013
Bandung Cerdas	Indeks Pendidikan	92,78
	RLS	12 Tahun
	AMH	99,08%
Bandung Makmur	LPE	9,33%
	Tingkat Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Minimal 15% (kategori sedang)
	PDRB Rill/kapita	Minimal Rp.16 juta per tahun
	Indeks Daya Beli	68,88
	Tingkat pengangguran terbuka	15%
Bandung Sehat	Indeks Kesehatan	81,55
	Angka harapan hidup	74 Tahun
	Angka kematian bayi	31/1000 kelahiran
	Jumlah Kematian ibu melahirkan	12 orang/tahun
Bandung Kota Seni Budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan komunitas seni dan budaya dalam rangka pelestarian seni dan budaya secara profesional dan berkesinambungan	
	Meningkatkan sikap toleransi dan kerukunan antara umat beragama	
Bandung Agamis	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agamanya dan keyakinan masing-masing	
	Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	
Bandung Berprestasi	Meningkatnya prestasi Cabang Olah Raga	
Bandung Hijau	Ruang terbuka hijau publik dan private yang efektif menunjang fungsi hidrologi	16% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konserfasi dan RTH lainnya)
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2000	83 SKPD

5.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang kan dilaksanakan pada Tahun 2009-2013 Indikator ini dikelompokkan menurut misi. Pada dasarnya indikator ini adalah indikator-indikator sasaran guna mencapai indikator umum yang telah di sebutkan sebelumnya. Daftar program dan indikatornya dapat dilihat pada matrik berikut ini.

MISI – 1

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berahlak, Profesional, dan Berdaya Saing

Tujuan Misi : 1. Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
<p>IPM : 77,8 pada Tahun 2008 menjadi 81,07 pada tahun 2013 INDEKS KESEHATAN : 80,79 pada tahun 2008 menjadi 81,55 pada tahun 2013</p> <p>USIA HARAPAN HIDUP : 77,39 tahun pada tahun 2008 menjadi 74 tahun pada tahun 2013</p> <p>ANGKA KEMATIAN BAYI dari 181 orang pada tahun 2008 menjadi : 31/1000 kelahiran hidup pada tahun 2013</p> <p>JUMLAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN : 20 orang/tahun pada tahun 2008 menjadi 12 orang/tahun</p> <p>FASILITAS KESEHATAN, 60% pada tahun 2008 menjadi 80% memenuhi SPM kesehatan pada tahun 2013</p>	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin; Pelayanan Kesehatan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja, lansia; Pelayanan Kesehatan Khusus; Peningkatan akses dan mutu pelayanan keehatan rujukan	1. Indeks Kesehatan	80,79	80,85	80,05	80,25	80,45	80,55	Terlayannya masyarakat miskin yang berobat di Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas III
			2. Usia Harapan Hidup (UHH)	73,39 tahun	tahun	tahun	tahun	Tahun	tahun	
			3. Status Balita dengan Gizi Buruk	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	
			4. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kelas III yang dijamin oleh Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS) di masyarakat dan meningkatkan Upaya Kesehatan Beersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. PHBS Rumah Tangga	40.60%	46.48%	47.36%	48.23%	49.12%	50.00%	
			2. UKBM Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit, dan Lingkungan Sehat	1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, tidak menular, serta inspeksi lingkungan sehat.	1. Cakupan Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	126 Kelurahan	128 Kelurahan	130 Kelurahan	132 Kelurahan	134 Kelurahan	136 Kelurahan	Target tidak bisa 100% karena vaksin campak masih tergantung pada Departemen Kesehatan
			2. Inspeksi Tempat-Tempat Umum (TTU)	86.99%	87.19%	87.39%	87.60%	87.70%	88.00%	
	4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan Obat, bahan dan alkes; Pengawasan dan pengendalian keamanan obat, pangan, bahan berbahaya serta NAPZA	1. Terpenuhinya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikat.	50%	55%	60%	65%	70%	75%	
	5. Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Manajemen Kesehatan	1. Pengembangan, Pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan	1. Rumah Sakit yang terakreditasi	7 RS	9 RS	11 RS	13 RS	15 RS	17 RS	
			2. Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD)	7 Puskesmas	7 Puskesmas	8 Puskesmas	9 Puskesmas	10 Puskesmas	11 Puskesmas	
			3. Fasilitas kesehatan melaksanakan SPM	21 Puskesmas	21 Puskesmas	30 Puskesmas	39 Puskesmas	48 Puskesmas	57 Puskesmas	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
	6. Program Keluarga Berencana	1. Peningkatan kualitas pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terutama KB pria dan Keluarga Miskin	1. Cakupan Pa/PUS	69.91%	70.75%	71.60%	72.45%	73.30%	74.15%	
			2. Meningkatkan kemandirian ber KB	73.59%	74.12%	74.65%	75.18%	75.71%	76.25%	
			3. Meningkatkan cakupan peran pria	1.50%	1.80%	2.10%	2.40%	2.70%	3%	
			4. Cakupan Pa/PUS Gakin	59.82%	62.85%	65.89%	68.92%	71.96%	75%	
	7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Peningkatan akses dan fasilitas para remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja	1. Rata-rata Usia Kawin pertama bagi Wanita (tahun)	19,7	19,86	20,02	20,18	20,34	20,51	
	8. Program Pemberdayaan Keluarga	1. Peningkatan cakupan keaktifan keluarga yang memiliki anak balita, remaja, dan lansia	1. Partisipasi Bina Kemuarga Balita	13.36%	16.69%	20.02%	23.35%	26.68%	30.01%	
			2. Partisipasi Bina Keluarga Remaja	3.98%	6.16%	8.39%	10.59%	12.80%	15%	
			3. Partisipasi Bina Keluarga Lansia	16.83%	17.46%	18.10%	18.73%	19.73%	20%	
			4. Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi (Alek) dalam Poktan UPPKS	12.81%	21.30%	29.80%	38.29%	46.79%	55.28%	
	9. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Peningkatan mutu kualitas KIE terhadap masyarakat tentang keluarga	1. Rata-rata Jumlah jiwa dalam keluarga (orang)	4,20	4,14	4,07	4,01	4	4	
		2. Peningkatan masyarakat institusi masyarakat terhadap pengelolaan program KB	2. Institusi masyarakat pengelolaan Program KB aktif	60.83%	66.45%	72.07%	77.69%	83.31%	88.91%	
	10. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Mikro Keluarga	1. Peningkatan pelayanan informasi Keluarga, KB, dan individu yang baik dan akurat	1. RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, memiliki data mikro keluarga	78.57%	81.90%	85.23%	88.56%	91.89%	95.22%	
			2. Cakupan laporan Pelayanan Kontrasepsi/Pengendalian Lapangan	87.40%	89.57%	91.74%	93.91%	96.08%	98.05%	
Tujuan Misi : 2. Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Cerdas)										
INDEKS PENDIDIKAN : 88,70 pada tahun 2008 menjadi 92,25 pada tahun 2013 RLS : 10,52 tahun pada tahun 2008 menjadi 12 tahun pada tahun 2013	1. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidkan	1. Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	1. Capaian RLS	10,59 tahun	10,68 tahun	11,01 tahun	11,34 tahun	11,67 tahun	12 tahun	APK di atas termasuk
	2. Program Wajar	1. Meningkatnya Angka	1. Prosentase APK SD/MI	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	131,05%	

http://www.bphn.go.id/

<http://www.bphn.go.id/>

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
<p>AMH : 99,50% pada tahun 2008 menjadi 99,88% pada tahun 2013</p> <p>APKSD/SEDERAJAT 131,65% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p> <p>APKSMP/SEDERAJAT 116,16% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p> <p>APKSMA/SEDERAJAT 98,51% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p> <p>APMSD/SEDERAJAT 123,13% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p> <p>APMSMP/SEDERAJAT 99,44% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p> <p>APMSMA/SEDERAJAT 75,91% pada tahun 2008 menjadi 100% pada tahun 2013</p>	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Partisipasi Kasar (APK) SD/MI formal.								didalamnya siswa dari luar kota Bandung
				< 100%	100%	100%	100%	100%	100%	APK 100% khusus Kota Bandung
		2. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	1. Prosentase APK SD/MI	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	123,13%	
				< 100%	100%	100%	100%	100%	100%	APK di atas termasuk didalamnya siswa dari luar kota Bandung
		3. Meningkatkan APK SMP/MTs	1. Prosentase APK SMP/MTs	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	116,16%	APK 100% khusus Kota Bandung
				< 100%	100%	100%	100%	100%	100%	APK di atas termasuk didalamnya siswa dari luar kota Bandung
		4. Meningkatkan APM SMP/MTs	1. Prosentase APM SMP/MTs	99,4%	100%	100%	100%	100%	100%	APK 100% khusus Kota Bandung
				< 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	1. Prosentase Anak Putus Sekolah SD/MI	0.02%	0.01%	0%	0%	0%	0%	APK 100% khusus Kota Bandung
		6. Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs	1. Prosentase Anak Putus Sekolah SMP/MTs	0.10%	0.08%	0.06%	0.04%	0.02%	0%	
		7. Peningkatan Akses layanan Pendidikan bagi keluarga tidak mampu.	1. Sekolah Gratis	20%; 224 (SD/MI)	100% (SD/MI)	100% (SD/MI)	100% (SD/MI)	100% (SD/MI)	100% (SD/MI)	Sekolah gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
			2. Sekolah Gratis	20%; 51 (SMP/MTs)	100% (SMP/MTs)	100% (SMP/MTs)	100% (SMP/MTs)	100% (SMP/MTs)	100% (SMP/MTs)	Sekolah gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
			3. Beasiswa bagi keluarga tidak mampu	99,44%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Program Pendidikan Menengah.	1. Peningkatan APK SMA/MA/SMK	1. Prosentase APK SMA/MA/SMK	98,51%	100%	100%	100%	100%	100%	Target 100% khusus Kota Bandung
		2. Peningkatan APM SMA/MA/SMK	1. Prosentase APM SMA/MA/SMK	75,51%	91,9%	95,9%	96,16%	98,14%	100%	Target 100% khusus Kota Bandung
		3. Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	1. Prosentase Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,10%	0%	
		4. Pengembangan sekolah kejuruan sesuai kompetensi daerah da kebutuhan lapangan kerja	1. Peningkatan Pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif	20%	25%	35%	45%	55%	65%	Pross Pendidikan dan Pelatihan di SMK mengacu kepada pendidikan kewirausahaan uang berbasis industri kreatif

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
			2. Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Program Pendidikan Non Formal/PAUD	1. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH)	1. Prosentase AMH	99.50%	99,97%	99.99%	100%	100%	100%	
		2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatnya akseibilitas pendidikan non formal (kejar paket A,B,C) & PAUD	20%	25%	35%	45%	55%	65%	Dari seluruh warga yang memerlukan layanan pendidikan nonformal /PAUD
	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Rehabilitasi total :	Rusak Total						
			SD/MI	30	30	0	0	0	0	
			SMP/MTs	17	17	0	0	0	0	
			SMA/SMK/MA	2	2	0	0	0	0	
			2. Rehabilitasi Berat :	Rusak Berat						
			SD/MI	268	268	0	0	0	0	
			SMP/MTs	29	29	0	0	0	0	
			SMA/SMK/MA	6	6	0	0	0	0	
			3. Rehabilitasi Sedang:	Rusak Sedang						
			SD/MI	241	241	0	0	0	0	
			SMP/MTs	28	28	0	0	0	0	
			SMA/SMK/MA	18	18	0	0	0	0	
			4. Rehabilitasi Ringan:	Rusak Ringan						
			SD/MI	1157	357	800	0	0	0	Diupayakan pemeliharaan rutin secara kesinambungan
			SMP/MTs	243	93	150	0	0	0	
			SMA/SMK/MA	224	74	150	0	0	0	
		2. Peningkatan Kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Terbangunnya Ruang kelas Baru :	Kebutuhan RKB						
			SD/MI	605	55	100	100	150	200	
			SMP/MTs	143	20	30	30	30	33	
			SMA/SMK/MA	108	18	20	20	20	30	
			2. Pembangunan Unit sekolah baru (SMA/SMK) :		1	1	1	1	1	
		3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan (Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Kepala Sekolah dan Guru, Sanitasi Sekolah serta sarana penunjang lainnya)	1. SD/MI	21%	30%	40%	50%	65%	80%	Seiring dengan program Merger dan Regrouping
			2. SMP/MTs	50%	55%	60%	70%	80%	90%	
			3. SMA/SMK/MA	65%	70%	75%	80%	85%	95%	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
	6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pelayanan Kependidikan	1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan Kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	20%	25%	50%	75%	80%	100%	Dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1
			2. Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik	20%	25%	50%	75%	80%	100%	
	7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Peningkatan Mutu pelayanan penyelenggaraan pendidikan	1. Manajemen pelayanan pendidikan	84%	88%	91%	94%	96%	98%	
			2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan UAN/UAS	85%	87%	90%	92%	94%	96%	
			Tingkat kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat kelulusan SMP/MTs	99,96%	99,97%	99,98%	99,99%	100%	100%	
			Tingkat kelulusan SMA/MA/SMK	99%	99,2%	99,4%	99,6%	99,7%	99,8%	
			3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan PSB.	85%	90%	92%	94%	96%	99%	Tersalurkannya siswa baru sesuai dengan aturan yang berlaku
			4. Merger dan Regrouping SD Negeri	640	300	550	500	400	300	
	8. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan	1. Pengadaan buku-buku perpustakaan masyarakat	12000 judul	13000 judul	15000 judul	18000 judul	22000 judul	27000 judul	
				24000 eksemplar	26000 eksemplar	30000 eksemplar	36000 eksemplar	44000 eksemplar	54000 eksemplar	
			2. Pengadaan buku-buku perpustakaan sekolah	29%	40%	55%	66%	77%	100%	
			3. Terwujudnya Gedung Perpustakaan yang representatif	-	-	100%	100%	100%	100%	
			4. Peningkatan pemberdayaan perpustakaan umum dan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK) dan Perpustakaan Elektronik Keliling (Pusteling)	3 MUPK; Pusteling ;	3 MUPK; Pusteling ;	5 MUPK; 1 Pusteling ;	5 MUPK; 1 Pusteling ;	7 MUPK; 1 Pusteling ;	7 MUPK; 3 Pusteling ;	
		2. Peningkatan SDM pengelola perpustakaan	1. Prosentase peningkatan jumlah SDM pengelola perpustakaan	20%	36%	52%	68%	84%	100%	
			2. Jumlah Pustakawan yang mengikuti Diklat Nasional	-	-	5 pustakawan	10 pustakawan	15 pustakawan	19 pustakawan	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Tujuan Misi : 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia (Agenda Prioritas Bandung Agamis)										
1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama sesuai dengan Agama dan Keyakinan masing-masing	1. Program Pengembangan Iklim Religius, Lingkungan Agamis, dan Aktivitas Sosial Keagamaan	1. Peningkatan Pemahaman & Pengamalan Agama serta peningkatan lingkungan agama	1. Terselenggaranya perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan sarana ibadah di tempat umum.	40%	50%	60%	70%	80%	90%	
			2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah di tempat umum dan kantor pemerintah	20%	30%	40%	50%	60%	70%	
			3. Sosilaisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan serta kualitas lingkungan peribadatan	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
2. Meningkatkan Sikap Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	1. Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	1. Peningkatan Kerjasama Antar Umat Beragama	1. Peningkatan kerjasam antara pemeluk agama dalam pembangunan kota	20%	30%	40%	50%	60%	70%	
Tujuan Misi : 4. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara										
1. Meningkatkan pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender	1. Perempuan sebagai tenaga kerja	47,27%	50%	54%	58%	66%	70%	Dari 277.153 angkutan kerja yang bekerja
			2. Perempuan dalam angkatan kerja	28,27%	32%	34%	36%	38%	40%	Dari 396.719 angkutan kerja
			3. Pekerja perempuan non pertanian (rasio)	30%	32%	34%	36%	38%	40%	
		2. Meningkatnya indeks pembangunan gender	1. Anggota harapan hidup laki-laki	73,12 thn	73,79	73,56	73,72	73,68	74	
			2. Angka harapan hidup perempuan	73,56 thn	73,56	73,60	73,72	73,86	74	
			3. Rata-rata lama sekolah laki-laki	10,60 thn	10,68	11,61	11,34	11,67	12	
			4. Rata-rata lama sekolah perempuan	10,40 thn	10,68	11,61	11,34	11,67	12	
			5. Angka melek hidup laki-laki	99,64%	99,67%	99,70%	99,76%	99,82%	99,88%	
			6. Angka melek hidup perempuan	99,46%	99,67%	99,70%	99,76%	99,82%	99,88%	
2. Meningkatnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan	1. Peningkatan pengetahuan dan kawasan tentang	1. Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT.	-	1 Kepwal	-	1 Perda	-	-	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
	Kualitas Anak dan Perempuan	kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan.	Trafficking, dll)							
	2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Peningkatan perlindungan dan keterampilan bagi perempuan dan anak	1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan	40	50	60	70	80	90	Dari 200 orang
			2. Mewujudkan Bandung sebagai Kota "Layak Anak"	30	40	50	60	70	80	Dari 200 orang
	3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan	1. Organisasi/LSM/Peduli Perempuan dan Hak-Hak Anak	1. Meningkatkan kapasitas dan jaringan Kelembagaan PUG dan anak	26 Gender Focal Point (GFP)	26 Gender Focal Point (GFP)	26 Gender Focal Point (GFP)	26 Gender Focal Point (GFP)	26 Gender Focal Point (GFP)	26 Gender Focal Point (GFP)	
				182 Satgas PUG	182 Satgas PUG	182 Satgas PUG	182 Satgas PUG	182 Satgas PUG	182 Satgas PUG	
			2. Terbentuknya Forum Peduli Anak (FPA)	30 FPA	30 FPA	30 FPA	-	-	-	

MISI – 2

Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota

Tujuan Misi : 1. Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Makmur)

Tujuan Misi : 2. Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing

Tujuan Misi : 3. Mewujudkan Kerjasama dengan Daerah Lain

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan LPE 9,33% dari 8,29% pada tahun 2008 - Peningkatan Indeks Daya Beli = 68,88 dari 64,27 tahun 2008 - PDRB per kapita ADHK Rp. 16 juta dari Rp. 11.930.753 - Nilai investasi berskala nasional meningkat 20% - Penurunan tingkat inflasi umum satu digit dari 10,23% (s.d triwulan IV Thn 2008) - Tingkat Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia 15% (kategori sedang) 			Laju pertumbuhan ekonomi	8,28%	8,50%	8,71%	8,92%	9,13%	9,33%	
			Indeks daya beli	64,27	65,19	66,11	67,03	67,95	68,88	
			PDRB perkapita ADHK (Juta Rupiah)	11,9	12,7	13,5	14,3	15,1	16	
	1. Program Peningkatan Investasi	1. Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi (Rp)	4.000.516.852.345	4,4 Triliyun	4,9 Triliyun	5,4 Triliyun	5,9 Triliyun	6,4 Triliyun	
	Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1. meningkatnya jumlah pelaku usaha	1. Meningkatkan jumlah unit usaha yang berdaya saing	2.800	3.080	3.388	3.727	4.100	4.510	
		2. Meningkatnya Nilai Ekspor	1. Nilai Ekspor (Rp)	696.365.237.000	714 Milyar	732 Milyar	750 Milyar	769 Milyar	788 Milyar	
		3. Meningkatnya jumlah sentra-sentra industri potensial	1. Perkembangan jumlah sentra	9	10	11	12	13	14	
		4. Meningkatnya Unit Usaha industri kecil dan menengah	1. Jumlah unit usaha	3.665	3.680	3.695	3.710	3.725	3.749	
		5. Meningkatnya Volume pemasaran hasil usaha pertanian	1. Peningkatan % Volume pemasaran produk pertanian dari : - Peternakan - Tanaman Pangan - Perikanan	15.600 Kg 1.850 Kg 104.000 Kg	16.458 Kg 1.955 Kg 110.032 Kg	17.363 Kg 2.066 Kg 116.414 Kg	18.318 Kg 2.184 Kg 123.166 Kg	19.325 Kg 2.308 Kg 130.310 Kg	20.388 Kg 2.439 Kg 137.868 Kg	
		6. Meningkatnya poduksi pertanian	1. Produktifitas komoditas pertanian - Padi - Palawija - Hartikultura - Tanaman Hias	58,1 kw/ha 60,7 kw/ha 89,7 kw/ha 125.000 pot/thn	61 kw/ha 60,7 kw/ha 98,18kw/ha 131.000 pot/thn	61 kw/ha 60,7 kw/ha 98,88kw/ha 137.000 pot/thn	61 kw/ha 60,7 kw/ha 103,82kw/ha 143.000 pot/thn	61 kw/ha 60,7 kw/ha 109,01kw/ha 149.000 pot/thn	61 kw/ha 60,7 kw/ha 114,46kw/ha 155.000 pot/thn	
		7. Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi ikan konsumsi 2. Peningkatan produksi ikan hias	1.996 ton 221.700 ekor	2.095 ton 321.700 ekor	2.200 ton 421.700 ekor	2.310 ton 521.700 ekor	2.425 ton 621.700 ekor	2.500 ton 721.700 ekor	
		8. Meningkatnya produksi ternak	1. – sapi = 413 ekor - Domba = 20.819 ekor	356 ekor 20.319 ekor	371 ekor 20.419 ekor	386 ekor 20.519 ekor	401 ekor 20.619 ekor	416 ekor 20.719 ekor	431 ekor 20.819 ekor	

<http://www.bphn.go.id/>

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
		9. Meningkatnya koperasi yang sehat	1. Jumlah Unit Koperasi Sehat	180 Unit	250 Unit	300 Unit	350 Unit	400 Unit	450 Unit	
		10. Meningkatnya Revitalisasi Pasar Tradisional	1. Jumlah pasar yang di revitalisasi	20 Pasar (Psr. Baru, Psr. Andir, Psr. Ciroyom, ITC II, Psr. Cicadas, Psr. Pagarsih, Psr. Leuwipanjang, Psr. Karapitan, Psr. Cimol Gedebage, Psr. Banceuy, Psr. Parnoyanan, Psr. Cihapit, Psr. Sarijadi, Psr. Ciwastra, Psr. Sadang Serang, Psr. Kembang Wastukencana, Psr. Kebon Sirih, Psr. Cikaso, Psr. Balubur, Psr. Gedebage)	26 Pasar (Psr. Cijerah, Psr. Banceuy, Psr. Balubur, Psr. Cihaurgeulis, Psr. Kiaracandong, Psr. Anyar)	22 Pasar (Psr. Sarijadi, Psr. Jatayu, Psr. Gegerkalong, Psr. Kebon Sirih, Psr. Cicaheum, Psr. Sadang Serang, Psr. Sederhana)	36 Pasar (Psr. Ujungberung, Psr. Jatayu, Psr. Simpang Dago)	40 Pasar (Psr. Sarijadi, TPU Gempol, Psr. Leuwipanjang, Psr. Palsari)	44 Pasar (Psr. Kosambi, TPU Kota Kembang, Psr. Sukahaji, TPU Gg. Saleh)	Revitalisasi pasar dapat dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan Swasta
		11. Formalisasi PKL	1. Meningkatkan status jumlah PKL menjadi pedagang formal	64.231	67.422	70.794	74.334	78.051	81.953	Pedagang formal, PKL mempunyai tempat dagang yang tetap, misalnya kios di pasar
		12. Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Jumlah rumah tangga miskin menurun	82.432 RTS	80.371	78.362	78.403	74.493	72.631	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Tercukupinya kebutuhan pangan (beras) bagi rumah tangga miskin	2. Persentase jumlah rumah tangga miskin yang dapat bantuan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap RTS mendapat bantuan 5 Kg/bln
Meningkatnya jumlah wisatawan 25% tahun 2008 Wisman = 4.193.715, winus = 228.868	Program Peningkatan Pariwisata	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1. Peningkatan jumlah wisatawan (jiwa) 2. Nusantara (jiwa) 3. Mancanegara (jiwa)	2.746.076 2.603.967 142.109	3.020.684 2.864.346 156.320	3.322.752 3.150.800 171.952	3.655.027 3.465.880 189.147	4.020.530 3.812.468 208.062	4.442.583 4.193.715 228.868	
Tingkat Pengangguran Terbuka 15%	Program Peningkatan Ketenagakerjaan	1. Meningkatnya produktivitas, kesempatan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	15,48%	15,40%	15,30%	15,20%	15,10%	15%	

MISI – 3

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat

Tujuan Misi : 1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Makmur)

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.	1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	1. Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga dalam pembangunan kesejahteraan sosial	1. Prosentase peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan sosial	50%	50%	60%	70%	80%	100%	Dari jumlah orsos yang ada (150 yayasan)
	2. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan di Kelurahan.	30%	40%	50%	60%	70%	80%	Dari Lembaga Kemasyarakatan yang harus ada di Kelurahan
			2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.	10%	15%	25%	50%	75%	100%	Dari Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat stimulan
		2. Pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan.	1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan	10%	25%	50%	75%	100%	100%	Dari Jumlah Lembaga Keuangan yang ada di Kelurahan
			2. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat Kelurahan.	40%	50%	60%	70%	80%	90%	Dari jumlah lembaga Keuangan yang ada di Kelurahan
			3. Pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.	15% (2 Kec, 10 Kel.)	20%	25%	30%	35%	40%	Dari jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan Misi : 2. Sinergitas Kelestarian Budidaya Lokal Antar Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat (Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya)

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan	1. Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah	1. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan, dan museum bagi pengembangan budaya daerah.	1. Meningkatnya upaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Dari jumlah kegiatan pembinaan terhadap pelaku budaya
			2. Meningkatnya pelestarian budaya lokal daerah.	10%	20%	40%	60%	80%	100%	Dari jumlah kegiatan pembinaan terhadap pelaku budaya
			3. Dukungan penghargaan kerjasama di bidang daerah	15%	20%	40%	50%	60%	70%	Dari jumlah budayawan yang diberi penghargaan
			4. Pelindungan bangunan cagar budaya	0%	0%	100%	100%	100%	100%	Berdasarkan persetujuan atas permohonan

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya		2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah	1. Penghargaan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah	30%	40%	50%	60%	80%vb	100%	Dari jumlah pengguna bahasa dan sastra daerah
			2. Peningkatan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	10%	20%	40%	50%	60%	70%	Dari jumlah kerjasama dengan daerah sekitar
			3. Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah	15%	20%	40%	50%	60%	80%	Dari jenis seni budaya
			4. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan peninggalan budaya	20%	40%	50%	60%	80%	100%	Dari jumlah peninggalan budaya yang dipelihara masyarakat
Tujuan Misi : 3. Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan Kota Bandung (Agenda Prioritas Bandung Berprestasi)										
	1. Progrsm Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. Prosentase peningkatan peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	40 %	55 %	65 %	75 %	85 %	90 %	Dari jumlah orang/lembaga kepemudaan
	2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pemuda dalam kewirausahaan	1. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	40 %	55 %	65 %	75 %	85 %	90 %	Dari anggota organisasi / lembaga kepemudaan
	3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah raga	1. Meningkatnya kemandirian manajemen olahraga	1. Peningkatan peran masyaakat dan sektor swasta dalam pengelolaan keolahragaan	40 %	55 %	65 %	75 %	85 %	90 %	Dari jumlah kelembagaan Olahraga yang dikelola oleh masyarakat/swasta
	4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Meningkatnya apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional	1. Prosentase peningkatan upaya revitalisasi olahraga masyarakat dan tradisional	40 %	55 %	65 %	75 %	85 %	90 %	Dari jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan olahraga
	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Tersedianya kawasan olahraga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olahraga	1. Kesediaan sarana olahraga masyarakat di tingkat kecamatan	20 Kec	20 Kec	30 Kec	30 Kec	30 Kec	30 Kec	Sarana olahraga masyarakat dan olahraga tradisional
			2. Pembangunan Stadion Utama Sepak Bola (SUS) di Bandung Timur	20 %	50 %	70 %	100 %	100 %	100 %	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN	
					2009	2010	2011	2012	2013		
Tujuan Misi : 4. Meningkatkan Kepedulian dan Kepekaan Masyarakat terhadap Lingkungan Sosial											
Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dalam mewujudkan Kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat Melaksanakan fungsi serta peran sisoalnya secara wajar	1. Jumlah penanganan kemandirian dan kesejahteraan sosial per tahun :								
			- Fakir Miskin	125	625	1,125	1,625	2,125	2,625	Jumlah 84,222 orang tahun 2008	
			- Penyandang cacat	30	90	140	200	250	300	Jumlah 10.200 oang tahun 2008	
			- Tuna Susila	60	120	180	240	300	360	Jumah 116 orang tahun 2008	
			- Anak Nakal Korban Narkotika	20	40	60	80	100	120	Jumlah 239 orang tahun 2008	
			- Wanita rawan sosial ekonomi	100	200	300	400	500	600	Jumlah 5.868 orang tahun 2008	
		2. Terlayannya, terlindunginya dan Tersantuninya PMKS dalam pemenuhan Kebutuhan hidupnya	1. Jumlah pemenuhan kebutuhan hidup :								
			- Lanjut Usia	144	300	450	600	750	900	Jumlah 2429 orang tahun 2008	
			- Anak Terlantar	450	900	1.350	1.800	2.250	2.700	Jumlah 6643 orang tahun 2008	
			- Korban Traficking dalam rumah tangga (KDRT)	40	80	120	160	200	240	Jumlah 40 orang tahun 2008	
		3. Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Tahapan Pembangunan Sarana penampungan PMKS	10%	10%	30%	50%	75%	100%	Baru tersedianya lahan panti	
	2. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Meningkatnya partisipasi sosial dan potensi suber kesejahteraan sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial, Masyarakat, dan Organsasi Sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial	1. Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial	60	75	90	105	120	135	Dari jumlah orsos yang ada (150 Yayasan)	
		2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional	1. Jumlah profesional pekerja sosial	35	50	60	70	80	100	Dari 100 Orang Pekerja Sosial	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
		3. meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial	1. Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial	15	15	22	30	30	30	Dari 30 Kecamatan
	3. Program penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat	1. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana	1. Buffstock berupa beras dan lauk pauk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dari 1 Ton Beras
		2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	1. Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan	50%	50	75	100%	100%	100%	Dari 100 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana)
	4. Program Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban	1. Terbinanya lembaga perlindungan masyarakat	1. Terselenggaranya pengamanan Pemilu dan Pilkada	100% Penyelenggaraan Pilkada	100% Pemilu	-	-	-	100% Pilkada	
			2. Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam keterlibatan dan keamanan	65%	70%	75%	85%	90%	100%	Dari 3.000 Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda
	5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Terbinanya sumber daya dan potensi perlindungan masyarakat	1. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan	60% dari 16000 anggota Hansip Linmas	65%	70%	75%	80%	90%	
Tujuan Misi : 5. Meningkatkan Mutu Kerjasama di antara Semua Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kota Bandung										
Memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media	1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	1. Tersebaranya informasi pembangunan daerah	1. Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media	55%	75%	100%	100%	100%	100%	30% melalui Musrenbang; 10% media elektronik; 15% media cetak

MISI – 4

Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan Misi : 1. Mewujudkan Kualitas Udara, Air dan Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
1. 25 % lokasi sample telah memenuhi baku mutu	11. Program Pengendalian Penanaman dan Perusakan Lingkungan Hidup	2. Terwujudnya kualitas air sungai dan anak sungai yang memenuhi baku mutu lingkungan	5. Meningkatnya kualitas air sungai dan anak sungai melalui pengendalian limbah cair dari sumber pencemar yang memenuhi baku mutu	250 sumber pencemar 14 sudah memenuhi baku mutu (5 %)	5.00 %	6.50 %	8.00 %	9.50 %	11.00 %	
2. 11 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BCD dan COD telah memenuhi baku mutu	12. Program Peningkatan Pengendalian Posisi	3. Terwujudnya kualitas udara yang memenuhi baku mutu lingkungan	6. Meningkatnya jumlah kendaraan yang memenuhi baku mutu	3.498 kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu	3.748	3.898	3.998	4.048	4.128	

Tujuan Misi : 2. Menjamin Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Air (Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Dalam)

Tujuan Misi : 5. Memantapkan Pembangunan Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Agenda Bandung Hijau)

1. Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 5.100 liter/detik.	1. Program Penyediaan Air Baku	1. Tersedianya air baku yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat Kota Bandung	1. Tersusunnya Masterplan Penyediaan air baku untuk system penyediaan air minum Kota Bandung	Kajian bersifat sektoral dan belum terintegrasi ± 30 %	5.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	Sesuai PP No. 16/2005 tentang SPAM, penyediaan air baku merupakan tanggungjawab Pemerintah
			2. Tersediaanya air baku dengan kapasitas 5.100 liter/detik	± 2.580 lt/det (air baku yang digunakan PDAM)	2.580 lt/det	3.000 lt/det (termasuk yg digunakan masyarakat)	3.500 lt/det	4.000 lt/det	5.100 lt/det	
	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya perlindungan dan konservasi SDA	1. Peningkatan ketersediaan kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan dalam) yang berkelanjutan	20470 sumur resepan	22000 sumur resepan	24500 sumur resepan	26300 sumur resepan	28000 sumur resepan	30000 sumur resepan	

<http://www.bphn.go.id/>

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) public dan privat yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebesar 16% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya).	1. Program rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Terwujudnya peningkatan pemilihan lahan kritis	1. Peningkatan tanaman produktif dalam rangka penurunan luasan lahan kritis	66350 pohon (60 Ha lahan kritis)	6000 Pohon	12000 Pohon	18000 Pohon	24000 Pohon	30000 Pohon	
	2. Program penyediaan sarana pembibitan RTH	1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembibitan dan bibit tanaman	1. Terwujudnya kebutuhan sarana prasarana untuk pemeliharaan RTH.	8 lokasi pemeliharaan tanaman untuk RTH	12 lokasi	13 lokasi	14 lokasi	15 lokasi	16 lokasi	
	3. Program penataan ruang terbuka public secara berkualitas	1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Terwujudnya kualitas dan kuantitas RTH di Kota Bandung	19 lokasi (tertata) dan 50 lokasi (terpelihara)	34 lokasi (tertata) dan 100 lokasi (terpelihara)	49 lokasi (tertata) dan 150 lokasi (terpelihara)	64 lokasi (tertata) dan 200 lokasi (terpelihara)	89 lokasi (tertata) dan 250 lokasi (terpelihara)	104 lokasi (tertata) dan 300 lokasi (terpelihara)	
	4. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1. Terwujudnya penambahan luasan RTH public dan private.	1. Peningkatan luasan RTH melalui penyerahan fasos/fasum perumahan dan pembebasan lahan.	Luas RTH ± 8.76 %	10.16 %	11.06 %	12.46 %	13.86 %	16.00 %	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Tujuan MISI : 3. Mewujudkan Pengelolaan Limbah Padat yang Efektif dan Bernilai Ekonomi										
1. 90 % sampah dapat dokelola (20% 3R dan 70% terbagi 30% TPA melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis dan 40% ke landfill)	1. Program peningkatan pengelolaan sampah perkotaan	1. Terwujudnya pengadaan sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1. Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan dengan pada 3R sebesar 20%	1.00 % (3 lokasi percontohan)	4.00%	8.00%	12.00%	16.00%	20.00%	Dengan penerapan 3R dan pengelolaan sampah berbasis teknologi, volume, sampah yang dibuang ke TPA diharapkan semakin berkurang
		2. Tertanganinya pengelolaan sampah sampai tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah	1. Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA Regional sebesar 40%	2500 M3/hari (62.19%)	62.19%	57.00%	51.00%	45.00%	40.00%	
		3. Terselenggaranya pengelolaan sampah dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	1. Terwujudnya pengelolaan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan ekonomis 30%.	0.00 %	0.00 %	5.00%	10.00%	20.00%	30.00%	
	2. Program optimalisasi Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Terbangunnya tempat pengomposan skala Kota	1. Terbangunnya sarana prasarana pengelolaan 3R skala Kota yang didukung penataan TPS dan sarana persampahan RW yang terintegrasi mulai dari sumber sampai TPA dan sinergi dengan arah pembangunan kota Bandung serta Metropolitan Bandung.	12.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
		2. Tertatanya TPA/TPS yang tidak berfungsi lagi	1. Merencanakan dan merevitalisasi TPA yang tidak berfungsi menjadi ruang politik dan social	25.0%	35.0%	50.0%	75.0%	90.0%	100.0%	Sesuai dengan UU No. 18/2008 pasal 44, pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan TPA dengan system pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU ini.
Tujuan MISI : 4. Menyediakan Ruang Kota yang Aman, Nyaman, produktif dan Berkelanjutan										
1. Minimum 30% kawasan pusat primer Gedebage terbangun dan semua pusat WP berfungsi efektif	1. Program perencanaan Tata Ruang	1. Rewujudnya perencanaan tata ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan yang sesuai dengan UU penataan ruang	1. Mewujudkan perencanaan tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang	60%	90%	100%	100%	100%	100%	Revisi terhadap Perda RTRW No. 3/2006 dan penyusunan/penetapan RDTR, RTRK, DED dan RTBL
	2. Program penataan bangunan dan bangun-bangunan	1. Tercapainya kualitas penataan bangunan dan bangun-bangunan	1. Mewujudkan 30 % kawasan pusat primer Gedebage	4 %	6 %	12 %	18 %	24 %	30 %	Secara bertahap telah dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, sungai serta pembebasan lahan
			2. Mewujudkan penataan penyelenggaraan reklame melalui perijinan (6000 reklame terdata)	5 %	15 %	25 %	50 %	75 %	100 %	Presentase reklame yang memiliki ijin terhadap jumlah reklame yang terdata

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
2. Tertibnya pelayanan perijinan	1. Program Pemanfaatan ruang	1. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib	75.00 %	80.00 %	85.00 %	90.00 %	95.00 %	100.00 %	
	2. Program pengendalian pemanfaatan ruang	1. Terkendalinya pemanfaatan ruang di Kota Bandung								
	3. Program pengembangan perumahan	1. Tersedianya pembangunan perumahan sehat, nyaman, dan terjangkau	Memfasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rusun Indal dan Cingised	FS Rusun	DED Rusun	Rencana pembangunan Rusun	Rencana pembangunan Rusun	Rencana pembangunan Rusun	Rencana Rusun Sadang Serang, Jamika, Tamansari, Braga dan Cicadas. Perlu didukung partisipasi pihak swasta dan Pemerintah Pusat.
Tujuan Misi : 6. Menyediakan Sistem Transportasi yang Aman, Efisien, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan										
1. Luas jalan minimal 3 % dari wilayah Kota (5.019 Km2) dan 100 % berkondisi baik	1. Program pembangunan jalan dan jembatan	1. Terpeliharanya kondisi jalan	Peningkatan pelayanan jalan sepanjang 222.712 M	63.425 M	42.712.M	87.712 M	132.712 M	177.712 M	222.712.M	Luas jalan Kota Bandung pada akhir tahun 2008 sebesar 4.946,92 KM2 sehingga masih kurang 73.08 KM2 atau dengan asumsi lebar jalan 7m , maka panjang jalan 10.440 KM
		2. Terbangunnya jalan	Pembangunan jalan baru sepanjang 20 KM (dari APBD Kota)	0	4 KM	8 KM	12 KM	16 KM	20 KM	
			Pembangunan jalan baru sepanjang 10.420KM (dari non APBD Kota, fasos dan fasum)	0	208, 4 KM	416, 8 KM	625,12 KM	833, 16 KM	10420 KM	
	2. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terbangunnya dan terpeliharanya PJU Kota Bandung	Terbangunnya PJU baru	18253 titik	18500 titik	18750 titik	19000 titik	19250 titik	19500 titik	Jumlah titik PJU sampai awal tahun 2008 sebesar 18.253 PJU (laporan serah terima dari Distam ke DBNP)
			Perbaiki PJU	4.388 titik	4000 titik	2500 titik	2500 titik	2500 titik	2500 titik	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
2. 25 % dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi umum Kota	1. Program peningkatan pelayanan angkutan	1. Tersedianya angkutan umum missal yang nyaman dan terjangkau	1. Terwujudnya operasional angkutan umum massal di 5 Koridor (Cibeureum-Cibiru, Cicaheum-Cibeureum, Margahayu-St. Hall, Antapani-Laswi-St. Hall, Antapani-Laswi lingkaran selatan)	0	1 koridor	2 koridor	3 koridor	4 koridor	5 koridor	Pembentukan konsorsium dengan perbandingan TMB dan angkot sebesar 1 : 3
3. Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 5 aspek	1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan	1. Terwujudnya kecepatan rata-rata minimal 25 km/jam	13 km/jam	17 km/jam	19 km/jam	21 km/jam	23 km/jam	25 km/jam	Kapasitas jalan yang tidak cukup menampung pertumbuhan kendaraan
			2. Terpeliharanya rambu jalan marka dan traffic light/ATCS	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2 marka parker 4.940 m2 rambu 500	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2, marka parker 4.940 m2, rambu 500	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2, marka parker 4.940 m2, rambu 500	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2, marka parker 4.940 m2, rambu 500	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2, marka parker 4.940 m2, rambu 500	ATCS 200, marka jalan 12.000 m2, marka parker 4.940 m2, rambu 500	
	2. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan	2. Terwujudnya prasarana dan sarana perhubungan yang efisien dan nyaman	1. Tersedianya halte angkutan umum	89 Halte	10 Halte	25 Halte	40 Halte	55 Halte	70 Halte	Target 15 halte per tahun perlu keterlibatan pihak Pemerintah dan Swasta
			2. Tersedianya fasilitas parker khusus (gedung/taman parkir) Kota Bandung	0	0	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	Target 1 lokasi per tahun

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Tujuan Misi : 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis / SPM										
1. 75 % penduduk dilayani air bersih dengan rata-rata pengaliran air 120 lt/orang/hari dengan pengaliran kontinu 24 jam	1. Program peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan air bersih	1. Meningkatkan layanan pengaliran air bersih kepada masyarakat	1. 75 % masyarakat kota Bandung mendapatkan pelayanan air bersih system perpipaan	65% penduduk dilayani air bersih rata-rata durasi pengaliran 16jam/hari	67 % penduduk dilayani air bersih	69 % penduduk dilayani air bersih	71 % penduduk dilayani air bersih	73 % penduduk dilayani air bersih	75 % penduduk dilayani air bersih	Terkait langsung dengan program penyediaan air baku
2. Jaringan drainase primer kota terbentuk integrasi per wilayah pelayanan drainase kota 50 % system drainase kota terpadu	1. Program pengendalian banjir	1. Meminimalkan potensi banjir	1. Terpeliharanya keamanan lingkungan sungai sepanjang 7.500 M 2. Berkurangnya lokasi banjir di Kota Bandung dari 68 lokasi	46 sungai dan anak sungai (panjang 255,55 km); 0 % 23 lokasi	20.00 % 8 lokasi	40.00 % 10 lokasi	60.00 % 9 lokasi	80.00 % 9 lokasi	100.00 % 9 lokasi	Penanganan lereng bantaran dan sediment sungai Pengendalian banjir terkait dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai dan drainase
	2. Program pembangunan saluran drainase (gorong-gorong)	1. Membangun saluran baru dan memelihara saluran	1. Terwujudnya kelancaran pengaliran air saluran jalan sepanjang 35.317 M	9.827 m	6.317 m	12.817 m	19.817 m	27.317 m	35.317 m	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong terpadu
	3. Program pengembangan pengelolaan dan konvensasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	1. Meningkatkan penataan lingkungan sungai	1. Terpeliharanya kelancaran pengairan air sungai sepanjang 520.000 M	104.000 m	100.000 m	205.000 m	310.000 m	415.000 m	520.000 m	Pengangkatan sediment sungai
	4. Program pengembangan dan pembangunan trotoar	1. Meningkatnya fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan aman	1. Terwujudnya peningkatan pelayanan trotoar sepanjang 21.994 M	6.835 m	4.394 m	8.794 m	13.194 m	17.594 m	21.994 m	
3. 50% kawasan kota terlayani oleh system penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Terwujudnya peningkatan sanitasi melalui penataan air limbah	1. Pengembangan system pengelolaan sanitasi air limbah Kota Bandung dengan cakupan 50%	38.00%	40.00%	42.00%	44.00%	46.00%	50.00%%	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Tujuan Misi : 8. Mewujudkan Mitigasi Bencana yang Handal										
1. Meningkatkan fungsi organisasi yang menangani kebencanaan	1. Program peningkatan kesiapan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Keadaan pemilik/pengelola bangunan akan kelengkapan system proteksi kebakaran pada bangunan	Terwujudnya system proteksi kebakaran pada bangunan sesuai norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran pada 1000 bangunan baru	1.400 bangunan	200 bangunan	400 bangunan	600 bangunan	800 bangunan	1000 bangunan	Perlu penerapan manajemen bencana yang terintegrasi dalam menghadapi bencana alam maupun non alam
	2. Program pelayanan prima dalam pencegahan dan penanggulangan kebakarandan bencana lainnya	Terkendalinya kerugian kebakaran melalui pemebuhan standart Respond Time (SRT) 15 menit (kondisi saat ini ± 20 menit)	Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap	141 kebakaran	130 kebakaran	120 kebakaran	110 kebakaran	100 kebakaran	90 kebakaran	Untuk mencapai SRT 15 menit perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, peran serta masyarakat/Satwanker (SRT saat ini ± 20 menit)
			Berkurangnya kerugian akibat bahaya kebakaran (Milyar Rupiah)	12,24	11,01	9,91	8,92	8,03	7,24	
	3. Program tanggap darurat bencana alam	Terlaksananya penanganan darurat bencana alam	1. Terwujudnya kembali pelayanan jalan sepanjang 7.575 m	1500 m	775 m	2475 m	4175 m	5875 m	7575 m	
			2. Terwujudnya kembali keamanan lingk. Sungai air sepanjang 6.000 m	0	0	1500 m	3000 m	4500 m	6000 m	

MISI-5

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan

Tujuan Misi : 1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi)

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
1. Terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data	1. program perencanaan pembangunan	1. meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	1. Tingkat kinerja perencanaan daerah	65 %	70 %	75 %	85 %	90 %	95 %	Ketersediaan dan validasi data, analisa dan waktu
		2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik	2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	65 %	70 %	75 %	85 %	90 %	95 %	Rembug warga (SK 278/2000) dan Musrenbang (SPPN)
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat dalam penetapan produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. program pembangunan Hukum Daerah	1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang memenuhi aspek yuridis, sosiologi dan filosofis	1. Legislasi produk hukum daerah (produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			2. Sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			3. Tingkat pelayanan bantuan Hukum/penanganan perkara	100 % (38 perkara)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dari permintaan Bantuan Hukum yang disetujui
3. Terwujudnya penegakan Hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi	1. Program penataan perundang-undangan	1. Meningkatnya sinergitas dan kualitas penataan produk hukum daerah	1. Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			2. Penindakan terhadap Pelanggaran Displin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Meningkatnya ketersedianya sarana dan prasarana bangunan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1. Pengadaan kantor Kecamatan dan Kelurahan - Pengadaan Lahan - Pembangunan Kantor	170 163	171 165	174 172	178 176	181 181	181 181	
			2. Sertifikasi kepemilikan tanah asset Pemerintah Kota Bandung	25 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %	
			3. Pengadaan sarana dan pengolahan data penyampaian arsip (Gedung Depo Arsip Daerah)	0	0	50 %	75 %	100 %	100 %	

<http://www.bphn.go.id/>

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
5. Tersedianya SDM aparatur yang bertanggungjawab tepat fungsi tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Program pembinaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur	1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1. Tingkat kapasitas Sumberdaya aparatur	Diklat prajabatan 1.848 orang dan Diklat dalam jabatan 170 orang	Diklat prajabatan 1.821 orang dan Diklat dalam jabatan 240 orang	Diklat prajabatan 998 orang dan Diklat dalam jabatan 250 orang	Diklat prajabatan 700 orang dan Diklat dalam jabatan 300 orang	Diklat prajabatan 400 orang dan Diklat dalam jabatan 350 orang	Diklat prajabatan 400 orang dan Diklat dalam jabatan 400 orang	
		2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kinerja aparatur	1. Ratio jumlah aparat dengan jumlah penduduk	1 : 95 (jumlah aparatur sebanyak 24.291 org)	1 : 97	1 : 100	1 : 102	1 : 105	1 : 107	
			2. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional	78 % (13.158 org)	82 %	84 %	90 %	95 %	100 %	
			3. Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan public	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			4. Pola intensif dan penggajian berdasarkan kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6. Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1. Program pemantapan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan ekonomi daerah pemerintah daerah dan pemerintah wilayahKecamatan dan Kelurahan	1. Tingkat pelayanan public berbasis informasi teknologi guna mendukung Bandung Cyber city (E-Goverment)	10 %	25 %	60 %	100 %	100 %	100 %	- Bandung electronic Procurement (BEP) th 2010 - Bandung electronic Budgeting th 2010 - Bandung electronic Planning Project th 2010 - Bandung electronic Controlling th 2011 - Bandung electronic Delivery and evaluating th 2011
			2. Tingkat pelayanan online system perpajakan	2 Wajib Pajak	50 WP	75 WP	100 WP	125 WP	150 WP	
			3. Intergrasi jaringan system informasi daerah	25 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Simda (Simkeu, simduk, simpag, kel, kec dll)
			4. Tingkat koneksi data kependudukan di	-	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	http://www.bphn.go.id/

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
			kelurahan, kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan sipil							
			5. Tingkat Perlimpahan urusan pemerintah daerah	19 Bidang kewenangan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	
			6. Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu atap	30 %	70 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
7. Tersosialisasinya kebijakan tentang pengawasan	1. Program pengawasan pembangunan daerah	1. Mewujudkan peran dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah	1. Tingkat kinerja pengawasan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	
			2. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pengaduan masyarakat ditindak lanjuti
8. Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000	1. Program kelembagaan dan ketatalaksanaan	1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien	1. Jumlah SKPD yang menerapkan SMM ISO 9001 : 2000	13	27	41	55	69	83	
		2. Tersedianya norma standar, prosedur dan criteria penyelenggara pemerintah	1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD	1	3	6	9	12	15	
9. Meningkatnya Pemahaman	1. Program pendidikan politik	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideology dan wawasan kebangsaan	1. Tingkat Apresiasi terhadap politik dan pemilu	3	3	3	2	2	2	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Kurang Baik 5. Buruk
10. Terbangunnya ketertiban dan	1. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Meningkatnya kenyamanan dan	1. Tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat	3	3	3	2	2	2	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Kurang Baik 5. Buruk

MISI-6
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan
Dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan Misi : 1. Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang Optimal

Tujuan Misi : 2. Mewujudkan Peran serta Aktif Masyarakat dan Pembiayaan Pembangunan Kota

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
Rata-rata peningkatan pendapatan 13 %	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	1. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Peningkatan Pendapatan dari pajak dan retribusi dari : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame PPJ Parker Retribusi	60,3 Milyar 51,4 Milyar 17,5 milyar 21,5 Milyar 57,4 Milyar 5,1 Milyar 73,8 Milyar	74,9 Milyar 66,7 Milyar 23,1 Milyar 21,0 Milyar 72,3 Milyar 5,8 Milyar 78,2 Milyar	78,8 Milyar 68,8 Milyar 23,1 Milyar 28,8 Milyar 81,5 Milyar 6,5 Milyar 82,9 Milyar	89,0 Milyar 78,0 Milyar 25,6 Milyar 32,7 Milyar 92,8 Milyar 7,3 Milyar 87,9 Milyar	99,9 Milyar 87,8 Milyar 28,8 Milyar 36,9 Milyar 104,7 Milyar 8,2 Milyar 93,2 Milyar	111,3 Milyar 98,1 Milyar 32,2 Milyar 41,2 Milyar 117,2 Milyar 9,1 Milyar 98,7 Milyar	
Obligasi daerah dan Road Fund		Terimplementasikannya instrument pembiayaan pembangunan non konvensional	1. Terlaksananya Obligasi daerah dan Road Fund	0	Perumusan instrument kebijakan Obligasi daerah dan Road Fund	Perumusan instrument kebijakan Obligasi daerah dan Road Fund	Sosialisasi dan uji coba Obligasi daerah dan Road Fund	Pelaksanaan Obligasi daerah dan Road Fund	Pelaksanaan Obligasi daerah dan Road Fund	

INDIKATOR CAPAIAN MISI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	EKSISTING 2008	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					KETEREANGAN
					2009	2010	2011	2012	2013	
<p>Terumuskannya kerjasama instrument insentif fisikal antar tingkat pemerintahan</p> <p>Beberapa Intensif fiskal untuk masyarakat dalam pembangunan pelaksanaan dan pemeliharaan barang dan jasa diterapkan</p> <p>Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang</p> <p>Terbangunnya instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat</p>	Program pengembangan kemitraan pembiayaan pembangunan daerah	Berkembangnya kemitraan pembiayaan – pembiayaan pembangunan daerah	1. Terlaksananya system insentif untuk sector swasta dalam pembayaran penyediaan barang dan jasa	0	Perumusan instrument kebijakan Sistem Intensif	Penetapan instrument kebijakan Sisten Intensif	Sosialisasi dan uji coba Sistem Intensif	Pelaksanaan Sistem Intensif	Pelaksanaan Sistem Intensif	
			2. Terlaksananya system intensif untuk sector masyarakat dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa							
			3. Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang politik	0	Perumusan instrument kenijakan kelembagaan perusahaan patungan	Penetapan instrument kenijakan kelembagaan perusahaan patungan	Terbentuknya perusahaan patungan	Operasional perusahaan patungan	Operasional perusahaan patungan	
			4. Terlaksananya instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	0	Perumusan instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Penetapan instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Pelaksanaan instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Pelaksanaan instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	Pelaksanaan instrument pembiayaan pembangunan non konvensional berbasis masyarakat	
			5. Meningkatnya proyek pembangunan non konvensional melalui kerjasama pemerintah dengan swasta	0	0	0	1 proyek	2 proyek	3 proyek	Bantuan Teknis dari BAPPENAS untuk 3 proyek

BAB VI

PENUTUP

6.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Tahun 2009-2013 ini disusun seiring dengan Walikota terpilih dalam hal akhir masa jabatan Walikota dan belum tersusun RPJMD tahap berikutnya, maka RPJMD Tahun 2009-2013 ini dapat menjadi dasar, khususnya pada program-program pembangunan yang relative strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan rakyat. Hal ini berlaku sampai disusun kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

6.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah pedoman bagi pemerintah Kota Bandung dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagi pemerintah Kota Bandung, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode tersebut. Bagi masyarakat dan stakeholders, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kota Bandung.

Kebersihan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah, (b) Konsentrasi, (c) Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah, (d) Pelaksana Good Governance, (e) Keberpihakan kepada rakyat, (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta (g) Kedisiplinan, ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat.

Kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 dengan sebaik-baiknya.
2. SKPD menyusun Rencana Strategis yang kemudian digunakan untuk menyusun Rencana Kerja.

3. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut;
4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI